

TENGET
DALAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Studi kasus: revitalisasi kearifan lokal mengenai lingkungan
di *Desa Adat* Penglipuran, Bangli, Bali

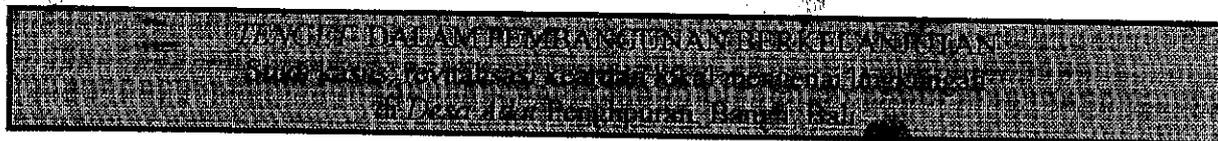


TESIS
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

I Dewa Gede Raka Hudyana
LAK001099

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
Oktober
2002

TESIS



disusun oleh:
I Dewa Gede Raka Hudyana
L4K001099

Telah dipresentasikan dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada hari Sabtu tanggal 12 (dua belas) bulan Oktober tahun dua ribu dua, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing I

DR. TUKIMAN TARUNA

Pembimbing II

ERLYN INDARTI, SH. MA.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Universitas Diponegoro

PROF. DR. SUDHARTO P HADI, MES.
NIP. 130 810 134



Pengesahan

Judul Tesis : TENGET DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Studi kasus: revitalisasi kearifan lokal mengenai lingkungan
di *Desa Adat Penglipuran*, Bangli, Bali
Nama Mahasiswa : I Dewa Gede Raka Hudyana.
Nomor Induk : L4K001099.
Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan
Konsentrasi : Perencanaan Lingkungan

Telah dipresentasikan dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada hari Sabtu tanggal 12 (dua belas) bulan Oktober tahun dua ribu dua, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing I

DR. TUKIMAN TARUNA

Pembimbing II

ERLYN INDARTI, SH. MA.

Penguji I

PROF. DR. SUDHARTO P HADI, MES

Penguji II

IR. NANY YULIASTUTI, MSP

Mengetahui

Panitia Ujian Akhir Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Universitas Diponegoro
Ketua

PROF. DR. SUDHARTO P HADI, MES

NIP. 130 810 134

Pernyataan.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, di dalamnya tidak terdapat materi yang berasal dari karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan serta informasi yang diperoleh dari hasil penerbitan atau yang belum / tidak diterbitkan, atau materi yang diperoleh langsung dari pihak pertama, telah dicantumkan sumbernya dalam tulisan dan dalam daftar pustaka

Semarang, 05 Oktober 2002



I Dewa Gede Raka Hudyana
L4K001099

Riwayat Hidup Penulis



I Dewa Gede Raka Hudyana, lahir di Gianyar tanggal 30 Maret 1955. Anak pertama dari tiga bersaudara, putra keluarga I Dewa Gede Rai (alm) dan I Dewa Ayu Nyoman Rai (alm). Menamatkan pendidikan: Sekolah Dasar Negeri No. 2 Belantih di Kintamani - Bangli (1968); Sekolah Menengah Pertama Negeri Payangan – Gianyar (1971); Sekolah Menengah Atas Negeri Singaraja (1974); dan meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Udayana, Bali (1985). Bekerja di bidang Konsultan Perencanaan Bangunan dan Perencanaan Kota a.l. pada *Japan City Planning* (1987-1988) dan memasuki tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1989. Selama sebagai PNS pernah bertugas dalam: Proyek Pemugaran Perumahan Desa; Proyek Perbaikan Lingkungan Permukiman Kota; Pengelola Teknis Proyek Pembangunan Gedung Negara pada berbagai instansi pusat dan daerah; dan terakhir bertugas sebagai Pemimpin Proyek Penataan Lingkungan Niti Mandala di Kota Denpasar. Sampai saat ini penulis adalah staf teknik pada Sub Dinas Cipta Karya, Dinas PU Propinsi Bali.

OM, Asato mā sadgamaya, tamso mā jyotir gamaya, mṛtyor mā mṛtam gamaya
(Bṛh. Ar. Up. 1.3.28.)

Hyang Widi, bimbinglah kami dari tidak benar menuju benar, dari kegelapan (pikiran) menuju cahaya (pengetahuan) yang terang dan dari kematian (dunia) menuju kehidupan (surgawi) yang abadi

Kata Pengantar

Om, Avighnam astu nammo sidham.

Ketika berbicara tentang lingkungan, umumnya kita lebih banyak melihat ke luar, ke arah lingkungan sekitar di luar diri manusia. Padahal masalah lingkungan sesungguhnya lebih banyak bersumber di dalam diri manusia. Penelitian ini adalah penelitian lingkungan, walaupun banyak mengungkap tentang manusia dalam fenomena budaya, tapi upaya ini semata-mata dimaksudkan untuk membangun pemahaman tentang sesuatu nilai yang ada di dalam diri individu atau masyarakat berkenaan dengan pengelolaan lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah, dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Sangat disadari, penelitian ini tidak akan terlaksana dan memberi hasil dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu rasa terima kasih yang dalam disampaikan kepada: Pemerintah Propinsi Bali selaku pemberi tugas dan penyedia dana; Prof. Dr. Sudharto P Hadi, MES selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, beserta seluruh staf pengelola.; Dr. T Taruna dan Erlyn Indarti, SH, MA. selaku Dosen Pembimbing atas segala keluasan wawasan dan ketajaman pikiran yang telah dilimpahkan; Seluruh Dosen Pengampu; Tim Penguji dan Panitia Ujian; rekan-rekan mahasiswa serta pihak lain yang tidak dapat disebut satu-persatu. Semoga segala budi baik yang telah diberikan membuahkan kebaikan bagi semuanya.

OM, Ā no Bhadrāḥ Krattavo Yantu Wiśvātaḥ. (Rgveda I. 89:1)

Hyang Widi, atas perkenanMU, semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru

Semarang, 05 Oktober 2002
I D G Raka Hudyana

Daftar Isi

Pengesahan	iii
Persembahan	iv
Pernyataan	v
Riwayat Hidup Penulis	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Ilustrasi	x
Daftar Lampiran	xi
Daftar Istilah	xii
Abstrak	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	7
1.3. Tujuan	8
1.4. Proposisi	8
1.5. Kontribusi Penelitian	10
1.6. Sistematika dan Kerangka Penulisan	11
BAB II. KERANGKA ANALISA	12
2.1. <i>Tenget</i> dalam masyarakat dan budaya Bali	13
2.2. Pembangunan	19
2.2.1. Umum	19
2.2.2. <i>Tenget</i> dan Pembangunan di Bali	20
2.3. Pembangunan Berkelanjutan	21
2.4. Kerangka Analisis Konseptual	24
2.4.1. Kearifan Lokal	24
1. Pengertian	24
2. <i>Tenget</i> sebagai salah satu wujud kearifan lokal di Bali	25
2.4.2. Revitalisasi	26
2.4.3. Aspek Penelitian dan Kerangka Analisis	28
BAB III. PROSES PENELITIAN	31
3.1. Tradisi penelitian	31
3.2. Paradigma	31
3.3. Strategi Penelitian	32
3.4. Metoda Pengumpulan Data	32
3.5. Metoda analisa	33
3.6. Lokasi Penelitian	33
3.7. Jadwal penelitian	36
BAB IV. DISKRIPSI TENTANG <i>DESA ADAT</i> PENGLIPURAN	37
4.1. Pelaksanaan penelitian di lapangan	37
4.2. Kondisi karakteristik <i>Desa Adat</i> di Bali	40
4.3. Kondisi karakteristik lingkungan <i>Desa Adat</i> Pengelipuran	42
4.3.1. Latar belakang historis dan kultural	42
4.3.2. Lingkungan Fisik <i>Desa Adat</i> Penglipuran	44
1. Lokasi dan batas-batas <i>Desa Adat</i> Penglipuran	44

	ix
2. Pola Tata Lingkungan Desa	46
3. Pola Tata Bangunan	49
4.3.3. Lingkungan Sosial Budaya <i>Desa Adat</i> Penglipuran	53
1. Kependudukan.....	53
2. Sistem Kekrabatan	55
3. Sistem Perekonomian.....	56
4. Sistem Pemerintahan <i>Desa Adat</i>	57
5. Sistem nilai budaya	63
4.4. Pembangunan <i>Desa Adat</i> Penglipuran	65
4.4.1. Perencanaan Pembangunan	65
1. Perencanaan Pembangunan oleh masyarakat.....	65
2. Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah.....	67
4.4.2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan	71
1. Pelaksanaan dan pengelolaan hasil pembangunan oleh masyarakat..	71
2. Pembangunan oleh pemerintah	72
BAB V. <i>TENGET</i> , PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	
5.1. <i>Tenget</i> tumbuh dan berkembang	74
5.1.1. Pemahaman / pemaknaan <i>tenget</i>	75
5.1.2. Obyek-obyek <i>tenget</i>	77
5.1.3. Sesuatu menjadi <i>tenget</i>	83
5.1.4. Cara mengetahui <i>tenget</i>	86
5.1.5. Manfaat <i>tenget</i>	88
5.2. Pergeseran pemahaman tentang <i>tenget</i>	90
5.2.1. Perubahan pemahaman <i>tenget</i>	91
5.2.2. Waktu dan ciri perubahan	98
5.2.3. Akibatnya bagi lingkungan	98
5.2.4. Bila <i>tenget</i> diabaikan.....	99
5.3. Revitalisasi <i>Tenget</i> dalam Pembangunan Berkelanjutan	101
5.3.1. Hubungan <i>tenget</i> dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan	101
1. Pemenuhan kebutuhan dasar.....	101
2. Pemeliharaan Lingkungan.....	105
3. Keadilan Sosial.....	106
4. Kesempatan menentukan nasib sendiri.....	109
5.3.2. Menghidupkan dan mempertahankan <i>tenget</i> dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan	115
5.3.3. Sinergi dalam Perencanaan Lingkungan.....	117
BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	120
6.1. Kesimpulan	120
6.2. Rekomendasi.....	123
1. Memantapkan dan memelihara pemahaman masyarakat terhadap <i>tenget</i>	123
2. Menghindarkan pergeseran atau memudarnya pemahaman <i>tenget</i> akibat kegiatan pembangunan.....	123
3. Upaya-upaya revitalisasi.....	124
Daftar Pustaka.....	126

Daftar Ilustrasi

Ilustrasi II.1.	Kerangka Penelitian	14
Ilustrasi II.2.	Dasar Pemikiran	27
Ilustrasi II.3.	Pola Pembahasan.....	30
Ilustrasi IV.1.	Daftar Informan Kunci.....	38
Ilustrasi IV.2.	Lokasi Desa Adat Penglipuran.....	45
Ilustrasi IV.3.	Lokasi Desa Adat Penglipuran dalam Kabupaten Bangli	46
Ilustrasi IV.4.	Pola Tata Lingkungan Desa.	47
Ilustrasi IV.5.	“Facade” (penampakan depan) pada jalan utama yang membelah desa..	48
Ilustrasi IV.6.	Hutan bambu di sekitar desa	49
Ilustrasi IV.7.	Pola Tata Bangunan dalam Pekarangan.....	50
Ilustrasi IV.8.	Bangunan Perumahan.....	52
Ilustrasi IV.9.	Bangunan Umum	52
Ilustrasi IV.10.	Perbandingan status penduduk menurut adat.....	54
Ilustrasi IV.11.	Struktur penduduk menurut umur	54
Ilustrasi IV.12.	Struktur penduduk menurut pendidikan.....	54
Ilustrasi IV.13.	Struktur penduduk menurut pekerjaan.....	54
Ilustrasi IV.14.	Bale Agung tempat sangkep (rapat) dan matiti-krama (meniti karir adat) 60	
Ilustrasi IV.15.	Jro Bayan Mucuk (pakaian putih kanan) dan Jro Bayan Nyoman (pakaian putih kiri) sedang mempersiapkan perembahyangan purnama.....	60
Ilustrasi IV.16.	Model Pemerintahan Desa Adat Penglipuran	61
Ilustrasi IV.17.	Rencana Pemitakatan dalam Rencana Tata Ruang Desa Wisata Penglipuran	70
Ilustrasi IV.18.	Pusat kerajinan bambu yang kurang berfungsi	72
Ilustrasi IV.19.	Gedung Serba Guna beratap “seng”, kontras dengan lingkungan	73
Ilustrasi V.1.	Salah satu obyek kebendaan yang ditunjuk sebagai tenget.....	78
Ilustrasi V.2.	Salah satu perilaku simbolis.....	82
Ilustrasi V.3.	Skemata pemahaman tenget.....	89
Ilustrasi V.4.	Skema pergeseran pemahaman tenget	100
Ilustrasi V.5.	Aspek kearifan lingkungan dalam tenget.....	114
Ilustrasi V.6.	Korelasi sinergi aspek kearifan lingkungan dalam tenget dengan prinsip- prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	118

Daftar Lampiran

Lampiran 1	: Ringkasan Tesis	128
Lampiran 2	: Lokasi Desa Adat Penglipuran dalam Peta Kepariwisata Propinsi Bali	140
Lampiran 3	: Lokasi Desa Adat Penglipuran dalam Peta Kepariwisata Kabupaten Bangli.	141
Lampiran 4	: Peta Desa Adat Penglipuran	142
Lampiran 5	: Dokumentasi Foto	143
Lampiran 6	: Notulen Seminar Hasil Penelitian	154
Lampiran 7	: Daftar Nama Informan	157
Lampiran 8	: Surat Keterangan (telah melakukan penelitian)	158
Lampiran 9	: Surat Pengantar Penelitian	159

Daftar Istilah

- Awig-awig* : hukum atau peraturan tertulis bagi sebuah *Desa Adat* di Bali yang bersumber dari ajaran Agama Hindu dan tradisi, berisikan ketentuan-ketentuan tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Penciptanya, manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat dan hubungan manusia dengan lingkungan alamnya.
- Bale Agung* : adalah bangunan memanjang sebagai tempat mengadakan *paruman* atau *sangkepan* (musyawarah desa) dengan kapasitas duduk 76 (tujuh puluh enam) orang, terletak di *Jaba Tengah* (halaman tengah) *Pura Penataran*. Pura Penataran, sesuai dengan konsep *Tri Mandala* terdiri dari tiga halaman yaitu: *Jeroan* (halaman dalam = tempat pemujaan), *Jaba Tengah* (halaman tengah = tempat kegiatan adat) dan *Jaba Sisi* (halaman luar = tempat persiapan upacara).
- Bali Aga* atau *Bali Mula* : adalah kelompok masyarakat Bali yang telah ada sejak sebelum pengaruh kerajaan Hindu Jawa sampai ke Bali. Mereka lebih banyak tinggal di Bali dataran tinggi, menganut Agama Hindu dengan beberapa perbedaan dalam tatanan upaakara-nya (kulit) dibandingkan dengan masyarakat Bali di dataran rendah atau pesisir.
- Bhuwana Alit* dan *Bhuwana Agung*: adalah keyakinan masyarakat setempat bahwa *Bhuana Alit* (diri manusia) analog dengan *Bhuwana Agung* (jagat raya) karena keduanya bersumber dari Yang Tunggal, keduanya dibentuk oleh unsur-unsur yang sama yaitu *Panca Maha Bhuta* (lihat penjelasan tentang *Panca Maha Bhuta*). Intinya adalah, apapun perlakuan manusia terhadap alam maka begitulah juga alam akan memperlakukan dirinya.
- Catur Asrama* : adalah sistem pembagian fase hidup manusia menurut ajaran Hindu yaitu: *brahmacharin* adalah mereka yang belum menikah / masa belajar / kaum muda; *grehasta* adalah mereka yang telah berumah tangga dan masih mempunyai tanggungan serta masih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; *bhiksuka* adalah mereka yang sudah mengurangi keterlibatannya dari kehidupan bermasyarakat dan mulai lebih banyak menjalani hidup kerokhaniaan; dan *wanaprasta* yaitu hidup mengasingkan diri / bertapa.
- Desa Adat* : sering pula disebut Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali (Dharmayuda, 2001) Berbeda dengan *Desa Dinas* yakni lembaga pemerintahan terendah setara kelurahan yang mengurus administrasi pemerintahan umum, *Desa Adat* adalah lembaga pemerintahan adat yang mengurus masalah-masalah agama, adat dan budaya.
- desa mawacara*: istilah dalam bahasa Bali yang berasal dari bahasa Jawa Kawi yang berarti: desa (satuan pemerintahan terkecil) dapat mengatur tata cara pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi setempat.
- desa, kala, patra* : *desa* = tempat, *kala* = waktu, *patra* = keadaan . ~ ~ ~ = istilah yang berarti: aktualisasi suatu masalah hendaknya dikaitkan dengan tempat, waktu dan keadaan.
- Hasta Bumi* : dari kata *hasta* = tangan dan *bumi* = tanah. *Hasta Bumi* adalah manuskrip dalam daun lontar yang diyakini sebagai buah karya *Bhagawan Wiswa Karma*. Menurut Jro Bayan Nuoman Wiswa Karma sesungguhnya mengandung pengertian *wi* = aturan, *swa* = diri sendiri, *karma* = perbuatan, sehingga seluruhnya berarti: aturan tentang memperlakukan sesuatu dengan memakai perbandingan pada diri sendiri. *Hasta Bumi* mengatur tentang tata letak bangunan dalam pekarangan dimana jarak-jarak bangunan diukur dengan menggunakan kelipatan panjang telapak kaki calon penghuni. Setiap satuan kelipatan mengandung arti dan tuah tertentu.
- Hasta Kosala Kosali*: dari kata *hasta* = tangan dan *sala* atau *salu* = bangunan. *Hasta Kosala Kosali* adalah manuskrip diatas dau lontar, tentang jenis dan ukuran bangunan. Ukuran-ukuran bangunan mengacu pada ukuran tubuh calon penghuni misalnya: *a*

nyari = sejari, *a guli* = sepatihan ujung jari, *a musti* = dari telapak tangan bagian bawah sampai ujung ibujari saat tangan dikepalkan, *a cengkang* = serentangan jari telunjuk dengan ibujari, *a lengkat* = serentangan ujung jari tengah dengan ujung jari ibujari, *a hasta* = dari siku ke ujung jari tengah, *a depa* = serentangan tangan, *a depa agung* = serentangan ujung jari tangan ke ujung jari kaki. (lihat pula penjelasan mengenai *Hasta Bumi*).

Jro Bayan Mucuk terdiri dari kata *Jro* = panggilan kehormatan secara adat; *Bayan* berasal dari kata *wayah-an* yang mengalami perubahan bunyi menjadi *Bayan* = lebih tua; *Mucuk* berasal dari kata *pucuk* = ujung atau puncak. *Jro Bayan Mucuk* atau sering juga disebut *Jro Bayan Dinwuran* (dari kata *dinwur-an* = lebih di atas) adalah pejabat adat tertinggi berdasarkan urutan ke-senior-an melalui proses *ulu-apad* dan bukan melalui proses pemilihan (lihat penjelasan *ulu-apad*).

Jro Bayan Nyoman : *Nyoman* dari kata *nom-an* = lebih muda. *Jro Bayan Nyoman* adalah pejabat adat tertinggi ke dua setelah *Jro Bayan Mucuk*. (lihat penjelasan tentang *Jro Bayan Mucuk*)

Jro Bayan Salain: *Salain* berarti mantan (lihat penjelasan tentang *Jro Bayan Mucuk*)

Kanca Roras: dari kata *ka-anca* = diangkat untuk suatu penugasan; *roras* = *rolas* = dua belas. *Kanca Roras* dapat dianalogkan sebagai majelis adat tertinggi yang terdiri dari dua belas orang, yang ditentukan berdasarkan urutan ke-senior-an dalam proses *ulu-apad* (lihat penjelasan *ulu-apad*).

Karang Kerti: adalah kapling pekarangan rumah di *Desa Adat* Penglipuran. seluruhnya berjumlah 77 buah (tetap) dan dihuni oleh keluarga *Krama Pangarep*. *Karang Kerti* sepenuhnya menjadi milik *Desa Adat* Penglipuran, penghuninya hanya memperoleh hak guna pakai yang disebut *penanggap*. *Karang Kerti* ini tidak semata-mata berarti sekedar tempat tinggal, tapi tempat mengabdikan kepada Tuhan melalui perbuatan baik, karena '*kerti*' dalam bahasa Bali berarti 'berbuat baik sesuai dengan ketentuan agama'.

Karang Memadu: sebuah kapling pekarangan yang disediakan bagi mereka yang beristri lebih dari satu (bahkan termasuk rumah akan disediakan oleh *Desa Adat* Penglipuran bagi yang *memadu*). Tetapi sesungguhnya ini adalah tempat pengucilan. Sampai saat ini tempat ini belum pernah dihuni sehingga lebih merupakan tanda peringatan dan perlindungan hak-hak perempuan.

Kelihan Adat terdiri dari kata *kelih-an* dari kata *kelih* = tua sehingga *kelih-an* = lebih tua, dan kata adat untuk menyatakan dipilih dan ditunjuk secara adat. *Kelihan Adat* atau sering disebut *BenDesa Adat* adalah orang yang dipilih dan dituakan (sehingga juga disebut tetua atau ketua) secara adat.

Kelihan Dinas terdiri dari kata *kelih-an* dari kata *kelih* = tua sehingga *kelih-an* = lebih tua, dan kata *Dinas* yang menyatakan ditunjuk atau dipilih secara ke-dinas-an. *Kelihan Dinas* adalah pejabat pemerintah sebagai pelaksana administrasi pemerintahan di bawah Lurah.

Krama Pangarep: berasal dari kata *krama* = anggota dan *pa-ngarep* = yang di depan. *Krama Pangarep* atau sering disebut *Pangayah Pangarep* adalah mereka yang berstatus anggota utama dalam *Desa Adat* Penglipuran, dengan jumlah tetap sebanyak 76 KK. Bila hak dan kewajibannya gugur sebagai anggota utama, atau disebut '*nyada*', yang bersangkutan digantikan kedudukannya oleh salah seorang anak laki-laki – biasanya yang tertua – atau oleh orang yang ditunjuk oleh *Desa Adat* Penglipuran sesuai dengan ketentuan awig-awig. *Krama Pangarep* berhak mendiami *karang kerti* dan mengelola lahan pertanian atau hutan bambu milik *Desa Adat* Penglipuran yang disebut '*cecatu*' dengan kewajiban penuh ikut dalam setiap kegiatan adat.

Krama Pangerob atau *Krama Roban* atau *Pangayah Pangerob*: *Pangerob* berasal dari kata *pa-ng-rob* yang berarti keberadaannya di *Desa Adat* Penglipuran menjadi tanggungan orang lain, dalam hal ini salah satu dari *Krama Pangarep*, biasanya karena masih ada hubungan darah. *Krama Pangerob* ini keanggotaannya dalam

Desa Adat Penglipuran bersifat tidak tetap atau sementara. Umumnya mereka akan berusaha mencari penghidupan ke luar desa.

- Krama* : anggota kelompok keturunan pendiri sebuah permukiman di Bali. Kemudian berubah menjadi *Krama* atau *Pakrama*. ~ an = akhiran yang merubahnya menjadi kata ganti benda. Pa ~ an menyatakan tempat berkelompok atau bermasyarakat.
- negara mawa tata* = istilah dalam bahasa Bali yang berasal dari bahasa Jawa Kawi yang berarti negara mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan.
- Pananggap* : dari kata *pa-tanggap* = orang yang diberi tanggungjawab dengan memperoleh suatu imbalan.
- Pasangkepan Purnama*: terdiri dari kata *pasangkepan* dari kata *sangkep* = rapat atau musyawarah, *pa~an* berarti *kegiatan*; *purnama* = bulan purnama. *Pasangkepan Purnama* = kegiatan rapat atau musyawarah yang dilakukan secara rutin pada hari bulan purnama dimulai sejak pagi hari sampai selesai siang hari. *Pasangkepan purnama* ini tidak sepenuhnya berarti 'rapat' atau 'musyawarah' seperti yang biasa dikenal, karena lebih banyak berupa kegiatan bersifat religius seperti: menyiapkan sesaji, sembahyang bersama, terutama bersyukur dan bersaksi kepada Tuhan tentang kondisi masyarakat pada saat itu.
- Prajuru* : dari kata *para-juru* = adalah orang-orang yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan suatu tugas (ingat juru-kunci). *Prajuru Desa Adat* adalah sekelompok orang yang oleh *Desa Adat Penglipuran* diserahi tugas untuk mengelola pemerintahan adat. Konsep prajuru ini berbeda dengan konsep pimpinan atau pemimpin (selanjutnya baca *Desa Adat*; Kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali oleh Dharmayuda, 2001, Upada Sastra, Denpasar)..
- Sekaha* : organisasi dibawah payung *Desa Adat* Penglipuran yang anggotanya terdiri dari beberapa orang krama (tidak terbatas hanya pada *Krama Pangarep*) dan berkenaan dengan fungsi tertentu seperti: *Sekaha Gong* = adalah organisasi para penabuh gambelan; *Sekaha Kidung* = kelompok orang-orang yang senang menyanyikan kidung pada saat upacara keagamaan; *Sekaha Manyi* = organisasi petani khusus untuk menangani panen padi; bahkan ada *Sekaha Semal* = sekelompok anak-anak yang waktu luangnya digunakan ber-ramai-ramai untuk menangkap atau menghalau tupai yang mengganggu kebun kelapa. Setiap krama umumnya berupaya untuk masuk menjadi salah satu atau beberapa keanggotaan sekaha.
- Sekaha Daha Teruna*: terdiri dari kata *Sekaha* = organisasi atau kelompok seprofesi; *Daha* = pemuda atau gadis; *Teruna* = pemuda atau jejaka. *Sekaha Daha Teruna* adalah organisasi yang beranggotakan para muda-mudi di *Desa Adat* Penglipuran. Setiap anak di *Desa Adat* Penglipuran, begitu meningkat akil-balig diharuskan memasuki organisasi ini. Dalam organisasi ini mereka digembleng dengan melibatkannya dalam setiap kegiatan adat dan agama. Bahkan terdapat kegiatan adat dan agama yang hanya boleh dilakukan oleh para muda-mudi karena mereka dianggap masih 'suci' seperti: membuat dan menyelenggarakan upacara kematian; membuat dan menyelenggarakan upacara persembahyangan di *Pura Dalem Pingit* . Mereka juga diserahi tugas mengelola kegiatan pariwisata. Bagi mereka yang bersekolah di kota, dibebaskan dari tugas muda-mudi sehari-hari.
- Tenget* : istilah dalam Bahasa Bali yang dekat artinya dengan keramat, angker, wingit (b. Jawa), tuah, atau sakral. Di Bali ada perilaku masyarakat untuk: menghindari, menjaga, melindungi, menghormati, mempertahankan, bahkan memelihara. sesuatu yang dianggap "tenget", atau sesuatu yang disakralkan, disucikan, dikramatkan. *Tenget* bagi masyarakat Bali megisyaratkan: larangan, pamali atau tabu tertentu terhadap sesuatu yang di-*tenget*-kan, oleh karenanya harus dijaga, dipelihara, dihormati dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Penelitian ini justru diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang utuh tentang tenget dari pandangan yang beragam tersebut, dalam hubungannya dengan pembangunan dan Pembangunan Berkelanjutan

Tugu : adalah bangunan suci terbuat dari batu padas atau batu bata. Bentuknya ada yang sederhana dan ada pula yang dibuat dengan nilai artistik tinggi dengan menggunakan ukiran. Bangunan ini terdapat pada setiap tempat dimana sering dilakukan kegiatan dan umumnya terletak pada sisi timur atau sisi arah ke gunung pada areal bersangkutan. Di tempat inilah dilakukan pemujaan sebelum kegiatan dimulai.

Ulu-apad: dari kata *ulu* = hulu = kepala atau atas; *apad* = akar kata *pad* = kaki atau bawah. *Ulu apad* adalah sistem penentuan status atau kedudukan seseorang *Krama Pangarep* dalam struktur pemerintahan adat dengan jalan memberi nomor urut ke-seniorannya berdasarkan waktu pernikahan dan waktu dilantiknya sebagai anggota penuh. Nomor urut tersebut dimulai dari nomor 1 (satu) sampai 76 (tujuh puluh enam), masing-masing nomor urut ditentukan posisi duduknya secara berurut di Bale Agung (*bangunan panjang*) tempat *paruman* (rapat) purnama dilangsungkan. Bila salah seorang *Krama Pangarep* itu gugur hak dan kewajibannya menurut ketantuan dalam *awig-awig*, maka nomor urutnya diambil alih oleh nomor urut yang berikutnya, dan begitu seterusnya sehingga terjadi kekosongan pada nomor urut terakhir yang disebut '*pamuit*'. *Pamuit* ini akan segera diisi oleh pengganti baru yang disebut sebagai '*panyeledihi*' yang diambil dari ahli waris mereka yang gugur atau yang ditunjuk oleh *Desa Adat* berdasarkan ketentuan dalam *awig-awig*. Nomor urut 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) setelah melalui proses wisuda dan ritual tertentu disebut dengan '*Kanca Roras*', dengan gelar masing-masing secara berurutan adalah: *Jro Bayan Mucuk / Duwuran, Jro Bayan Nyoman, Jro Bahu Duwuran, Jro Bahu Nyoman, Jro Singgukan Duwuran, Jro Singgukan Nyoman, Jro Cacar Duwuran, Jro Cacar Nyoman, Jro Balung Duwuran, Jro Balung Nyoman, Jro Pati Duwuran dan Jro Pati Nyoman*. *Kanca Roras* berfungsi sebagai majelis perwakilan yang berwenang membuat peraturan adat, memimpin penyelenggaraan upacara adat dan agama, memutus sengketa dan memilih seorang pejabat eksekutif yang disebut *Kelihan Adat* atau *BenDesa Adat*.

Wariga : adalah pengetahuan tentang baik buruk sifat hari berdasarkan perhitungan pertemuan antara siklus *dauh*; siklus *wawaran*; siklus *wuku*; siklus *ingkel*, siklus *sasih* dan siklus *masan*. *Dauh* artinya sasat yang umurnya sekitar empat jam. *Wawaran* ada sepuluh jenis mulai dari yang siklusnya: satu hari (*eka wara* yaitu: *luang* = ruang atau kosong), dua hari (*dwi wara* yaitu: *menga* = terang dan *pepet* = gelap), tiga hari (*tri wara* yaitu: *pasah* = basah, *beteng* = lembab dan *kajeng* = kering), demikian seterusnya sampai yang siklusnya sepuluh hari (*dasa wara*). Yang lazim dijadikan patokan perhitungan adalah *panca wara* (*umanis/legi, paing, pon, wage, kliwon*) dan *sapta wara* (*redite* = minggu, *coma* = senin, *anggara* = selasa, *buda* = rabu, *wraspati* = Kamis, *sukra* = jumat dan *saniscara* = sabtu). *Wuku* ada 30 jenis masing-masing berumur 7 hari. *Ingkel* ada lima macam masing-masing berumur 7 hari. *Sasih* atau bulan ada 12 masing-masing berumur 35 hari (kecuali berdasarkan perhitungan tertentu sesuai kedudukan bintang ada bulan peralihan disebut *pengalihan sasih* yang umurnya tidak 35 hari). *Masan* = tahun terdiri dari 12 *sasih*/bulan. Delapan *masan* disebut *windu*. Berdasarkan pertemuan dari masing-masing siklus itulah ditentukan baik buruknya hari dan diyakini berpengaruh terhadap hasil kegiatan yang dilakukan manusia pada hari itu. Menurut informasi *Kelihan Adat* seorang peneliti dari ITS Surabaya (Johan Silas) pernah meneliti bahwa pada hari yang dinyatakan baik untuk menebang bambu ternyata menunjukkan kadar gula (*glukosa*) bambu berada pada tingkat *terreandah*, sehingga bila dipakai bahan bangunan bisa lebih awet karena kurang disenangi engat/rayap.

TENGET DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Studi kasus: revitalisasi kearifan lokal mengenai lingkungan
di *Desa Adat* Penglipuran, Bangli, Bali

Abstrak

Berbagai protes terhadap kerusakan lingkungan sebagai dampak pembangunan sering terjadi di berbagai belahan dunia. Teori yang melandasi pembangunanpun kemudian banyak diperbincangkan. Bahkan **implementasi** Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana disarankan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*), setelah lebih dari sepuluh tahun dicetuskan, kembali dipertanyakan, mengenai keberpihakannya bagi masyarakat miskin dan lingkungan, serta keberhasilannya dalam menjembatani pembangunan dan perlindungan lingkungan. Pada sisi lain, di berbagai negara, terdapat banyak masyarakat tradisional, dengan kearifan lingkungan yang dimiliki, ternyata menunjukkan kemampuannya untuk menyeimbangkan antara aktivitas manusia dengan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Di Bali, terdapat suatu fenomena lingkungan berlatar budaya yakni, *tenget*. Pada segala sesuatu, areal, benda, kegiatan, kelembagaan, norma dan nilai, dimana *tenget* diyakini ada oleh masyarakatnya, maka lingkungan atau komponen lingkungannya dapat berfungsi dengan lebih lestari. **Permasalahan penelitian** adalah: ketika pembangunan meningkat, *tenget* memudar dan dikhawatirkan terjadi kerusakan lingkungan. Bagaimana sesungguhnya hubungan antara *tenget* dengan pembangunan dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan? Sehingga, **tujuan penelitian** adalah untuk membangun pemahaman (*understanding*) tentang *tenget* dalam hubungannya dengan pembangunan dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan.

Penelitian ini: mengikuti tradisi kualitatif; dalam paradigma konstruktivisme; melalui strategi studi kasus di *Desa Adat* Penglipuran, Bangli, Bali, serta telah dilakukan selama bulan Juli dan Agustus 2002. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *Tenget* adalah 'simbol' dari 'etika lingkungan' yang tumbuh dari sistem religi masyarakat; berkembang dalam sistem nilai budaya setempat dan diekspresikan sebagai sikap mental; dan akhirnya berfungsi sebagai kendali individu dan kontrol sosial dalam memperlakukan lingkungan. Etika lingkungan yang dimaksud adalah kesadaran tentang kesetaraan hubungan antara manusia dengan lingkungan (fisik maupun sosial) dalam: inter-relasi; inter-aksi dan inter-dependensi; yang fungsional holistik. (2) Ketika pembangunan digiatkan di seluruh Pulau Dewata, hingga menjangkau *Desa Adat* Penglipuran, makna *tenget* dalam sistem nilai budaya ternyata mengalami pergeseran. Hal ini terjadi karena konsep pembangunan yang diterapkan bersifat antroposentris. Semestinya penerapan konsep pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan setempat, yakni suatu pembangunan yang berkelanjutan dengan jiwa lokal. (3) Atas alasan tersebut, *tenget* dapat direvitalisasi dengan **men-sinergi-kan aspek-aspek kearifan lingkungan** yang terkandung di dalamnya dengan **prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan**. Dengan demikian *tenget* tidak hanya berhenti sebagai simbol tetapi juga sebagai sistem kontrol (sosial-budaya, religi dan ekonomi). Dengan fungsinya sebagai sistem kontrol, *tenget* akan tetap mampu menjaga **harmonisasi kesetaraan hubungan yang fungsional-holistik** antara manusia dengan lingkungan binaan, lingkungan sosial maupun lingkungan alamnya.

Akhirnya, Penelitian ini merekomendasikan agar *tenget* (atau apapun istilahnya di daerah lain), sebagai simbol dan sebagai sistem kontrol dalam meng-komunikasi-pesan etika lingkungan bagi masyarakat pendukungnya, hendaknya dapat dipahami dan dipertahankan. Dengan demikian *tenget* di *Desa Adat* Penglipuran dapat di adopsi ke dalam perencanaan lingkungan guna mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dalam jiwa lokal.

Kata kunci: *Tenget*, Pembangunan Berkelanjutan, revitalisasi, kearifan lokal.

TENGET IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Case Study: indigenous knowledge of environmental revitalization
at *Desa Adat* Penglipuran, Bangli, Bali

Abstract

There are innumerable claims from all over the world that environment degradation are attributed to development activities. Theories upon which these development activities are based, therefore, are to be debatable. Even the **implementation** of renowned concept suggested by The World Commission on Environment and Development, i.e. The Sustainable Development Concept, after more than 10 years, are now being questioned for its 'taking sides' (for indigenous peoples and environment), and its 'success' (in balancing between human activities and ecological integrities). Meanwhile, in many countries, there are indications that traditional societies, by means of their 'local-genius' or their 'indigenous knowledge', have shown their capacity to maintain human activities in striking balance with the environment.

In Bali, there are environmental phenomena, whose root may be found in Balinese cultural setting, called *tenget*. Whenever, among other things, places, objects, events, institutions, norms, values, or beliefs which are considered by the community as *tenget* are present, the environment as well as its components may be expected to function sustainedly. **The research problems** is: when there is an increase in development activities, *tenget* shows an indication to wither away, which is then followed by environment degradation. Hence, **the main objective** of the present research is to construct an 'understanding' of *tenget* in relation to development activities, within the framework of sustainable development.

The research has been conducted through the 'qualitative' tradition; 'constructivism' paradigm; and on strategy of 'case study' in *Desa Adat* (Customary/ Traditional Village of) Penglipuran, Bangli, Bali. Information which builds up during the research is mainly gathered by way of indepth interview and field observation.

The result of the research shows that (1) *tenget* is a symbol to convey environmental ethical messages which grow within the local system of cultural value and then effloresce as the community mental outlook. In this regard, environmental ethics refers to equal relation between men and their environment (be it physical or social) in a functionally-holistic inter-relation, inter-action and inter-dependency. (2) However, as development activities swept the Island of the Gods, and reached up to the door step of *Desa Adat* Penglipuran, the meaning of *tenget* has experienced **a significant change, due to anthropocentries orientation of development concepts**. So, what the local community requires is development that can ensure their livelihood. In other words, what they could do with is some kind of development concept that really suits their local needs; it is the sustainable development with a local heart. (3) For that reason, *tenget* has to be revitalized by correlating its **environmental ethics** in synergical ways with the **ingredients of the concept of sustainable development**. Only with this effort can *tenget* function more than just a symbol, but also as a system of [socio-cultural, religious, and economic] control. As a system of control, not solely a symbol, *tenget* is expected to **maintain an equal and functionally-holistic inter-relation, inter-action and inter-dependency** between men and their natural, man-made, or social environment.

In the end, **the present research recommends** that *tenget* (or in whatever terms people in other parts of the world refer to it), as a symbol and as a system of control which communicates environmental ethical messages to the whole local community as well as to the outsiders, should be better understood and preserved. Moreover, any environmental management planning for *Desa Adat* Penglipuran, or any other place for that matter, should adopt *tenget* so as to implement sustainable development [with a local heart].

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hidup sejahtera adalah harapan seluruh umat manusia. Untuk mencapai kesejahteraan, manusia harus bekerja. Demikian pula halnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Bangsa dan Negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum ditetapkan sebagai salah satu tujuan, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan harus dilaksanakan. Lalu pembangunanpun mendapat makna yang luas; bukan saja sebagai praktek tetapi juga berkembang sebagai teori; bukan saja menyangkut sekelompok orang tetapi juga melibatkan berbagai lembaga dalam sebuah negara bahkan antar negara. Menurut Bryant (1982: 3) pembangunan adalah:

...proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Emil Salim dalam *World Commission on Environment and Development* atau *WCED* (1988: xvi) menyatakan bahwa, kesejahteraan bersifat dinamis. Oleh karenanya pembangunan sebagai suatu teoripun mengalami perkembangan. Mulai dari: teori **pembangunan berimbang**, teori **pemenuhan kebutuhan dasar**, teori **pemerataan** dan akhirnya teori **kualitas hidup**. Selanjutnya Emil Salim lebih menegaskan bahwa:

Dari penerapan teori-teori pembangunan itu, kemudian disadari bahwa – tidak saja di Indonesia tapi juga di negara-negara lain –

sebelum kesejahteraan sebagai hasil pembangunan dapat dicapai, ternyata pembangunan cenderung berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan.

Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dunia terus meningkat. Masalah kependudukan berdampak langsung terhadap perubahan lingkungan serta melahirkan masalah berikutnya yaitu terbatasnya ketersediaan pangan, sehingga Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan itu menyarankan :

...pembangunan tetap bisa dilanjutkan asalkan dimensi lingkungan dipertimbangkan. Dan pembangunan adalah suatu keharusan, lebih-lebih bagi negara sedang berkembang, maka pembangunan harus berlangsung. Untuk inilah diajukan gagasan Pembangunan Terlanjutkan sebagai jalan lurus menuju Hari Depan Kita Bersama (WCED,1987: xxvii).

Dalam penegasan tersebut terkandung konsep Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*), yang oleh WCED (1988) sebagaimana dikutip oleh Hadi (2001) dartikan sebagai:

... pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Dalam kaitan ini Pembangunan Berkelanjutan dianggap sebagai jalan terbaik menjembatani hubungan antara pembangunan oleh manusia (dengan segala kebutuhan dan kemampuan teknologinya) dengan konservasi alam (dengan segala keterbatasan sumber dayanya). Kemudian prinsip ini diterima oleh pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia sebagai doktrin yang dituangkan ke dalam program-program pembangunan.

Sementara itu, banyak pula pihak yang kurang yakin akan kehandalan konsep Pembangunan Berkelanjutan – terutama sebagaimana dirumuskan di dalam “*Agenda 21*” sebagai *action plan* dari WCED untuk abad 21 – dalam

menanggulangi berbagai permasalahan antara pembangunan dengan pelestarian lingkungan.. Sebagaimana ditulis oleh Hartiningsih (Kompas, 27/05/02, 03/06/02, 05/06/02) Pembangunan Berkelanjutan dengan *Agenda 21*-nya, baik sebagai teori, doktrin atau praktek ternyata belum kokoh, karena belum semua aspeknya disepakati oleh semua negara (terutama negara maju) dan tersaingi oleh derasnya arus kepentingan globalisasi dan pasar bebas. Bahkan Makarim (2000) lebih tegas lagi dalam pernyataannya bahwa:

Sebagai konsep, Pembangunan Berkelanjutan tidak memberikan panduan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Walaupun demikian, tanpa harus terperosok dalam *kenjelimetan* definisi akademis, bisa dikatakan bahwa setelah tiga belas tahun, pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan pada tingkat global ternyata telah gagal.

Sebaliknya pada tingkat lokal, banyak para ahli yang dapat melihat, justru terdapat cara-cara tradisional yang sangat berhasil dalam menjembatani kepentingan pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Seperti Stell (1996: 4) – seorang arsitek dan pemerhati lingkungan – mengatakan,

Dalam doktrin *sustainable development*, yang sangat menekankan tentang pentingnya **pembangunan hunian manusia dan perlindungan lingkungan** juga sangat perlu digaris-bawahi bahwa, **masyarakat tradisional** dengan segala keterbatasannya ternyata telah membuktikan kemampuannya untuk hidup berdampingan dengan alam secara seimbang dan serasi.

Kemampuan masyarakat tradisional dalam mengelola lingkungan tersebut umumnya terhimpun dalam suatu sistem pengetahuan lokal atau kearifan lokal.

Murtopo dan Mitchel (1996: 439) kemudian menguatkan pula bahwa,

Walaupun sistem pengetahuan lokal mungkin tidak akan sesuai untuk menjelaskan kebenaran universal, namun, ia bersumber dari interpretasi masyarakat lokal atas fakta ekologi setempat serta lingkungan yang betul-betul difahaminya, sehingga sangat bersesuaian dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Bangsa Indonesia, dengan kekayaan potensi alam dan keanekaragaman budaya masyarakatnya, ternyata hampir pada setiap suku dan daerah memiliki sistem pengetahuan yang khas dalam mengelola lingkungan. Contoh kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan dalam kelompok masyarakat seperti itu antara lain terdapat pada:

- sistem zonasi lahan menurut kontur bagi Suku Tabla di Irian;
- sistem “*Sasi*” bagi masyarakat nelayan di Maluku;
- tradisi “*Karuhan*” pada Suku Naga di Jawa Barat;
- “*Pikukuh*” pada Suku Baduy;
- tradisi “*Pasang*” pada masyarakat Ammatea di Sulawesi;
- perladangan “*gilir balik*” Suku Dayak Bantian di Kalimantan;
- “*nyabuk gunung*” di Jawa,
- dan masih banyak pada masyarakat tradisional di berbagai tempat lainnya (Hadi, 2000:18 dan Hadi, 2001: 59).

Seharusnya, Bangsa Indonesia dapat men-sinergi-kan antara teori pembaangunan yang telah ada selama ini, dengan kearifan lokal yang telah dimiliki, untuk dituangkan ke dalam program-program pembangunan, sehingga pembangunan dapat terus berlangsung dan fungsi lingkungan tetap terjaga. Akan tetapi patut disayangkan, hal tersebut ternyata belum terwujud. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih terus terjadi. Dalam kaitan ini, Hadi pada “Manusia dan Lingkungan” (2000:35-49), di samping banyak mengungkap tentang kerusakan lingkungan (akibat industri, pertambangan, sistem pertanian, permukiman), juga sangat menyayangkan bahwa, berbagai

kearifan lokal, yang semestinya dapat direvitalisasi guna pelestarian lingkungan ternyata telah mulai memudar karena bersifat lokal dan tidak diaktualisasikan dalam kehidupan sekarang

Masyarakat Bali, juga memiliki berbagai cara atau pengetahuan yang khas dalam memperlakukan lingkungan, baik 'alam asli' (hutan, gunung, sungai) maupun 'alam binaan' (areal permukiman / *desa*, areal pertanian / *Subak*). Misalnya:

- *Hutan Sangeh* dengan ratusan keranya –walaupun berada di tengah permukiman penduduk– ternyata masih tetap lestari;
- *Goa Lawah* dengan ribuan kelelawarnya, dapat bertahan selama ratusan tahun;
- Sistem pertanian / irigasi “*Subak*” yang masih mampu terus bertahan;
- dan “*Desa Adat*” sebagai sebuah institusi pemerintahan tradisional dengan “*awig-awignya*” tetap eksis walaupun telah dijamah oleh industri pariwisata dengan pengaruh Budaya-Baratnya.

Bagi masyarakat Bali, *Hutan Sangeh*, *Goa Lawah*, *Desa Adat*, atau komponen lingkungan lainnya, tidak hanya dipandang sebagai wujud fisik semata, tapi juga sesuatu yang *tenget*, atau sesuatu yang disakralkan, disucikan, dikramatkan (*wingit* dalam Bahasa Jawa). *Tenget* bagi masyarakat Bali megisyaratkan: larangan, pamali atau tabu; oleh karenanya, harus dijaga, dipelihara, dihormati dan dipertahankan oleh masyarakat.

Walaupun *tenget* tidak secara langsung berhubungan dengan pelestarian lingkungan, tetapi dengan sangat mudah dapat diamati di Bali bahwa, segala yang berpredikat *tenget* umumnya dapat berfungsi secara lebih lestari. Bahkan dengan berpredikat *tenget* kemudian menjadi **unik** dan mampu menarik minat

wisatawan, sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Ini berarti bahwa, melalui *tenget*, kualitas lingkungan dapat tetap terpelihara dan kualitas hidup masyarakatnya dapat ditingkatkan.

Hanya saja, pembangunan selama tiga dasa-warsa terakhir, khususnya perkembangan industri pariwisata di Bali, membawa serta berbagai perubahan, termasuk perubahan dalam sistem nilai masyarakat Bali. Sebagaimana Kaler Surata (dalam Supartha ed.-1999) menyatakan bahwa:

Perkembangan ini akan menghantar Bali kepada masa depannya yang rapuh..... Keunikan Bali semakin tererosi, dan ketika keunikan itu tiada lagi, akan berarti kematian bagi kepariwisataan, budaya dan lingkungan..

Desa Adat Penglipuran, di Kabupaten Bangli, dapat diketengahkan sebagai salah satu contoh. Lingkungan desanya yang lestari; tatanan kehidupan masyarakatnya yang rukun; perumahannya yang teratur asri; terutama perekonomiannya yang mantap dan hampir merata; telah banyak mengundang kekaguman. Bagi masyarakat Penglipuran, komponen alam harus dikelola sekaligus dipelihara bersama. *Desa Adat* (baik sebagai lingkungan fisik maupun sebagai sebuah pranata sosial) harus dijaga dan dihormati; *awig-awig* (hukum adat) harus ditaati. Bagi mereka semua itu adalah sesuatu yang di-*tenget*-kan.

Dengan pemikiran di atas dan dalam rangka meletakkan pembangunan berdimensi lingkungan, muncul berbagai pertanyaan yang memerlukan jawaban, seperti: bagaimana *tenget* itu semula terwujud dalam masyarakat?; mengapa makna *tenget* dapat melemah dengan adanya pembangunan?; dan bagaimana *tenget* dapat di-revitalisasi guna dijadikan wahana pengelolaan lingkungan dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan?

Untuk itu, kiranya cukup beralasan untuk mengusulkan penelitian dengan judul: *TENGET* DALAM PEMBANGUNAN BERKE-LANJUTAN; Studi kasus: revitalisasi kearifan lokal mengenai lingkungan di Desa Penglipuran, Bangli, Bali.

1.2. Permasalahan

Tenget muncul dari cara orang Bali memahami kedudukan dirinya di tengah lingkungannya. *Tenget* mengisyaratkan tentang “boleh” atau “tidak boleh” dalam mengelola lingkungan. Bersamaan dengan itu ternyata pula ‘*tenget*’ berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya.

Di sisi lain, *tenget* sebagai salah satu wujud kearifan lokal masyarakat Bali di tengah giatnya pembangunan menunjukkan adanya pergeseran makna. Desakralisasi benda-benda keramat; alih fungsi areal / lingkungan kramat menjadi fasilitas wisata; reklamasi pantai yang semula dipakai sebagai tempat pelaksanaan ritual keagamaan; perombakan hutan dan bukit untuk fasilitas wisata; dan peristiwa-peristiwa lainnya menunjukkan melemahnya pemahaman tentang *tenget*.

Permasalahan utama dari kenyataan dan ketimpangan di atas adalah:

Ketika kegiatan pembangunan meningkat, makna *tenget* melemah dan kerusakan lingkungan dikhawatirkan mulai terjadi.

Berkaitan dengan itu, bagaimanakah hubungan antara *tenget* – sebagai salah satu wujud kearifan lokal mengenai lingkungan – dengan pembangunan dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan?. Permasalahan utama ini akan tampak lebih jelas bila diurai dalam pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

- Bagaimana dan dengan cara apa *tenget* tumbuh dan berkembang dalam pemahaman masyarakat Bali?
- Mengapa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi melemahnya makna *tenget* dalam kaitannya dengan pembangunan?
- Bagaimana *tenget* dapat direvitalisasi dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan?

1.3. Tujuan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap *tenget* sebagai sebuah fenomena lingkungan yang hidup dalam budaya masyarakat Bali, dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan. Adapun tujuan utama penelitian adalah:

Membangun pemahaman (*understanding*) tentang hubungan atau kaitan antara *tenget* – sebagai salah satu wujud kearifan lokal mengenai lingkungan – dengan pembangunan dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan

Untuk sampai pada tujuan utama tersebut terlebih dahulu perlu dicapai tujuan pendukung sebagai berikut:

- Mengkaji bagaimana dan dengan cara apa *tenget* tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Bali.
- Mempelajari mengapa dan bagaimana *tenget* mengalami pergeseran makna seiring dengan meningkatnya pembangunan.
- Menelaah bagaimana *tenget* dapat direvitalisasi dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan .

1.4. Proposisi.

Patut diduga bahwa ada hubungan antara *tenget* dengan kelestarian lingkungan dan secara tidak langsung juga dengan kesejahteraan masyarakat pendukungnya. Nampak pula bahwa pembangunan yang semula dimaksudkan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata memberi pengaruh hingga melemahnya makna *tenget* sebagai sebuah bentuk kearifan lokal. Dugaan-dugaan tersebut diharapkan dapat meletakkan penelitian ini pada arah yang menuju tercapainya tujuan penelitian.

Walaupun *tenget* tidak secara khas berhubungan dengan sanksi atau hukuman fisik terhadap pelanggarnya, namun *tenget* mengisyaratkan: rasa sakral, rasa kesucian, penghormatan, tabu, angker, bahkan larangan. Lain daripada itu *tenget* juga lebih mengacu pada “rasa” seperti: rasa malu, rasa sungkan, perasaan berdosa atau rasa yang berhubungan dengan pertimbangan baik dan buruk (moralitas). Dengan adanya *tenget*, lingkungan menjadi lestari (walaupun *tenget* semula tidak semata-mata bertujuan untuk melestarikan lingkungan). Kelestarian lingkungan kemudian mampu menopang bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sementara itu proses pembangunan atau modernisasi dengan segala eksisnya terlihat pula dampaknya pada kerusakan lingkungan. Sehingga proposisi (jawaban sementara terhadap permasalahan), yang akan memberi arah terhadap penelitian ini selanjutnya adalah: **terdapat hubungan antara *tenget* dengan pembangunan. Dari hubungan tersebut terdapat makna yang bisa direvitalisasi untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.** Hubungan tersebut akan terbangun dari pemahaman melalui tahapan sebagai berikut:

- *Tenget* dimaknai sebagai simbol; yang tumbuh dari sistem religi masyarakat; lalu berkembang dalam sistem nilai budaya dan diekspresikan sebagai sikap mental; berfungsi sebagai kendali individu serta kontrol sosial bagi masyarakat dalam meletakkan hubungan dirinya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anggota masyarakat dan sebagai salah satu komponen alam.

- Perubahan makna *tenget* dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan yang bersifat antroposentris, yang membawa serta nilai-nilai baru sehingga faktor-faktor sistem **seleksi** (dominasi nilai baru sehingga punahnya nilai lama dalam masyarakat) dan sistem **adaptasi** (diterima dan disesuaikan nilai baru ke dalam nilai yang ada dalam masyarakat) berproses tidak seimbang. Hal ini akan terlihat dalam perubahan sikap mental masyarakat dalam mengaktualisasi dirinya di antara tuntutan pemenuhan kebutuhan (material) melalui pembangunan dan tuntutan kesadaran moral (non-material) sebagai ciptaan Tuhan yang hidup bermasyarakat ditengah lingkungan / alam.
- *Tenget* dapat direvitalisasi dengan memaknainya sebagai **sistem simbol** dan sekaligus sebagai **sistem kontrol** dalam mengkomunikasikan **etika lingkungan** yakni kesadaran tentang kesetaraan hubungan manusia dengan lingkungan dalam **inter-relasi, inter-aksi dan inter-dependensi**. yang fungsional holistik. Penerapannya dalam perencanaan lingkungan dapat dilakukan dengan cara di-sinergi-kan dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan..

1.5. Kontribusi Penelitian.

Bila ternyata penelitian ini memberi hasil seperti diharapkan, maka kontribusi yang dapat diberikan adalah:

- Secara umum: akan terbangun suatu pemahaman tentang hubungan *tenget* sebagai salah satu wujud kearifan lokal dengan pengelolaan lingkungan dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan.
- Secara teoritis: merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya yakni: memperkaya, mempertajam dan memperkokoh pijakan tentang *sustainable development* dengan suatu teori Pembangunan Berkelanjutan dalam format lokal. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi bahwa sistem pengetahuan / karifan lokal (*local genius / indigenous knowledge*) perlu mendapat kedudukan yang lebih kokoh dalam ilmu pengetahuan (*scientific knowledge*).
- Secara pragmatis: akan didapatkan suatu pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan yang berakar pada masyarakat lokal yang dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan pembangunan melalui perencanaan pembangunan yang berdimensi lingkungan di Indonesia pada masa yang akan datang.

1.6. Sistematika dan Kerangka Penulisan.

Penulisan penelitian ini akan dilakukan tahap demi tahap sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan: menyajikan latar belakang tentang gagasan dan urgensi penelitian, permasalahan, tujuan penelitian dan proposisi sebagai pemberi arah pada penelitian selanjutnya.
- Bab II. Kerangka Analisa : mengetengahkan berbagai isue, konsep dan teori dan pemahaman tentang *tenget*, pembangunan dan pembangunan berkelanjutan.
- Bab III. Proses Penelitian : akan diketengahkan tentang: tradisi dan paradigma yang dianut dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan mengetengahkan strategi, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
- Bab IV-V. Studi Kasus dan Pembahasan : berupa kompilasi data dari kasus yang diteliti dilanjutkan dengan penganalisaan.
- Bab VI. Kesimpulan : berupa rumusan hasil penelitian dan rekomendasi

BAB II

KERANGKA ANALISA

Gagasan penelitian ini bermula dari dua isue utama yaitu:

- Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai isue global;
- dan keberhasilan masyarakat lokal di berbagai daerah melalui sistem pengetahuan (*local genius / indigenous knowledge*) yang dimiliki dalam mengelola lingkungan.

Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan sebagai jawaban dari permasalahan yang ditimbulkan oleh pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi, berupa berbagai kerusakan kualitas lingkungan (Brown, 1999). Sementara itu, Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan sebagian besar hidup di pedesaan dengan cara-cara tradisional, sering dianggap sebagai hambatan dalam proses pembangunan yang berlandaskan pengetahuan ilmiah (Dove, 1985 dan Mitchell, 1995). Dari keinginan untuk membangun pemahaman terhadap hubungan kedua isue diataslah penelitian ini diketengahkan dengan mengangkat fenomena dalam salah satu kelompok masyarakat Indonesia yaitu masyarakat Bali yang tentu saja berlatar lingkungan dan budaya Bali.

Dengan demikian kerangka analisa dalam penelitian ini harus dibangun melalui penelusuran / jelajah yang sekurang-kurangnya meliputi telaah terhadap:

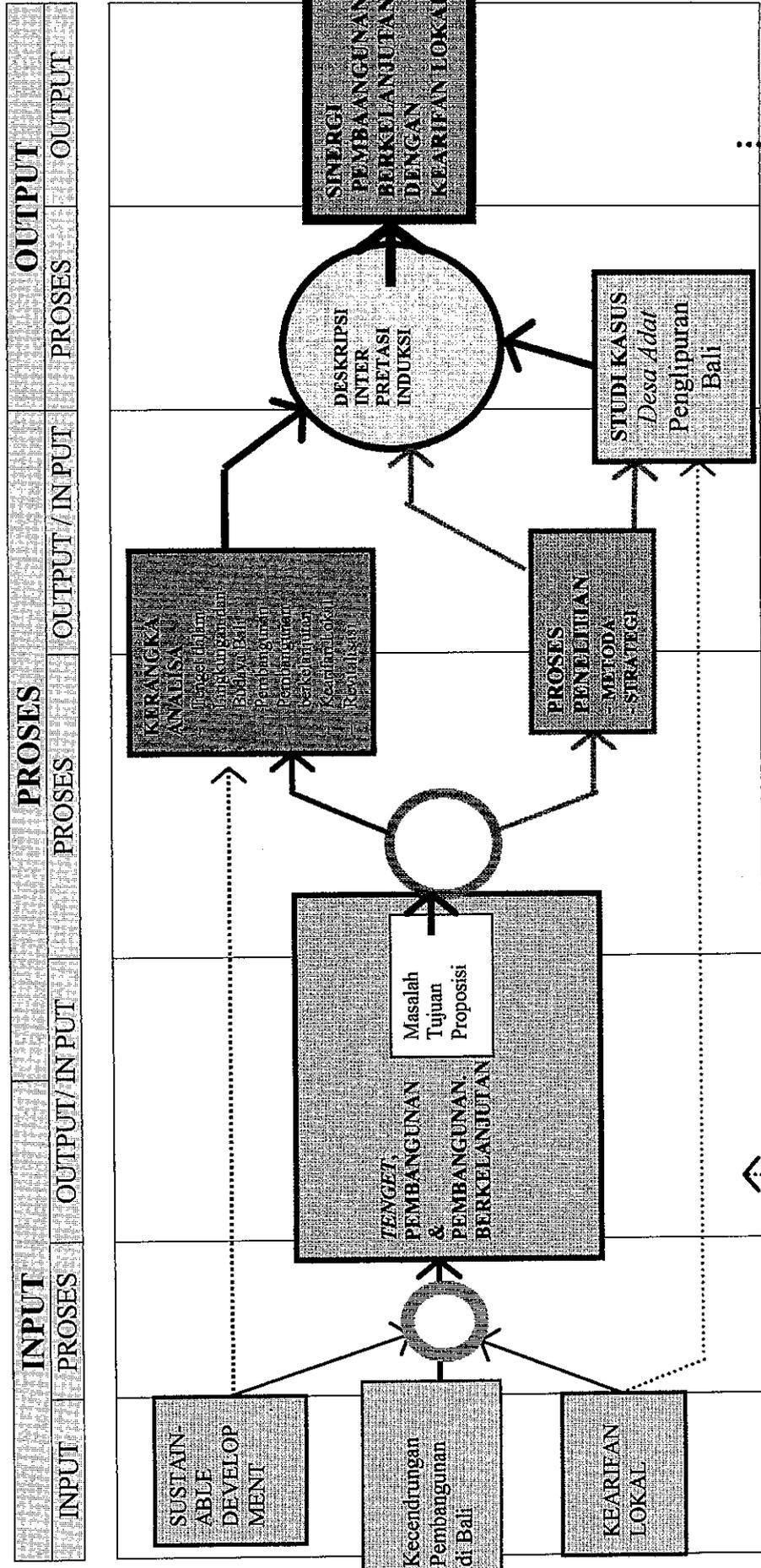
- *tenget* sebagai fenomena lingkungan dalam masyarakat dan budaya Bali;
- pembangunan sebagai teori, aplikasi teori dan dampak yang ditimbulkan;

- dan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*) baik sebagai isue, konsep ataupun doktrin .

Dari telaah terhadap ketiga topik diatas diharapkan akan dapat dibangun sebuah kerangka analisa konseptual yang nantinya dapat digunakan sebagai alat (*tool*) dalam membahas hasil penelitian selanjutnya (*lihat ilustrasi II. 1. Kerangka Penelitian*).

2.1. Tenget dalam masyarakat dan budaya Bali

Berbicara tentang kebudayaan sesungguhnya mencakup pandangan yang majemuk dan multi dimensi. Dalam kaitan ini Naya Sujana dalam Supartha,ed. (1999) merangkum beberapa pandangan tentang kebudayaan. Ada yang memandang kebudayaan sebagai aktivitas atau sebagai kata kerja sehingga kebudayaan memiliki hakikat yang aktif, dinamik, berkembang dan selalu berubah menuju suatu tujuan bersama. Ada yang memandang kebudayaan sebagai suatu proses yaitu kebudayaan selalu berkembang dari satu tahap ketahap yang lain . Terdapat pula pandangan bahwa kebudayaan adalah sistem organis terbuka yang padanya terdapat perubahan internal dan eksternal. Sejalan dengan pendapat di atas, Peursen (1988:10) mengetengahkan dua pergeseran dalam pemahaman hakekat kebudayaan. Pertama: semula kebudayaan diartikan sebagai segala manifestasi kehidupan manusia yang berbudi luhur dan bersifat rohani, kemudian beralih menjadi pengertian bahwa kebudayaan adalah seluruh manifestasi kehidupan setiap manusia baik kelompok maupun individu. Kedua: kini kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang dinamis meliputi setiap kegiatan manusia dalam mengolah lingkungan alamiahnya.



Ilustrasi II.1. Kerangka Penelitian

Kebudayaan bukan sekedar takdir tapi sebuah strategi sehingga terhadap kebudayaan dapat dilakukan rekayasa untuk menentukan masa depan manusia. Dalam strategi kebudayaan inilah selanjutnya Peursen meletakkan kebudayaan dalam tiga kerangka / bagan untuk memahaminya dan tentang apa yang dapat dilakukan untuk menentukan arah dan posisi masa depan manusia. Pertama adalah tahap *mitis* dimana manusia tunduk kepada kekuatan-kekuatan alam dan kekuatan gaib. Kedua tahap *ontologis* yakni tahap dimana manusia meletakkan dirinya berseberangan dengan alam. Alam dipandang sebagai obyek yang harus diketahui untuk kemudian dieksplorasi. Ketiga adalah tahap *fungsiil* dimana manusia kembali ingin melakukan relasi-relasi kebertautannya dengan segala sesuatu dalam lingkungannya.

Berkenaan dengan pengelolaan lingkungan, pemikiran di atas bersesuaian dengan tahapan evolusi hubungan manusia dengan alam (Hadi, 2000: 16). Pada evolusi pertama disebut *pancosmism* dimana manusia merasa sebagai bagian dari alam. Alam adalah sakral sehingga harus dijaga agar tidak menimbulkan bencana. Evolusi kedua adalah *antroposentris (anthropocentries)* yaitu manusia menguasai alam yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Evolusi ke tiga yakni suatu tahapan yang dicita-citakan yaitu tahap *holism* yakni manusia bersama alam dalam suatu hubungan yang menyeluruh dan dialektis (Hadi, 2000: 51).

Untuk kepentingan analisis, *tenget* dalam kebudayaan Bali, perlu diurai kedalam unsur-unsur yang membentuk kebudayaan, dan untuk memperoleh gambaran yang utuh dari kebudayaan perlu pula diketengahkan pandangan

Koentjaraningrat (2000 2-5). tentang unsur dan wujud kebudayaan sebagai berikut:

.... unsur universal dan sekaligus sebagai isi yang membentuk kebudayaan yaitu: sistem religi dan upacara keagamaan; sistem dan organisasi kemasyarakatan; sistem pengetahuan; bahasa; kesenian; sistem mata pencaharian; sistem teknologi dan peralatan. Sedangkan tiga wujud kebudayaan yaitu: 1. kompleks ide-ide; 2. kompleks aktivitas / kelakuan berpola dan 3. wujud benda.

Kebudayaan Bali dapat pula kita lihat melalui kerangka pemahaman kebudayaan seperti di atas. Kebudayaan Bali adalah suatu proses dinamis, suatu akumulasi manifestasi kehidupan manusia sejak jaman Bali Purba sampai pada eksistensi Bali dewasa ini. Sepintas kebudayaan Bali terlihat homogen karena didukung oleh kelompok masyarakat yang serba sama, yakni: mayoritas masyarakat etnik Bali; sebagian besar berpencaharian sebagai petani; dan beragama Hindu. Namun sesungguhnya – dalam skala lokal – kebudayaan Bali sangat kompleks dan heterogen. Bali Utara berbeda dengan Bali selatan demikian pula antara Bali Timur dengan Bali Barat bahkan antara desa satu dengan desa lainnya. Akan tetapi masyarakat Bali mempunyai penyelesaian yang arif atas perbedaan-perbedaan tersebut melalui pendekatan *desa-kala-patra* yaitu: penyesuaian terhadap tempat, waktu dan keadaan; serta konsep *desa mawacara* dan *negara mawatata*, bahwa desa dapat menentukan tatacara sendiri menurut tempat, waktu dan keadaan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi (negara).

Kebudayaan Bali tidak bisa diungkap secara terpisah dari sistem religi sebagai salah satu unsur kebudayaan. Dalam kebudayaan Bali terdapat sistem kepercayaan tentang kebenaran dan harmoni yang bersumber dari ajaran Weda yang diyakini masyarakat Bali sebagai takaran tentang kebenaran. Konsep-konsep

kebenaran dalam sistem kepercayaan (sebagai unsur pertama dari kebudayaan), kemudian menjiwai setiap unsur kebudayaan yang lain (organisasi kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian serta teknologi dan peralatan). Konsep kebenaran itu mengajarkan betapa sangat perlunya keseimbangan dan harmoni dari masing-masing unsur tersebut di atas dijaga dan dipelihara. Dari upaya menjaga harmonisasi inilah yang melahirkan berbagai fenomena yang unik dalam budaya Bali. Kaler Surata (dalam Wayan Supartha ed., 1999) mengatakan:

Keunikan merupakan puncak-puncak dari keseimbangan. Bagi masyarakat Bali keseimbangan adalah suatu *rta* (hukum alam) yang terdiri dari *Utpetti*, *Shtiti*, *Pralina* (penciptaan, pemeliharaan dan peleburan/pemusnahan). Ketiganya menyatu dalam *Omkara* (kebenaran abadi). Dari sini, Pulau Bali mendapat julukan *Nusaning Nusa*. Suatu pulau yang masyarakatnya bersedia melakukan apasaja untuk menegakkan hakekat dari keberadaannya sebagai satu-satunya sumber kebenaran abadi.

Kebenaran itupun kemudian dimanifestasikan dalam berbagai tatanan perilaku tentang yang “boleh” dilakukan atau “tidak boleh” dilanggar. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan/dilanggar, atau dapat dilakukan dengan tata cara tertentu diistilahkan sebagai sesuatu yang *tenget*. Dengan demikian *tenget* adalah salah satu cara manusia dan masyarakat Bali untuk berkomunikasi; langsung ataupun tidak langsung; pada waktu kehidupan sekarang maupun terhadap generasi berikutnya; antara individu atau kelompok; tentang kebenaran (baik buruk atau boleh dan tidak boleh). *Tenget* tumbuh dan berkembang dalam sistem nilai budaya sebagai simbol untuk menyampaikan etika tentang keharmonisan interrelasi manusia dengan penciptanya, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan.

Simbol dalam pengertian ini adalah sebagai mana dinyatakan oleh Triguna (2000: 7) yaitu: Simbol adalah suatu hal atau keadaan yang merupakan pengantaraan pemahaman terhadap obyek. Simbol (*symbol*) harus difahami berbeda dengan tanda (*sign*). Seperti Cassirer (dalam Triguna, 2000: 8-9) menyatakan:

Tanda adalah bagian dunia fisik yang berfungsi sebagai *operator* yang memiliki substansial. Sementara simbol adalah bagian dari dunia makna manusia yang berfungsi sebagai *designator*. Simbol tidak memiliki kenyataan fisik atau substansial.

Tenget sebagai simbol yang berfungsi sebagai *designator* kemudian membentuk sikap mental. Sikap mental (*attitude*) menurut Kuntjaraningrat (2000: 26) adalah:

.....suatu disposisi atau keadaan mental didalam diri dan jiwa seseorang individu untuk berreaksi terhadap lingkungannya (baik lingkungan manusia atau masyarakatnya maupun lingkungan alamiahnya atau lingkungan fisik)

Sikap mental yang bersumber dari etika tentang harmoni hubungan manusia dengan lingkungan tersebut akhirnya berfungsi sebagai **kendali perilaku individu dan kontrol sosial** dalam kehidupan bermasyarakat.. *Tenget* sebagai simbol muncul dan dapat dirasakan bila terjadi interaksi dinamis dari ke tiga wujud budaya yaitu:

- **etika tentang harmoni** hubungan Tuhan – manusia – alam sebagai kompleks idea / gagasan;
- **perilaku simbolis** sebagai kompleks kegiatan berpola;
- dan **tanda-tanda** dalam komponen lingkungan sebagai wujud benda.

Tenget dalam pemahaman seperti di atas, lalu berakumulasi dalam kesadaran bersama masyarakat pendukungnya, yang aplikasinya dapat terlihat

dalam menyikapi lingkungan sebagai sesuatu yang tidak hanya bersifat fisik tapi sekaligus non-fisik, yang tidak terbatas pada hubungan horisontal imanensi manusia tapi juga hubungan vertikal transendental manusia dengan 'dunia lain'.

2.2. Pembangunan.

2.2.1. Umum

Pembangunan merupakan kebutuhan mendesak, bukan saja dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk yang terus bertambah; atau tuntutan kesejahteraan masyarakat yang bergerak dinamis; tetapi pembangunan juga dibutuhkan untuk pembentukan manusia dan masyarakat yang lebih baik pada masa mendatang. Perkembangan teori dan praktek pembangunan di berbagai negara, belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, bahkan sebaliknya terbukti menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan. Dari kenyataan ini muncul keraguan dan pertanyaan tentang ke-efektif-an pembangunan bagi manusia dan lingkungannya.

Terdapat berbagai pandangan tentang pembangunan. Untuk Indonesia, kiranya gambaran harfiah dari Conyers (1984: 22) cukup mendekati, yaitu:

Pembangunan adalah perubahan secara bertahap, yang meningkat dalam babak-babak berupa upaya perluasan, peningkatan atau melengkapi, oleh negara / pemerintah.

Pengertian ini menekankan adanya subyek yang berperan selaku pembuat dan penerap suatu konsep (yaitu pemerintah) kepada pihak lain (yaitu masyarakat). Conyers dalam pendapatnya ini juga memberi catatan bahwa kata membangun (*to develop*) dapat bersifat transitif dan intransitif. Maksudnya adalah bahwa, bila kata pembangunan kita rangkai dengan kata masyarakat misalnya,

dapat menimbulkan pengertian bahwa masyarakat itu membangun dirinya sendiri atau terhadap masyarakat tersebut dilakukan pembangunan oleh pihak luar dalam hal ini oleh pemerintah. Pembangunan yang dilakukan oleh pihak satu kepada pihak lain atau adanya subyek dan obyek pembangunan yang terpisah, sering dikenal sebagai pendekatan pembangunan yang bersifat *top down* atau *sinoptik* (Hadi, 2001: 22). Pendekatan pembangunan semacam ini ternyata memiliki banyak kelemahan. Aspirasi, kebutuhan hakiki, nilai-nilai budaya lokal serta partisipasi dari obyek (masyarakat) sering terabaikan. Inilah yang terjadi di Indonesia selama periode pembangunan sejak akhir tahun 1960-an sampai dengan akhir tahun 1990-an (Soemarwoto, 2001: 95 -105).

Pendekatan pembangunanpun lalu bergeser kearah upaya mengadopsi aspirasi dan partisipasi dari bawah atau sering disebut bersifat *bottom up*, yakni pembangunan yang bertumpu pada potensi masyarakat. Dalam kaitan dengan pengelolaan lingkungan pendekatan ini oleh Soemarwoto (2001: 107) disebut sebagai pendekatan "atur diri sendiri"(ADS). Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bryant (1987: 3) yang menyitir pendapat Gandhi yaitu bahwa pembangunan adalah konsep normatif yang menyiratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai"realisasi potensi manusia".

Membangun pemahaman tentang *tenget* dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari operasionalisasi dari pandangan di atas.

2.2.2. *Tenget* dan Pembangunan di Bali.

Guna memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan hidup akibat pertambahan jumlah penduduk, berbagai kegiatan pembangunan telah dilakukan di Bali. Hanya saja pembangunan yang dilakukan selama ini bersifat sektoral dan terpusat.

Perencanaan pembangunan dilakukan secara sentralistik, *top-down* serta berdasarkan pendekatan-pendekatan pengetahuan ilmiah rasional yang mengesampingkan kesempatan masyarakat lokal untuk ikut menentukan kebijakan pembangunan.

Pembangunan tersebut banyak yang mengakibatkan perubahan struktur baik fisik maupun sosial ekonomi budaya. Tidak sedikit areal / komponen lingkungan dengan predikat *tenget* beralih fungsi menjadi fasilitas wisata atau penyediaan sarana prasarana lainnya. Pembangunan juga membawa serta nilai-nilai baru kedalam kehidupan masyarakat sehingga banyak pranata sosial, obyek, atau komponen lingkungan yang semula berpredikat *tenget* akhirnya melemah bahkan hilang.

Sementara di sisi lain, banyak pula bukti bahwa komponen lingkungan atau lingkungan baik alami maupun buatan yang predikat *tenget*-nya dapat dipertahankan, ternyata lebih lestari bahkan lebih berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pendukungnya, melalui kegiatan pariwisata. Seyogyanya, pemahaman makna *tenget*. sebagai salah satu wujud kearifan lokal mengenai lingkungan dapat direvitalisasi dengan mensinergikannya dengan kaidah pengetahuan ilmiah dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

2.3. Pembangunan Berkelanjutan

Sejalan dengan perkembangan pembangunan di berbagai negara, hampir semua teori pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dampaknya tidak saja kerusakan lingkungan yang terjadi di mana-mana, kemiskinan yang semakin meluas tetapi juga ketimpangan yang semakin meningkat (Bryant, 1987: 29 dan Hadi, 2001). Oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan

kemudian dicetuskan bahwa untuk mempertahankan eksistensinya di tengah alam, manusia harus membangun. Manusia sesungguhnya mampu menjadikan pembangunan itu berkesinambungan (*sustainable*) (WCED, 1988: 12). Menurut komisi dunia ini:

Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Hadi (2001: 43) Pembangunan Berkelanjutan ditegaskan sebagai paradigma (mungkin yang dimaksud adalah cara/pendekatan) baru yang masih terus dicari bagaimana operasionalisasinya. Bahkan menurut Makarim (Kompas, 04 Juni 2000) dan Hartiningsih (Kompas, 27 Mei 2002 dan 03 Juni 2002) secara substantif Pembangunan Berkelanjutan masih perlu dipertanyakan keberpihakannya terhadap masyarakat miskin di negar-negara berkembang. Walaupun dalam *Chapter 26* dari *Agenda 21* sebagai 'action plan' dari WCED menjelang abad 21, telah ditegaskan tentang peran dan keberhasilan 'indigenous peoples' dalam mengelola lingkungan, ternyata penegasan ini masih belum mampu memposisikan Pembangunan Berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat lokal dan lingkungannya.

Untuk keperluan praktis dan studi setidaknya sekarang ini, menurut Jacobs et. al. dalam Hadi, (2001: 44) telah dapat dirumuskan empat komponen Pembangunan Berkelanjutan dengan delapan prinsipnya yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar (*fulfillment of human needs*) yang terdiri dari prinsip: pemenuhan kebutuhan materi berupa sandang, pangan dan papan;

serta prinsip pemenuhan kebutuhan non materi seperti rasa aman, hak asasi manusia, memiliki kebebasan berkumpul dan mengekspresikan pendapat.

2. Pemeliharaan integrasi ekologi (*maintenance of ecological integrity*) menyangkut prinsip prinsip: konservasi atau perlindungan lingkungan baik sebagai sumber daya atau ruang karena keterbatasannya; dan mengurangi konsumsi baik dalam arti pemerataan pemanfaatan maupun perubahan pola konsumsi sumber daya dalam rangka mengurangi beban lingkungan.
3. Keadilan sosial (*social equity*) yang meliputi: prinsip keadilan masa sekarang yaitu pemerataan pembangunan untuk menghindarkan ketimpangan; dan prinsip keadilan masa depan berkenaan dengan solidaritas antar generasi yang ditunjukkan dengan pengakuan keterbatasan sumber daya yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.
4. Kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*) yang dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat mandiri (*self reliant community*) yakni masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas nasib dan masa depannya; serta prinsip partisipatori demokratis yaitu adanya keterbukaan dan transparansi.

2.4. Kerangka Analisis Konseptual

2.4.1. Kearifan Lokal

1. Pengertian

Terdapat banyak istilah yang sering dipergunakan dan bersesuaian artinya dengan kearifan lokal antara lain: *local genius* dan *indigenous knowledge*. Secara etimologi dalam Oxford Compendium: *local* berarti setempat dan *genius* berarti kecerdasan fikiran; sedangkan *idigenous* (Latin ~ *indigena* f. *indi+gen*) dari kata *indi* berarti pemilik asli/setempat + *gen* berarti lahir, kemudian dapat pula sebagai bentuk jamak dari *indigent* (*L indigenre* f. *indi-* + *egenre* = *need*) sehingga berarti fakir miskin atau mereka yang tersisih, dan *knowledge* berarti pengetahuan. *Local genius* atau *indigenous knowledge* dapat berupa ide / gagasan / pengetahuan atau aktivitas / kelakuan berpola yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Seperti Wales dalam Poespowardojo (1989), *local genius* dijelaskan sebagai:

The sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their experiences in early life (Sejumlah karakteristik budaya yang telah menjadi kebiasaan orang secara meluas sebagai hasil pengalaman hidup mereka pada masa-masa yang lalu).

Sedangkan van Veldhuizen et al (1997) dalam Ina Hoi Riwa Foundation (selanjutnya disingkat IHRF, 2002) kearifan lokal diistilahkan dengan *indigenous knowledge* dengan penjelasan:

..... menunjuk kepada: suatu ide / gagasan, pengalaman, praktik, dan informasi yang tidak hanya lahir / dibangun oleh sekelompok masyarakat lokal di suatu tempat, tetapi juga telah ditransformasi dan diejawantahkan sebagai pandangan hidupnya.

Lebih jauh dalam IHRF (2002) kearifan lokal dirumuskan sebagai:

.... bentuk pengetahuan atau kepercayaan yang disampaikan secara oral (dari mulut ke mulut); diperoleh dari hasil pengalaman melalui proses coba dan gagal (*trial and error*) dari generasi ke generasi; serta meliputi berbagai bidang seperti: pertanian, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kerajinan, keuangan, pengobatan, pengembangan masyarakat, penyelesaian konflik dan sektor lainnya.

Dalam tulisan ini, pengertian tentang kearifan lokal akan mengacu pada rumusan di atas dengan titik berat pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

2. *Tenget* sebagai salah satu wujud kearifan lokal di Bali

Tenget di Bali, memiliki kesesuaian ciri-ciri sebagaimana uraian di atas. *Tenget* dalam budaya Bali, tidak saja sebagai sistem nilai budaya, tetapi juga bentuk pengetahuan yang disampaikan secara oral, berdasarkan pengalaman dari generasi ke generasi dan menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan dan dunia transendental yang melingkupinya.

Tenget yang lahir dari sistem kepercayaan dalam budaya Bali mengajarkan kepada masyarakat pendukungnya antara lain bahwa di dalam setiap komponen lingkungan tidak hanya terdapat wujud fisik tapi juga menyangkut unsur-unsur non fisik. Sehingga terhadap komponen lingkungan dengan predikat *tenget* ini, berlaku larangan atau tabu dengan alasan tertentu, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa komponen lingkungan atau lingkungan tertentu tidak boleh diganggu atau boleh dikelola hanya dengan mengikuti suatu aturan-aturan tertentu. Dilihat dari strategi kebudayaan sesuai pemikiran van Peursen (1988), ataupun Hadi (2000), larangan atau tabu tersebut dapat berlatar *mitis - pancosmis* (alam mengandung kekuatan gaib sehingga manusia takut); *ontologis - antroposentris* (alam adalah obyek di luar diri manusia untuk dipelajari dan dieksploitasi); atau

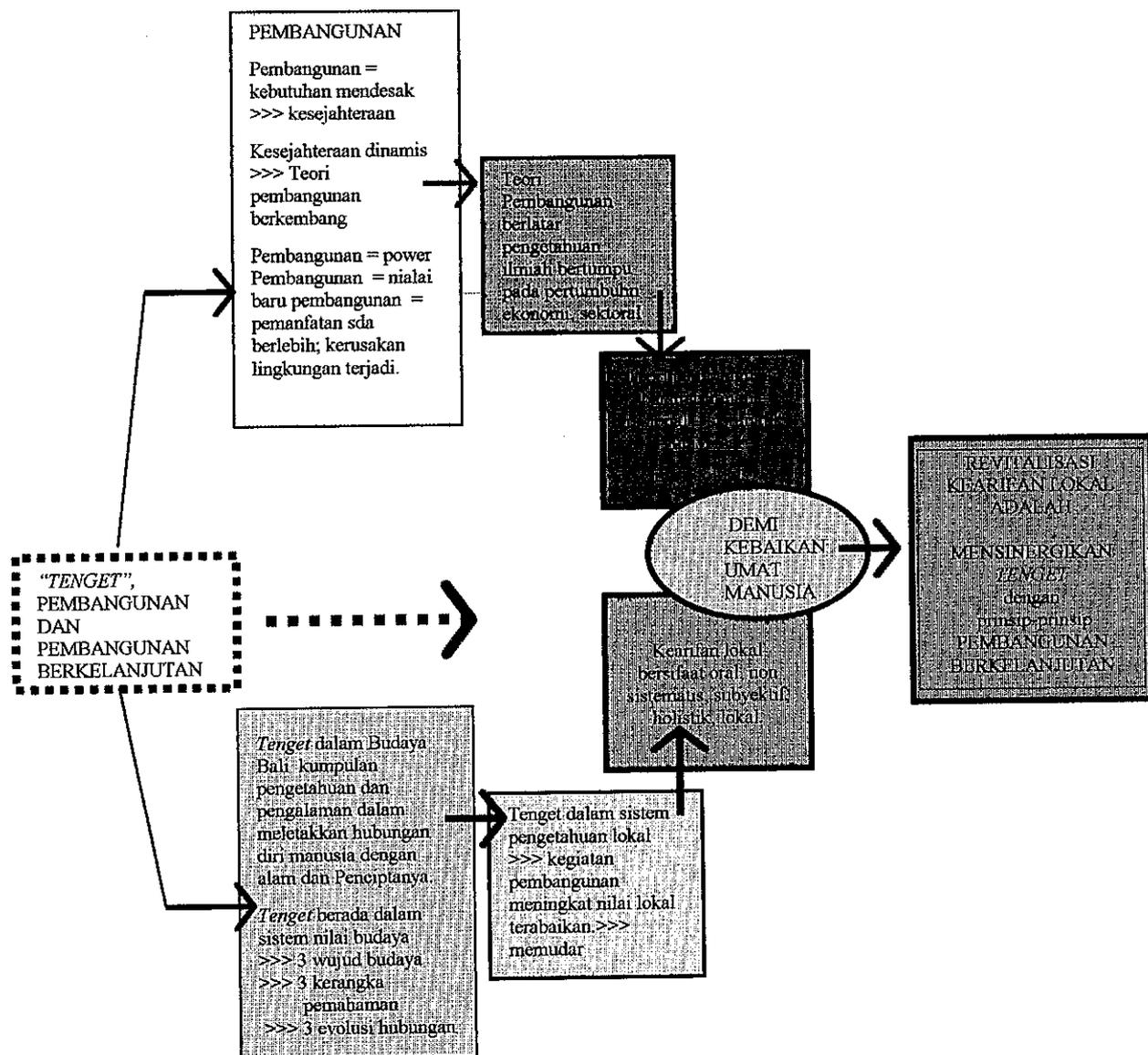
alasan **fungsional - holistik** (alam adalah eksistensi pada mana mestinya manusia menjalin kebertautan saling menguntungkan).

2.4.2. Revitalisasi

Banyak ahli yang mempertentangkan secara dikotomi antara kearifan lokal (*local genius* atau *indigenous knowledge*) dengan pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*). Menurut Mitchel (1995) dan Agrawal (1995) dalam IHRF (2002), secara substansial kedua sistem pengetahuan ini dibedakan karena: kearifan lokal tumbuh dan berkembang sebagai upaya untuk memahami **kenyataan hidup** dan memenuhi keperluan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pengetahuan ilmiah dibangun guna menjelaskan **fenomena kehidupan manusia**. Lebih jauh dijelaskan pula bahwa, secara metodologis dan epistemologis, perbedaan keduanya adalah: pengetahuan ilmiah sangat ditentukan oleh sistematika, obyektifitas dan sifatnya yang analitis; sementara kearifan lokal bersifat non-sistematik, subyektif dan holistik. Dilihat dari konteksnya, pengetahuan ilmiah bersifat global, sedangkan kearifan lokal bersifat lokal atau hanya terkait dengan masyarakat tertentu.

Akan tetapi di samping perbedaan-perbedaan di atas, nampak pula kesamaannya. Kedua sistem pengetahuan tersebut merupakan refleksi dari observasi manusia yakni: suatu klasifikasi pengalaman empirik terhadap gejala alam dan manusia; yang ditujukan untuk kebaikan umat manusia. Oleh karenanya menurut Norman Long dalam IHRF (2002), semestinya terdapat suatu "*interface*" pada mana kearifan lokal dan pengetahuan ilmiah dapat bekerja bersama saling mendukung secara sinergis guna mencapai suatu tujuan.

Dipandang dari kedudukan kearifan lokal yang sering terpinggirkan oleh aplikasi pengetahuan ilmiah (misalnya dalam teori perencanaan lingkungan), maka “upaya untuk mensinergikan pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal” inilah yang dimaksudkan sebagai **revitalisasi kearifan lokal** dalam penelitian ini. *Tenget* sebagai salah satu wujud kearifan lokal yang berada dalam kandungan sistem nilai budaya Bali dapat bersinergi dengan teori-teori perencanaan lingkungan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. (lihat *Ilustrasi II.2. Dasar Pemikiran*).



Ilustrasi II.2. Dasar Pemikiran

2.4.3. Aspek Penelitian dan Kerangka Analisis

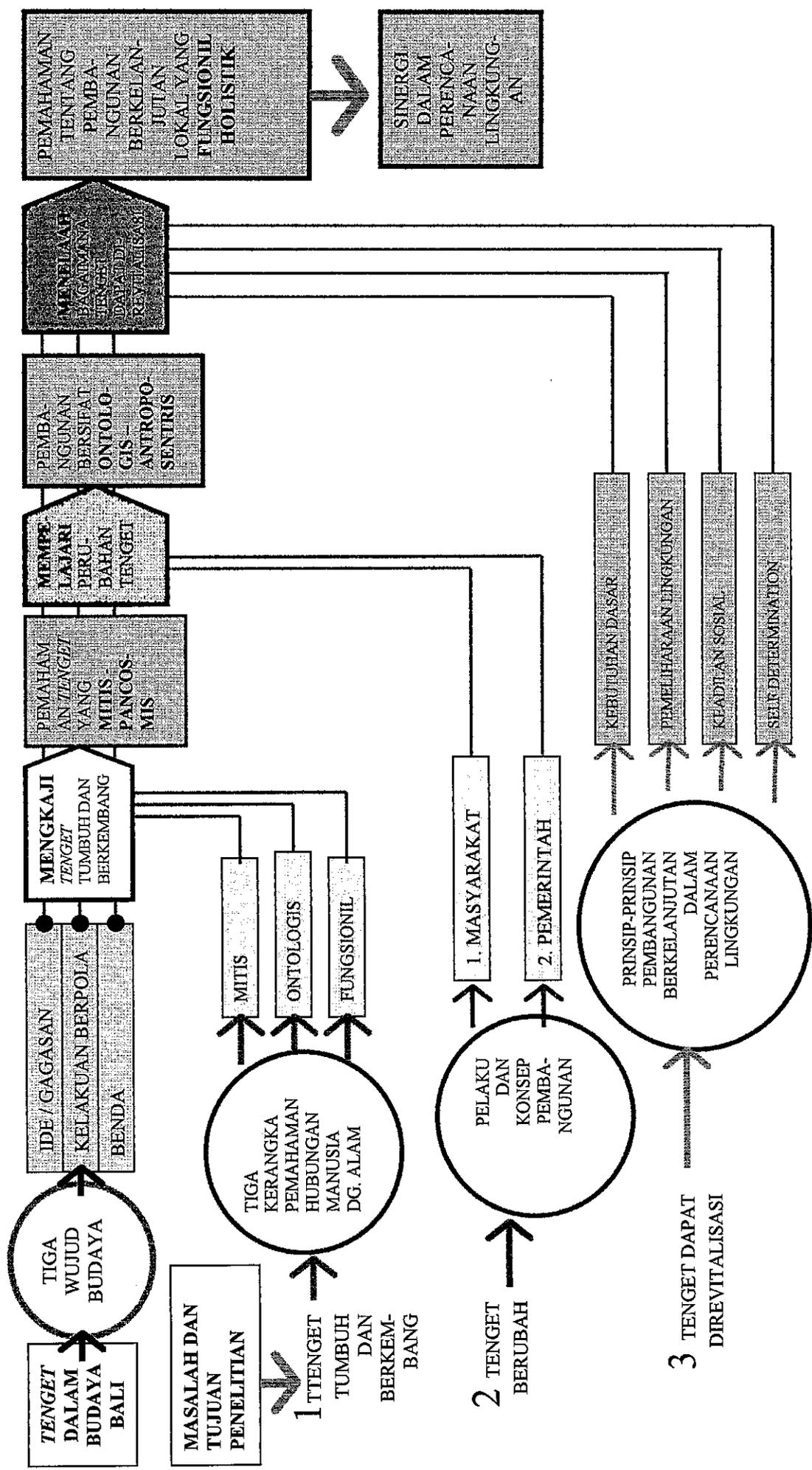
Merevitalisasi pemahaman tentang *tenget* yang tumbuh dan berkembang dalam sistem nilai budaya Bali, berarti untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang *tenget* sebagai sistem pengetahuan. Dalam pembahasan selanjutnya *tenget* akan dilihat dalam tiga wujud kebudayaan yaitu: wujud idea / gagasan, wujud aktivitas / perilaku berpola, dan wujud benda.

Sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui bagaimana *tenget* tumbuh dan berkembang, dapat dilihat dari kedudukan *tenget* dalam pemahaman individu / masyarakat dalam meletakkan hubungan dirinya dengan lingkungan (sosial atau alamiah). Sesuai dengan pemikiran tentang strategi kebudayaan Peursen (1976) ataupun evolusi hubungan manusia dengan alam menurut Hadi (2000), akan dapat ditelaah, apakah *tenget* sepenuhnya tumbuh dan berkembang pada salah satu, ataukah gabungan, dari tingkat pemahaman hubungan manusia dengan lingkungannya. Tingkat pemahaman hubungan manusia dengan lingkungan yang dimaksud yaitu: tingkat **mitis-pankosmis** (manusia tunduk kepada alam), **ontologis-antroposentris** (manusia adalah subyek dan alam adalah obyek yang harus dikuasai untuk kepentingan manusia) dan tingkat **fungsiil-holistik** (manusia dan alam menjalin kebertautan yang saling mendukung).

Kemudian untuk mengetahui bagaimana dan hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam pergeseran pemahaman tentang *tenget* dalam kaitannya dengan pembangunan, akan dikaji melalui dua aspek implementasi pembangunan yaitu fisik dan non fisik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat setempat. Pembangunan dalam hal ini diartikan sebagai upaya

pembaharuan yang menyediakan pilihan-pilihan baru bagi masyarakat dan bagaimana pilihan-pilihan itu dapat diterima dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam setiap upaya pembaharuan, akan selalu terjadi: sistem seleksi yakni nilai-nilai baru yang lebih dominan, yang dibawa serta oleh pembangunan, sehingga menyebabkan ditinggalkannya nilai-nilai lama yang dianggap tidak relevan; atau sistem adaptasi yakni nilai-nilai lama yang telah ada dalam masyarakat mampu menerima dan ber-sinergi dengan nilai-nilai baru, sehingga lebih mengokohkan sistem nilai budaya yang telah ada. Mempelajari bergesernya pemahaman *tenget* nantinya akan dilakukan pada latar pengertian pembangunan seperti di atas, dengan maksud tidak saja untuk mengetahui: bahwa memang benar telah terjadi pergeseran pemahaman *tenget*, tetapi juga apakah pergeseran itu terjadi karena *tenget* sudah tidak relevan lagi atautkah sebaliknya, bahwa *tenget* masih diperlukan tetapi justru kekeliruan terjadi dalam proses dan pemahaman pembangunan yang antroposentris.

Akhirnya untuk mengetahui bagaimana *tenget* dapat direvitalisasi dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan akan dilakukan korelasi interpretatif antara *tenget* sebagai wujud budaya dengan prinsip-prinsip dalam komponen Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (*fulfillment of human needs*); pemeliharaan lingkungan (*maintentance of ecological integrity*); keadilan sosial (*social equity*); dan kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*). Kajian ini nantinya diharapkan menghasilkan hubungan antara prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dengan *tenget* secara fungsional-holistik (*Lihat Ilustrasi3. Pola Pembahasan*)



Ilustrasi II.3. Pola Pembahasan

BAB III

PROSES PENELITIAN

3.1. Tradisi penelitian

Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun pemahaman (*understanding*) terhadap suatu fenomena lingkungan yang hidup dalam kerangka budaya masyarakat Bali. Untuk mengungkap realitas empirik yang senyatanya, memerlukan sudut pandang yang luas, lues sekaligus mendalam. Ini berarti data yang akan diperlukan lebih banyak bersifat non diskrit . Untuk keperluan itu kiranya tradisi penelitian kualitatif akan lebih sesuai (Moleong, 2000 dan Creswell, 1994). Kemudian guna menjaga pemahaman yang terbangun tetap konsisten dengan tujuan yang akan dicapai maka setiap langkah pembahasan akan selalu diupayakan diletakkan dalam konteks (medan garap) perencanaan lingkungan menuju Pembangunan Berkelanjutan.

3.2. Paradigma.

Pemahaman yang akan dibangun dalam penelitian ini diharapkan akan muncul melalui pengungkapan fakta-fakta di lapangan dalam kondisi alamiahnya tanpa memberikan perlakuan tertentu Dengan kata lain penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menguji teori tertentu tapi justru semata-mata mengangkat kebenaran yang senyatanya sebagaimana terjadi di lapangan, sehingga tidak perlu bertumpu pada teori yang telah ada. Untuk itu paradigma yang paling memiliki konsistensi dengan maksud tersebut adalah **konstruktivisme** (Denzin and Lincoln ed 1994 dalam Indarti, 2001). Dengan paradigma ini berarti: secara ontologis adalah berupa pengungkapan fakta senyatanya tentang *tenget* sebagaimana adanya

di lapangan; secara epistemologi adalah tentang bagaimana *tenget* tumbuh dan berkembang, lalu mengalami pergeseran makna dan bagaimana upaya-upaya revitalisasi yang dapat dilakukan; untuk itu secara metodologi memerlukan keterlibatan langsung peneliti dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan kondisi lingkungannya sebagai obyek yang diteliti; sehingga secara aksiologi dapat dimanfaatkan dalam perencanaan lingkungan menuju Pembangunan Berkelanjutan..

3.3. Strategi Penelitian

Strategi penelitian dimaksudkan sebagai ihtiar untuk membawa seluruh kegiatan penelitian pada jalur yang tepat yaitu agar mampu mengadopsi seluruh aspek yang diteliti baik *tenget* (sebagai wujud kearifan lokal), pembangunan (sebagai bentuk hubungan dan upaya manusia dalam mengelola lingkungan) maupun Pembangunan Berkelanjutan (sebagai konsep baru dalam pembangunan). Untuk maksud tersebut, disamping juga waktu yang tersedia sangat terbatas, penelitian ini menggunakan strategi “Studi Kasus ” dengan mengambil kasus yang representatif terhadap tujuan penelitian. Agar kasus penelitian menunjukkan ciri-ciri yang menonjol dan kuat sesuai dengan aspek yang akan diteliti, maka dipilih suatu kelompok masyarakat yang: pada satu sisi menunjukkan budaya tradisional yang kuat; dan pada sisi yang lain terjadi arus modernisasi / pembangunan yang menunjukkan kegiatan intensif.

3.4. Metoda Pengumpulan Data

Pengumpulan data selama penelitian lapangan akan dilakukan melalui cara-cara:

- Wawancara mendalam dengan informan kunci (key informan) di *Desa Adat Penglipuran*. Bila dipandang terdapat keterkaitan informasi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan di lapangan akan dilakukan pula wawancara terhadap informan kunci di luar *Desa Adat Penglipuran*.
- *Focus group discussion* (diskusi kelompok terfokus) terhadap kelompok informan.
- Wawancara informal yakni melakukan wawancara langsung dengan anggota masyarakat secara acak.
- Observasi lapangan yaitu melakukan pengamatan terhadap kegiatan tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Akan dilakukan pula observasi terhadap obyek atau transkrip lokal yang berkaitan dengan *tenget*
- Pengabadian data melalui alat perekam suara atau gambar / kamera

3.5. Metoda analisa

Setelah material empirik yang diperoleh dilapangan mencukupi, akan dilakukan pengelompokan dan penganalisaan. Metoda analisa yang dipakai adalah *content analysis* yakni penggalian realitas lapangan yang dirangkai menjadi suatu bangun pemahaman melalui tahapan interpretasi, evaluasi dan presentasi secara induktif. Proses induktifnya tidak akan dibatasi pada satu metode saja, akan tetapi akan dipakai metode yang sesuai dengan informasi yang diperoleh. Metode yang dipakai sesuai dengan kanon Stuart Mill (Rapar, 1996: 86) meliputi: metode persesuaian (*agreement*); metode perbedaan (*difference*), metode gabungan persesuaian dan perbedaan, metode residu (*residues*) dan metode variasi kesamaan (*concomitant variations*).

3.6. Lokasi Penelitian

Kearifan lokal tentang lingkungan sesungguhnya banyak terdapat di seluruh wilayah Indonesia seperti yang diungkap oleh Dove (1985), Hadi (2000: 18) dan

Hadi (2001: 59).. Penulis tertarik untuk mengangkat kearifan lokal dengan latar masyarakat Bali dengan alasan bahwa Bali menyimpan berbagai kearifan lingkungan yang belum tergalai sementara perkembangan industri pariwisata mendorong terjadinya perubahan budaya dan lingkungan yang sangat pesat.

Kemudian untuk memilih dan menetapkan kasus penelitian, penulis mengetengahkan salah sebuah *Desa Adat* yakni *Desa Adat Pengelipuran* di Kabupaten Bangli dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Dengan mengetengahkan kasus *Desa Adat*, penelitian ini akan cukup representatif bagi Pulau Bali karena seperti diketahui Bali sesungguhnya baik secara fisik teritorial dan sosial politik merupakan kumpulan dari *Desa Adat*, sehingga hampir setiap jengkal tanah di Bali sesungguhnya berada dalam wilayah sebuah *Desa Adat*.
- *Desa Adat* Penglipuran memiliki karakteristik dasar yang secara rata-rata sama dengan *Desa Adat* lainnya, sehingga dengan meneliti *Desa Adat* Penglipuran akan memberi gambaran tentang *Desa Adat* yang lain.
- *Desa Adat* Pengelipuran memiliki ciri tradisional yang relatif utuh dibanding dengan *Desa Adat* lainnya. Di sisi lain *Desa Adat* Pengelipuran ditetapkan sebagai desa wisata melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangli Nomor 115 tahun 1993, yang berarti pembangunan kepariwisataan telah dana akan terus dilakukan secara intensif di desa ini. Dari kenyataan ini, dengan mengetengahkan *Desa Adat* Pengelipuran sebagai kasus, diharapkan akan ditemukan konflik, kontradiksi atau indikasi lainnya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

- *Desa Adat* Pengelipuran sangat unik dari segi ekologi. Baik lingkungan sosial, maupun lingkungan alamiahnya, tampak masih lestari dan harmonis dengan alam. Terdapat banyak obyek untuk memahami *tenget* baik dalam wujud ide (*awig-awig, sima krama, perarem*), aktivitas (*sangkep / musyawarah desa, ritual keagamaan*) maupun wujud fisik (bangunan, hutan bambu disekitar desa, lahan pertanian, mata air).
- Alasan lain yang bersifat tambahan adalah bahwa penulis berasal dari daerah yang berdekatan dengan *Desa Adat* Pengelipuran sehingga cukup mengenal kondisi fisik dan sosial desa tersebut. Waktu penelitian yang relatif singkat mungkin akan dapat diimbangi dengan “penghayatan dari dalam”(meminjam istilah Sujatmo, 2000, dalam Reorientasi dan Revitalisasi Pandangan Hidup Jawa) yang justru sangat diperlukan dalam penelitian dengan tradisi kualitatif.

Untuk mendapat gambaran tentang pergeseran makna *tenget*, perubahan akibat pengaruh pembangunan dan hal-hal lain sesuai dengan tujuan penelitian akan dilakukan perbandingan (komparasi). Untuk itu informasi akan digali, disamping melalui informan kunci juga melalui kelompok diskusi dari kelompok-kelompok anggota masyarakat tertentu. Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang akan atau masih sangat berperan dalam arah perkembangan *Desa Adat* Penglipuran ke depan dan disesuaikan dengan sistem pengelompokan masyarakat Hindu (bagian dari yang disebut *Catur Asrama*) yaitu: kelompok *brahmacarin* (mereka yang belum menikah / masa belajar / kaum muda); kelompok *grehasta* (mereka yang telah berumah tangga dan masih mempunyai tanggungan serta masih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan); dan kelompok *bhiksuka* (mereka yang sudah mengurangi keterlibatannya dari kehidupan

bermasyarakat yang terdiri dari sesepuh desa atau pendeta). Sedangkan kelompok *wanaprasta* (hidup mengasingkan diri / bertapa) tidak dijadikan responden karena jumlahnya sedikit bahkan mungkin tidak ada.

3.6.1. Jadwal penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian dengan tradisi kualitatif semacam ini semestinya cukup panjang agar dapat mengungkap seluruh jawaban yang diperlukan sesuai tujuan penelitian. Namun berhubung berbagai keterbatasan, antara lain, batas penugasan dan bantuan dana studi maka penulis akan memanfaatkan waktu yang tersedia yaitu kurang lebih satu setengah bulan secara maksimal dan seefektif mungkin

BAB IV

DISKRIPSI TENTANG *DESA ADAT* PENGLIPURAN

4.1. Pelaksanaan penelitian di lapangan

Secara berurut, penelitian di lapangan dimulai dengan menemui: Lurah Kubu (*Desa Adat* Penglipuran adalah salah satu desa di kelurahan ini), *Kelihan* Dinas (Kepala Lingkungan) dan *Kelihan Adat* (tetua adat) untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan. Selama penelitian berbagai penyesuaian tak terhindarkan harus dilakukan terhadap pedoman penelitian (*research guidance*). Untuk memperoleh gambaran yang selengkapny, ada baiknya sebelum hasil penelitian disajikan, penulis uraikan secara singkat terlebih dahulu tentang pelaksanaan penelitian selama di lapangan.

1. Waktu Pelaksanaan Penelitian.

Pelaksanaan penelitian yang semula dijadwalkan mulai dilakukan pada awal Juli 2002 dan diharapkan berakhir pada pertengahan Agustus 2002 ternyata harus mengalami penundaan selama dua minggu sehingga baru berakhir pada akhir bulan Agustus 2002 karena: proses perkenalan dan penyesuaian-penyesuaian, penentuan informan kunci, serta banyaknya informasi yang harus digali dan dihimpun.

Pelaksanaan penelitian dilakukan setiap hari dengan waktu yang berubah-ubah (pagi siang atau malam) sesuai dengan kesediaan informan di lapangan.

2. Pengumpulan informasi dan penentuan informan.

Pengumpulan informasi selama penelitian lapangan dilakukan dengan:

- Wawancara mendalam dengan informan kunci (*key informan*). Penentuan informan kunci dilakukan setelah mendapat informasi awal dari warga

masyarakat bahwa orang bersangkutan memiliki pengetahuan, memiliki kedudukan, kewenangan dan pengaruh dalam adat. Akhirnya dapat ditetapkan 5 orang informan kunci sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	I Ketut Pasek Lanang Sadia, AP	Lurah Kubu	Penglipuran adalah salah satu <i>Desa Adat</i> dibawah Kelurahan Kubu
2	I Wayan Sidang	Jro Bayan Mucuk	Pejabat tertinggi majelis adat
3	I Wayan Mulih	Jro Bayan Nyoman	Pejabat kedua tertinggi majelis adat
4	I Wayan Supat	Bendesa / Kelihan Adat	Pejabat adat fungsionil eksekutif
5	I Wayan Rajiin	Jro Bayan Salain	Mantan pejabat tertinggi majelis adat

Ilustrasi IV.1. Daftar Informan Kunci

- Diskusi Kelompok Terfokus (*focus group discussion*) dilakukan terhadap dua kelompok yakni kelompok warga masyarakat (*Krama*) senior yang masih aktif dalam kegiatan adat (selanjutnya disebut DKT.I), dan kelompok ke dua terdiri dari kelompok *barahmacarin* yaitu muda-mudi /*Daha Teruna* (selanjutnya disebut DKT. II).
- Wawancara informal dilakukan terhadap 18 orang informan. Informasi yang diperoleh dari wawancara informal ini bersifat untuk konfirmasi dan melengkapi.
- Observasi lapangan yang sempat dilakukan adalah: pengamatan langsung tentang lingkungan fisik dengan menjelajah hutan bambu, sawah, ladang; mengikuti kegiatan *pasangkepan purnama*¹ (rapat rutin setiap bulan purnama), pengamatan terhadap pelayanan kepada wisatawan, pengelolaan kebersihan, dan berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.

- Pengabdian data dilakukan dengan mencatat, atau dengan alat perekam suara (tapi tidak seluruhnya karena penggunaan alat ini ternyata dapat merusak suasana) dan dengan alat perekam gambar/ kamera.

3. Katagori dan presentasi informasi

Tidak semua informasi yang muncul selama penelitian mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Dalam pembahasan nantinya, informasi yang dipakai terutama adalah yang bersumber dari informan kunci. Karena informan kunci yang dipilih telah diupayakan yang berkavasitas selaku wakil masyarakat dan informasi yang diperoleh telah melalui wawancara mendalam secara berulang. Sedangkan informasi yang bersumber dari wawancara informal dan kelompok diskusi terfokus dipakai sebagai konfirmasi untuk mendapatkan sebaran pemahaman yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu dilakukan pemilahan dan perangkuman informasi sebagaimana disajikan dalam uraian selanjutnya dalam bab ini. Detail informasi yang berkaitan dengan penganalisaan/pembahasan akan langsung dicantumkan pada saat pembahasan pada bab berikutnya (untuk menghindari penulisan berulang). Sedangkan informasi yang bersifat menunjang atau melengkapi akan dicantumkan dalam lampiran tersendiri.

Untuk memudahkan penyajian informasi hasil wawancara, dimana seluruh dialog yang dilakukan dengan informan menggunakan Bahasa Bali, maka dalam penulisan kalimat asli dalam Bahasa Bali diupayakan tetap dicantumkan disertai dengan terjemahannya. kecuali untuk informasi yang aslinya berbahasa Indonesia atau mudah ditangkap maknanya langsung disajikan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan demi menghindarkan kesalahan pemaknaan. Penyajian dalam bentuk

asli (Bahasa Bali) memungkinkan penulis untuk melakukan penelaahan secara berulang.

4.2. Kondisi karakteristik *Desa Adat* di Bali.

Dari segi pewayahannya, Pulau Bali dapat dikatakan sebagai kumpulan *Desa Adat*, sehingga bila kita berbicara tentang Bali tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang *Desa Adat*. Seperti disebutkan dalam Majalah Sarad No. 6 Th. I Juni 2000: sesungguhnya tak sejangkalpun tanah Bali terlepas dari wilayah *Desa Adat*, karena tanah Bali telah terbagi-bagi kedalam *parimandala* (teritorial) *Desa Adat*.

Desa Adat di Bali diperkirakan telah mulai ada sejak Jaman Bali Kuna (abad IX) yang pada awalnya lebih merupakan kelompok keturunan dari cikal bakal pendiri permukiman atau desa bersangkutan. Kelompok tersebut dikenal dengan nama *Krama* atau *Kraman* sedangkan tempat dimana *Kraman* berada disebut "desa" atau *Desa Pekraman* *Desa Pekraman* kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan demokratis-otonom yang memiliki hukum atau aturan budaya adatnya sendiri, sehingga oleh Liefrinck dan Korn (dalam Dharmayuda 2001:1-5) disebut sebagai Republik Kecil atau Republik Desa (*Dorprepubliek*).

Dengan munculnya pengaruh kerajaan Hindu Jawa sekitar abad XIV, *Desa Pakraman* mulai berada dibawah pengaruh raja-raja. Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda, untuk mengawasi dan mengokohkan pengaruh kekuasaannya di desa-desa, diangkatlah seorang "Perbekal", sebagai wakilnya. Akhirnya setelah kemerdekaan, oleh pemerintah Republik Indonesia *Perbekal* lebih dikokohkan kepemimpinannya menjadi Kepala Desa untuk Desa Dinas atau Lurah untuk Kelurahan, sebagai unit pemerintahan terendah dibawah Camat.

Istilah *Desa Adat* mulai banyak digunakan sekitar tahun 1955 untuk membedakannya dengan kewenangan Desa Dinas atau Kelurahan (Titib dalam Supartha ed. 1999: 164) Hal ini terjadi karena ternyata sistem administrasi pemerintahan desa melalui Desa Dinas atau Kelurahan tidak mampu mencakup seluruh kepentingan masyarakat desa khususnya yang berkaitan dengan adat, agama dan budaya setempat. Oleh karena itulah *Desa Pakraman*, yang kemudian lebih dikenal dengan *Desa Adat*, masih tetap bertahan, bahkan menunjukkan peran yang semakin besar dan kuat dalam memberi pengayoman bagi masyarakat pendukungnya.

Unsur pembentuk *Desa Adat* menurut Wardha (dalam Dharmayudha, 2001) adalah adanya *Catur Bhuta Desa* yaitu: *Parimandala* (lingkungan wilayah desa), *Kraman* (rakyat atau warga desa), *Datu* (pengurus atau pemimpin desa) dan *Tuah* (perlindungan dari Tuhan/*Hyang Widhi*). Kemudian untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bersama dalam *Desa Adat*, keempat unsur di atas dikelola berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* yaitu suatu konsep yang bersumber dari ajaran Agama Hindu yang berarti tiga penyebab kesempurnaan atau kebahagiaan. Dalam *Desa Adat* konsep ini diteransformasikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan dalam rangka hubungan yang harmonis antara Sang Pencipta, manusia, dan lingkungan/alam (Titib dalam Supartha, ed., 1999). Untuk mewujudkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sebagian wilayah desa/*parimandala* ditetapkan sebagai "zone" yang disakralkan yang disebut *Parhyangan*, sebagai tempat pemujaan. Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antar manusia / warga dalam satu desa, ada istilah *Pawongan* yang di dalamnya menyangkut ketentuan seluruh aspek tata kemasyarakatan baik

mengenai hak-hak (*swadhikara*) maupun ketentuan tentang kewajiban-kewajiban (*swadharma*) individu atau kelompok di dalam desa. Dalam mewujudkan keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungannya dikenal istilah *Palemahan* yaitu mengenai lahan dimana terdapat ketentuan tentang pemilikan, pembagian dan pengelolaan. Ketentuan – ketentuan tersebut dihimpun dalam peraturan desa yang disebut dengan *awig-awig*. *Awig-awig* ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama (*pararem*) dengan bersumber dari adat kebiasaan / tradisi yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu.

4.3. Kondisi karakteristik lingkungan *Desa Adat Penglipuran*

4.3.1. Latar belakang historis dan kultural.

Dari informasi yang diperoleh dalam wawancara dengan informan kunci dan beberapa orang warga, sejarah dan kultur *Desa Adat Penglipuran* dapat dirangkum sebagai berikut ini. Penglipuran diperkirakan mulai berpenghuni semasa pemerintahan *I Dewa Gedé Putu Tangkeban III*, yang menjadi *Anak Agung (Raja)* Bangli pada periode tahun 1833-1875, sehingga merupakan desa yang sangat tua. Sebagian besar penduduk desa ini meyakini bahwa mereka berasal dari perpindahan sebagian penduduk sebuah desa yang terletak di sebelah utaranya yaitu *Desa Adat Bayung Gede* yang terletak 25 KM di sebelah utara, di Kecamatan Kintamani. *Desa Adat Bayung Gede* dan demikian pula desa-desa lainnya di sekitar Gunung dan Danau Batur merupakan desa-desa tua yang telah ada sebelum pengaruh kerajaan Hindu Jawa masuk ke Bali sehingga sering disebut sebagai desa *Bali Aga* atau *Bali Mula* (Goris, 1926).

Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Lurah, *BenDesa Adat* ataupun beberapa warga masyarakat *Desa Adat Penglipuran*, diceriterakan bahwa: tenaga

orang-orang Bayung Gede sangat diandalkan dalam kegiatan adat, agama atau pertahanan keamanan oleh raja-raja Bangli karena umumnya orangnya bertenaga besar. Kemudian kelompok orang Bayung Gede yang sering dipanggil ke Puri Raja Bangli ini diberikan tempat sementara di dekat pusat kerajaan (sekitar 5 KM) yang akhirnya berkembang menjadi *Desa Adat Penglipuran* sekarang.

Ada pula informasi lain yaitu dari *Jro Bayan Nyoman* salah seorang tetua adat *Desa Adat Penglipuran* yang mengatakan bahwa *Desa Adat Penglipuran* semula merupakan *pondokan* atau *kubu* (tempat tinggal sementara untuk menggarap lahan pertanian) dari orang-orang *Desa Bayung Gede*, sehingga sampai sekarang kadang-kadang masih disebut sebagai *Kubu Bayung*.

Perlu diketahui bahwa *Desa Adat* di Bali selalu dibatasi oleh: teritorial tertentu (*wewengkon* atau *parimandala*) dan jumlah KK tertentu sebagai penghuni (*krama*). Bila jumlah penduduk suatu desa bertambah dari jumlah *krama* semula maka kelebihan ini akan berusaha mencari lahan pertanian di luar teritorial desanya semula (*memondok / ngubu*) yang kemudian berkembang menjadi desa baru dengan tetap membawa adat kebiasaan dari desa asalnya semula. Hal ini terbukti dari adanya beberapa desa di sekitar *Desa Adat Bayung Gede* yang secara tata ruang fisik permukiman, bentuk rumah, tempat pemujaan, bahasa dan hubungan sosial memiliki kemiripan dengan *Desa Adat Bayung Gede*.

Dalam penjelasan Data Dasar Profil Kelurahan Kubu disebutkan, penglipuran mempunyai arti “*pengeling pura*” yang berarti “ingat kepada tempat leluhur” dalam hal ini *Desa Bayung Gede*. Namun ada pula yang menyebutkan “penglipuran” berasal dari suku kata “*lipur*” dalam Bahasa Bali yang berarti “hibur” (ingat pe-lipur lara). Jadi *Desa Adat Penglipuran* semula adalah tempat bagi

keluarga Kerajaan Bangli untuk menghibur diri karena tempatnya yang sejuk dan indah.

Yang penting diketahui dari tinjauan sejarah *Desa Adat* Penglipuran ini adalah bahwa: Pertama, *Desa Adat* Penglipuran masih dapat digolongkan sebagai kelompok *Desa Bali Aga* yaitu desa-desa yang telah berkembang sejak jaman Bali Kuna dimana ciri-ciri pengaruh kerajaan Hindu di Jawa tidak begitu kuat dibandingkan dengan desa-desa Bali pesisir; Kedua, *Desa Adat* Penglipuran adalah pecahan atau perpindahan dari sebagian kelebihan penduduk desa lain yaitu *Desa Adat Bayung Gede*

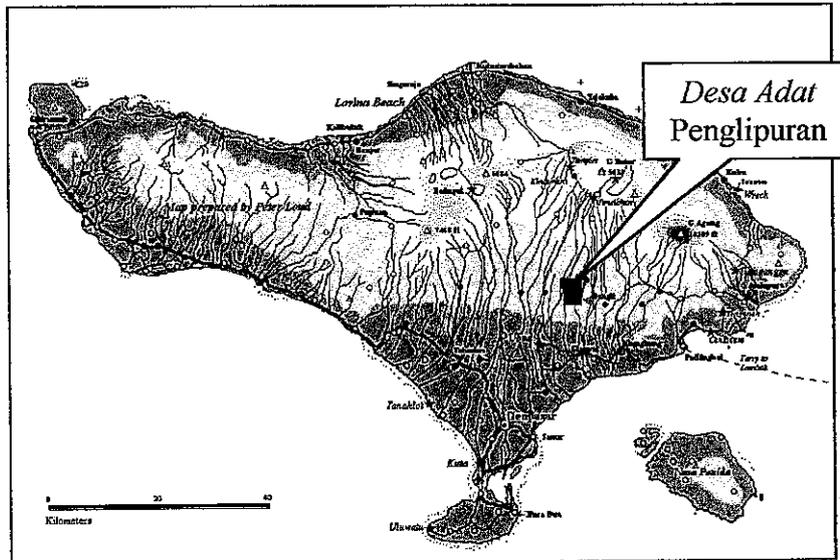
Pemerintah Propinsi Bali maupun Kabupaten Bangli, memandang desa-desa di kawasan Bangli Utara (sekitar Gunung dan Danau Batur) cukup layak dijadikan sasaran pengembangan wisata, karena memang memiliki 'warna' yang berbeda dalam penataan lingkungan dan sistem arsitektur, dibanding dengan desa pada umumnya di Bali. Salah satunya, yakni *Desa Adat* Penglipuran, kemudian ditetapkan sebagai Desa Wisata Terpadu melalui Keputusan Bupati Bangli Nomor 115 tahun 1993. Ini berarti, sejak saat itu pembangunan kepariwisataan telah dilakukan secara intensif di desa ini.

4.3.2. Lingkungan Fisik *Desa Adat* Penglipuran

1. Lokasi dan batas-batas *Desa Adat* Penglipuran

Desa Penglipuran termasuk dalam Kecamatan Kubu Kabupaten Bangli, Propinsi Bali. Desa ini terletak sekitar 5 KM di sebelah utara kota Bangli atau sekitar 45 KM dari kota Denpasar. Hawanya sejuk sampai dingin (16° – 29°C), dengan ketinggian 600 – 700 M diatas permukaan laut dengan luas areal 115 Ha.

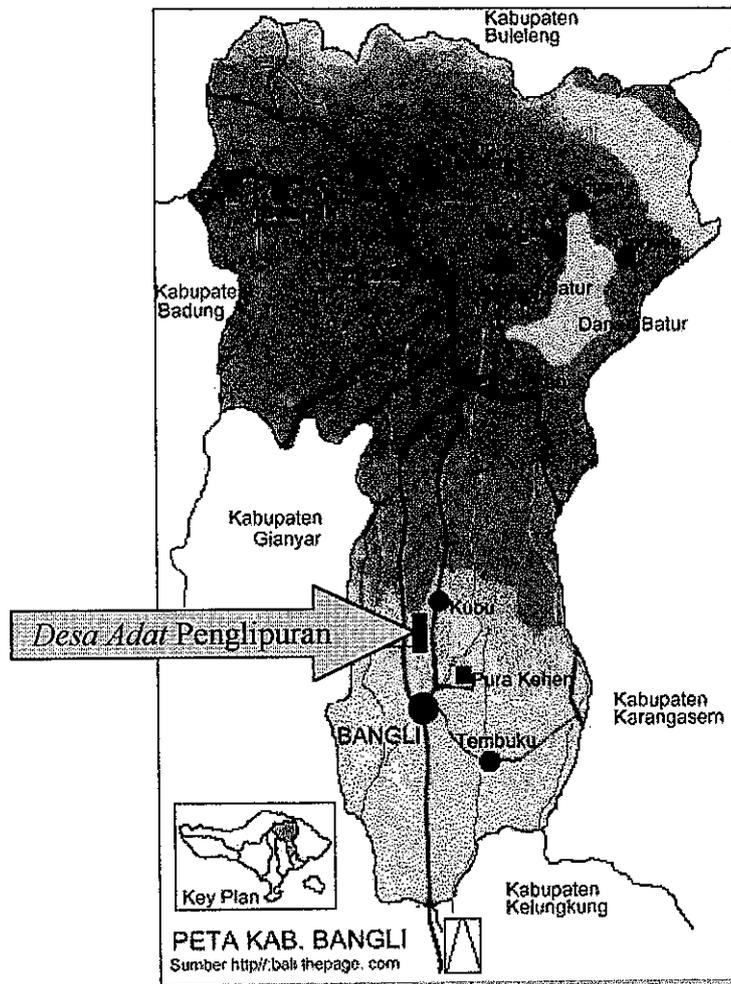
Kemiringan tanah rata-rata antara 10 % sampai dengan 45% dengan jenis tanah lempung berpasir, sehingga sangat cocok untuk areal pertanian.



Ilustrasi IV.2. Lokasi *Desa Adat Penglipuran*

Areal *Desa Adat Penglipuran* berbatasan dengan:

- disebelah utara *Desa Adat Kayang*,
- di sebelah timur *Desa Adat Kubu*,
- disebelah selatan *Desa Adat Gunaksa*
- dan di sebelah barat *Desa Adat Cekeng*.

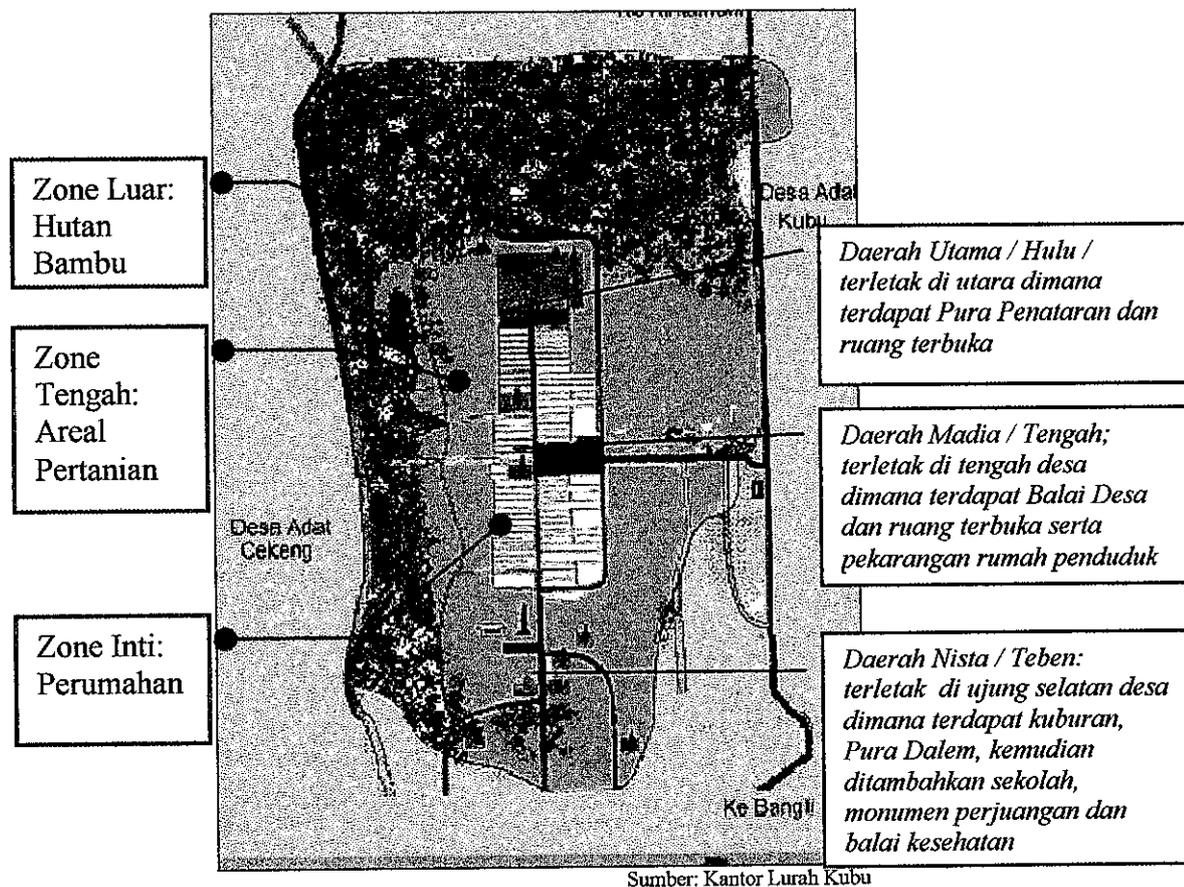


Ilustrasi IV.3. Lokasi *Desa Adat Penglipuran* dalam Kabupaten Bangli

2. Pola Tata Lingkungan Desa.

Dari hasil observasi lapangan terlihat bahwa secara garis besar areal *Desa Adat Penglipuran* terbagi atas tiga pemitakatan besar yaitu:

- hunian / perumahan penduduk yang terletak di tengah-tengah;
- di sekitar hunian terdapat areal pertanian berupa kebun, sawah atau ladang;
- kemudian di luarnya lagi terdapat areal hutan bambu dan hutan alami yang mengelilingi areal desa.



Ilustrasi IV.4. Pola Tata Lingkungan Desa.

Areal hunian / perumahan *Desa Adat* Penglipuran dibelah oleh jalan utama, yang membujur secara dominan arah utara – selatan, sehingga secara keseluruhan pola permukiman desa ini berbentuk linier.

Di tengah areal perumahan terdapat jalan utama dan ruang terbuka atau “*natah desa*” dimana terletak berbagai fasilitas pelayanan umum berupa: tempat ibadah dan Balai Desa. Pola desa linier ini mendapat aksentuasi dengan perletakan tempat ibadah pada titik-titik utamanya mengikuti konsep *Tri Mandala* yaitu pembagian zonasi lingkungan berdasarkan tata nilai: *utama* (letak tertinggi atau arah ke gunung), *madya* (terletak di tengah-tengah) dan *nista* (letak terendah atau arah ke laut). Pada ujung utara/*kaja/hulu/utama* terdapat Pura Puseh Desa (tempat

memuja *Dewa Brahma* sebagai manifestasi Tuhan selaku ‘pencipta’) dan *Pura Bale Agung* atau *Pura Penataran* (tempat memuja *Dewa Wisnu* sebagai manifestasi Tuhan selaku ‘pemelihara’) dan pada bagian selatan terdapat *Pura Dalem* serta *Kuburan Desa* (tempat memuja *Dewa Ciwa* sebagai manifestasi Tuhan selaku ‘pemralina / pelebur’). Disamping itu pada ujung selatan terdapat pula: fasilitas kesehatan, sekolah dan sebuah Monumen Perjuangan, sedangkan di tengah-teangah terdapat Gedung Serba Guna dan fasilitas wisata lainnya yang dibangun oleh pemerintah.

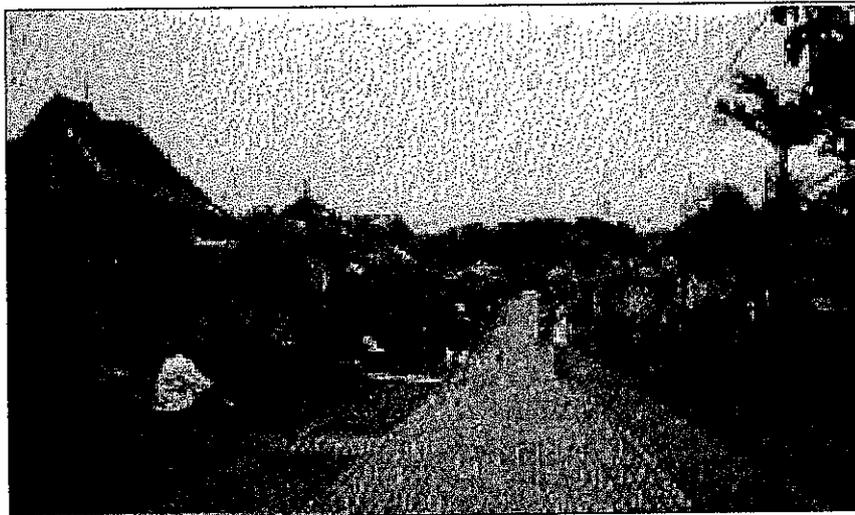


Foto: Raka 2002

Ilustrasi IV.5. “Facade” (penampakan depan) pada jalan utama yang membelah desa

Hutan bambu di sekitar areal perumahan kini tinggal seluas 37.7 Ha. yang sebelumnya mencakup luas 50 Ha. terdiri dari 15 (lima belas) spesies yang seluruhnya berstatus milik desa. Sebagian dari luas tersebut dikelola langsung dibawah *Desa Adat* sebagai *Laba Pura* (hasilnya dipakai untuk keperluan pemeliharaan bangunan Pura). Sedangkan sebagian lagi dikelola oleh beberapa orang penduduk dengan status nanggung atau hak pakai. Sesuai informasi dari *Jro Bayan Nyoman* dan warga masyarakat yang berhasil diwawancarai, menginformasikan bahwa dahulunya hutan bambu tersebut mengelilingi seluruh

areal perumahan, dan berfungsi sebagai benteng, tetapi kini pada bagian timur dan sebagian pada arah selatan telah dirombak oleh penduduk dan dijadikan kebun atau perluasan pekarangan.



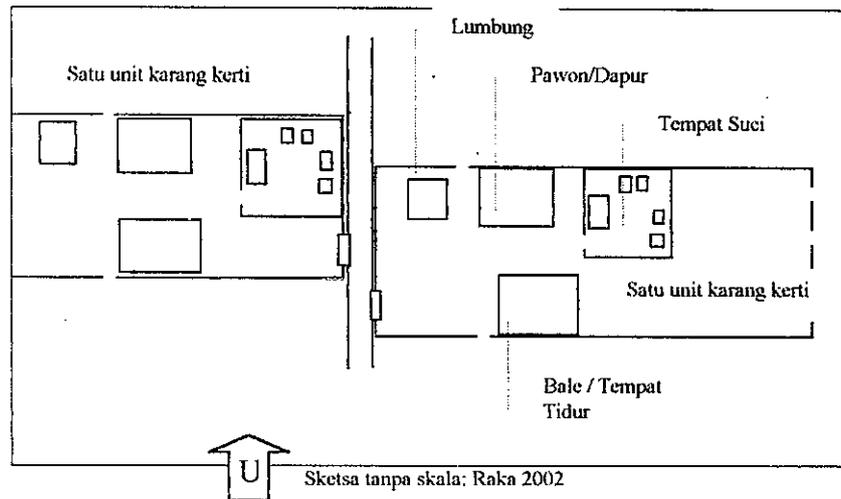
Foto: Raka 2002

Ilustrasi IV.6. Hutan bambu di sekitar desa

3. Pola Tata Bangunan.

Perumahan penduduk terdiri dari persil-persil pekarangan dengan lebar rata-rata 8.5 m dan memanjang kebelakang sampai pada jalan lingkar di sekeliling areal perumahan. Masing-masing pekarangan terbagi atas tiga bagian (juga mengikuti konsep *Tri Mandala* sebagaimana dalam lingkungan perumahan makro) yakni areal tempat suci keluarga (*sanggah*) sebagai zone *utama* (areal yang disakralkan terletak pada bagian timur laut (*kaja-kangin*), areal tempat tinggal (*pawongan*) sebagai zone *madya* dibagian hilirnya dan areal lebu atau *teba* sebagai zone *nista* (tempat membuang sampah dan memelihara ternak) yang terletak di luar kedua zone terdahulu. Pola penataan pekarangan ini hampir seluruhnya masih nampak utuh dan dipertahankan serta dipedomani dalam setiap kegiatan pembangunan oleh warga desa. Hanya saja pada zone *nista* dewasa ini telah banyak dimanfaatkan sebagai

tempat tinggal dengan mendirikan bangunan-bangunan type baru sebagai desakan pertambahan jumlah penghuni / penduduk. Dari observasi lapangan juga teramati adanya pembangunan rumah di luar zone perumahan



Ilustrasi IV.7. Pola Tata Bangunan dalam Pekarangan

Menurut *Jro Bayan Duwuran* dan *Jro Bemdesa* jumlah pekarangan di *Desa Adat Penglipuran* sejak semula sampai kini tetap yakni 77 buah. Satu diantaranya disebut *karang memadu* (tempat pengucilan bagi yang beristri lebih dari satu) dan 76 buah sisanya disebut dengan *karang kerti*² (tempat pengabdian = tempat tinggal). Setiap *karang kerti* disertai dengan sebidang tanah garapan yang disebut *cecatu* (sawah, ladang dan hutan bambu). Seluruh pekarangan rumah beserta lahan di dalam areal *Desa Adat Penglipuran* sepenuhnya menjadi milik *Desa Adat* dengan status tanah ayahan desa yang lazim disebut AYDS, sedangkan penghuninya hanya memperoleh hak-pakai dan hak-guna-bangunan. Pekarangan – pekarangan ini disebut dengan *karang kerti* karena diyakini sebagai tempat mengabdikan diri kepada Tuhan melalui kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat (*kerti* = pengabdian kepada Tuhan melalui pikiran, perkataan dan perbuatan baik), oleh karenanya di-

tenget-kan. *Karang kerti* beserta lahan ikutannya tidak boleh dibangun di luar ketentuan adat, atau ditanami pohon tertentu, sesuai ketentuan *awig-awig*, apalagi diperjual belikan.. Penghuni *karang kerti* disebut dengan *pananggap* (dari kata *pa-nanggap* = orang yang diserahi tanggung-jawab dengan suatu imbalan).

Bangunan Umum maupun perumahan tampil dengan bentuk khas bangunan pegunungan, beratap lancip dengan kemiringan sekitar 45%, berdinding pendek dan berdiri diatas umpak / pondasi dari batu padas / atau batu gunung. Bahan bangunannya umumnya memakai bahan alami yang ada disekitar desa yakni: batu dan tanah lempung untuk pondasi atau lantai; kayu dan bambu untuk bahan konstruksi, struktur dinding dan atap. Seluruh bangunan tampil hampir serupa, lugu, mencerminkan kesederhanaan dan keserasian dengan alam lingkungan. Bangunan diyakini sebagai sesuatu yang harus di-*tenget*-kan, karena merupakan penghubung antara *Bhuana Alit* (diri manusia) dengan *Bhuana Agung* (alam semesta). *Bhuana Alit* dan *Bhuana Agung* diyakini harus dijaga agar selalu harmonis karena identik dan terbentuk dari unsur yang sama yaitu *Panca Maha Bhuta* yang terdiri dari *apah* (zat cair), *pertiwi* (zat padat), *bayu* (gas / udara), *teja* (energi) dan *akasa* (ruang).

Tata letak bangunan mengikuti ketentuan dalam *Hasta Bhumi* (manuskrip diatas lontar tentang tata letak bangunan). Ukuran-ukuran harus mengacu pada ukuran tubuh calon penghuni (seperti *anyari* = sejari, *acengkang* = sejengkal, *amusti* = dari telapaktangan bagian bawah sampai keujung ibu jari, *hasta* = dari siku ke ujung jari, *adepa* = serentangan tangan) yang mengikuti ketentuan dalam *Hasta Kosala Kosali* (manuskrip diatas lontar tentang membuat bangunan). Bahan bangunan memakai bahan-bahan organis yang ada di sekitar

desa seperti: kayu, bambu, ijuk, batu padas dan tanah liat yang ditata demikian artistik. Penggunaan ornamen pada bangunan tempat suci nampak sangat menonjol sedangkan pada bangunan perumahan hampir tidak terdapat ornamen yang berarti. Bahan bangunan ditampilkan apa-adanya dengan jujur dan serasi.



Foto: Raka 2002

Ilustrasi IV.8. Bangunan Perumahan

Akan tetapi, dengan membaiknya tingkat ekonomi masyarakat, kini telah banyak dibangun rumah baru dengan konstruksi beton dan menggunakan bahan bangunan buatan.

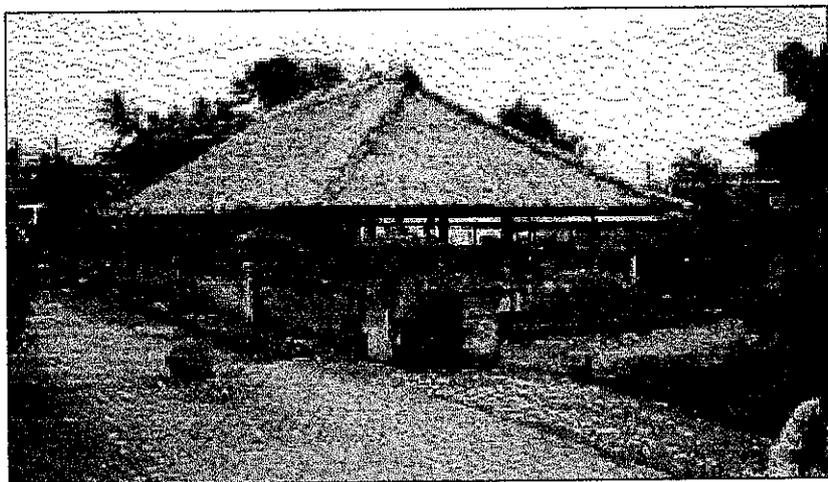


Foto: Raka 2002

Ilustrasi IV.9. Bangunan Umum

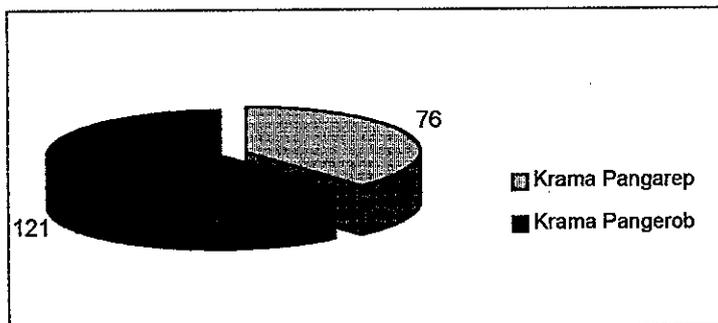
4.3.3. Lingkungan Sosial Budaya *Desa Adat* Penglipuran.

1. Kependudukan

Menurut catatan *Kelihan Dinas* (pejabat pemerintahan di bawah Lurah yang khusus menangani administrasi pemerintahan = Kepala Lingkungan), jumlah penduduk *Desa Adat* Penglipuran sampai bulan Juli 2002 adalah sebanyak 832 orang terdiri dari 425 orang laki-laki dan 407 orang perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 197 KK yang terdiri dari 76 KK dengan status *Pangayah / Krama Pangarep* (KK yang menghuni *karang kerti* berstatus sebagai anggota tetap dengan hak dan kewajiban penuh dalam adat) dan 121 KK *Pangayah / Krama Roban* (KK atau warga dengan status anggota sementara yang keberadaannya di *Desa Adat* Penglipuran menjadi tanggung-jawab salah satu *Pangayah Pangarep*). *Pangayah / Krama Roban* juga tinggal di *karang kerti* tetapi dengan status menumpang.

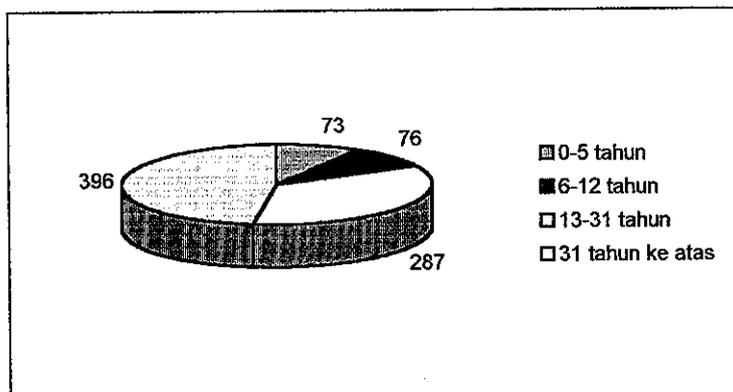
Struktur penduduk menurut umur adalah: 0 – 5 th = 73 orang, 6 – 12 th = 76 Orang, 13 – 30 th = 287 orang dan 31 th keatas sebanyak 396 orang. Ini berarti penambahan penduduk cukup besar terjadi dalam periode tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an. Dengan demikian *Desa Adat* Penglipuran saat ini tengah menghadapi ledakan angkatan kerja baru karena sebagian besar penduduknya berada dalam usia produktif. Apabila perekonomian penduduk tetap bertumpu pada sektor pertanian maka dengan luas areal yang terbatas akan terjadi tekanan yang cukup berat bagi lingkungannya.

Tingkat pendidikan penduduk cukup baik terlihat dari struktur penduduk menurut pendidikan sebagai berikut: tamat SD = 426 orang, tamat SLTP = 91 orang, tamat SLTA = 156 orang dan tamat Perguruan Tinggi = 68 orang.



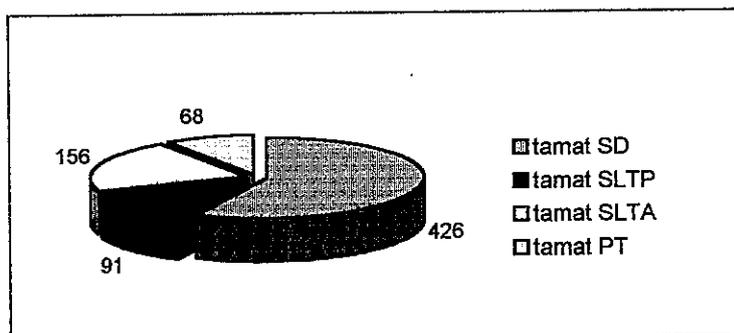
sumber: Kelihan Dinas Desa Penglipuran

Ilustrasi IV.10. Perbandingan status penduduk menurut adat



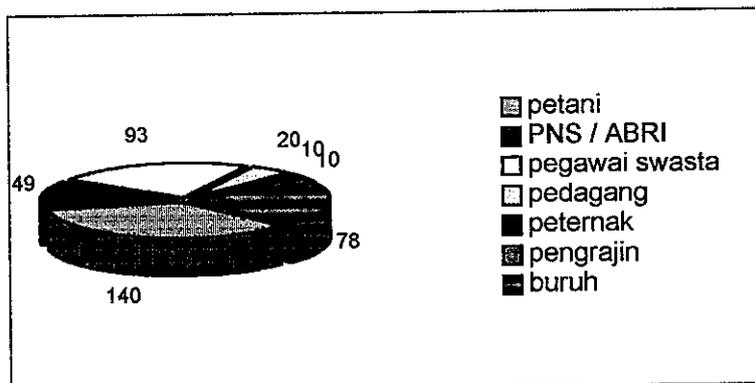
sumber: Kelihan Dinas Desa Penglipuran

Ilustrasi IV.11. Struktur penduduk menurut umur



sumber: Kelihan Dinas Desa Penglipuran

Ilustrasi IV.12. Struktur penduduk menurut pendidikan



sumber: Kelihan Dinas Desa Penglipuran

Ilustrasi IV.13. Struktur penduduk menurut pekerjaan

Dilihat dari jenis pekerjaan terdapat banyak pekerjaan di luar pertanian yang dilakukan penduduk yang nampak dari data sebagai berikut: petani = 140 orang, PNS / ABRI = 49 orang, Karyawan Swasta = 93 orang, buruh = 78 orang, pedagang = 20 orang, peternak dan perajin masing-masing 10 orang.

2. Sistem Kekrabatan

Selama penelitian terungkap bahwa sebagian besar penduduk *Desa Adat* Penglipuran terikat hubungan darah akibat perkawinan yang banyak dilakukan sesama warga sedesa. Bagi laki-laki yang menikahi gadis dari klen / keluarga-asal yang berbeda, maka dia tetap terikat dalam hak dan kewajibannya pada lingkup kekerabatan keluarga-asalnya yang disebut dengan istilah *Dadia*. Sedangkan bagi wanita yang menikah dengan klen / keluarga-asal yang berbeda akan dengan sendirinya mengikuti keluarga-asal suaminya. Perkawinan dan pertalian garis keturunan bagi masyarakat *Desa Adat* Penglipuran adalah sesuatu yang *tenget* sehingga sangat ditaati dan dihormati. Beristri lebih dari satu orang dianggap tabu, terbukti dengan adanya *karang memadu* sebagai tempat pengucilan bagi mereka yang melanggar. Bagi warga masyarakat yang beristri lebih dari satu menurut *awig-awig* (peraturan tertulis) dan *drestha* (adat kebiasaan tak tertulis), harus pindah dari *karang kertinya* ke *karang memadu*, hak dan kewajibannya sebagai Krama *Desa Adat* Penglipuran dicabut. Di *karang memadu* mereka akan dibuatkan rumah oleh warga desa tapi yang bersangkutan tidak boleh (atau dengan sendirinya akan merasa malu) melewati jalan umum, masuk ke Pura dan mengikuti kegiatan adat.

Hal lain yang terungkap adalah ternyata penduduk *Desa Adat* Penglipuran bersifat sangat *egaliter*. Seluruh penduduk seolah-olah sebuah keluarga besar tanpa

perbedaan strata sosial seperti halnya sistem kasta dalam masyarakat Hindu umumnya.

3. Sistem Perekonomian

Awalnya perekonomian penduduk bertumpu pada sektor pertanian (sawah atau ladang) dengan hasil utama padi, jagung, kopi, cengkeh dan palawija. Seperti halnya dengan tanah pekarangan, lahan pertanian di dalam areal *Desa Adat* Penglipuran dikuasai oleh *Desa Adat* sedangkan penghuni atau penggarap hanya memperoleh hak-guna-pakai dengan istilah *nanggap*. Para *penanggap* disebut sebagai *Pangayah Ngarep* atau *Krama Pangarep* yang diikat dengan kewajiban-kewajiban tertentu oleh *Desa Adat*. Pandangan bahwa dalam lahan pertanian terdapat sesuatu yang *tenget* masih nampak jelas dengan adanya upacara ritual sejak mulai mengolah lahan sampai dengan memanen hasil pertanian, adanya upacara ritual khusus untuk tumbuh-tumbuhan setiap enam bulan sekali yaitu pada hari Sabtu *Kliwon Wuku Wariga* menurut penanggalan Bali (Jawa?); adanya pandangan bahwa tanah adalah *stananya* (tempat bersemayamnya) *Dewi Pertiwi* dan tanaman pangan (padi) adalah milik *Dewi Seri* sebagai saktinya *Dewa Wisnu* dalam menebar kemakmuran di Bumi. Bahkan dalam *awig-awig Desa Adat* Penglipuran dicantumkan tentang larangan untuk memperjual-belikan lahan pertanian kepada orang di luar warga *Desa Adat* Penglipuran.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan pertanian maka sebagian penduduk beralih ke sektor lain seperti: PNS, sektor swasta dan sejak pertengahan 1990-an berkembang pula sektor pariwisata

4. Sistem Pemerintahan *Desa Adat*

Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh *Jro Kelihan Adat* dan sebagaimana tertuang dalam *awig-awig (Palet 2: Indik Prajuru, Paos14 ngantos Paos 18 / Bab II : Tentang Kepemimpinan, Pasal 14 sampai dengan 18)*, sistem pemerintahan *Desa Adat* Penglipuran disusun dalam satu Lembaga Kepemimpinan Adat yang disebut *Prajuru Desa Adat Penglipuran* atau sering pula disebut *Paduluan* (mereka yang ada di hulu). *Prajuru Desa Adat* ini terdiri dari dua bagian yakni *Kanca Roras* (semacam majelis perwakilan beranggota 12 orang) dan *Bendesa* atau *Kelihan Adat* (yang dipilih dan dituakan dalam adat).

a. *Kanca Roras*

Kanca Roras (dari kata *ka-anca* = ditugasi dan *roras* = *rolas* = duabelas), merupakan kelompok orang-orang yang telah senior dalam adat sehingga sering pula disebut sebagai *tuha-tuha* atau *tetua adat*. *Kanca roras* ini berfungsi menyerupai majelis perwakilan atau badan legislatif dan pembentukannya berdasarkan urutan ke-senior-an yang disebut sebagai sistem *ulu-apad* (*ulu* = hulu atau atas dan *apad* = hilir atau bawah).

Tentang *ulu-apad* ini penting untuk diketahui lebih jauh karena membuktikan adanya kepemimpinan dan regenerasi yang partisipatif demokratis. Seperti telah disinggung sebelumnya, warga atau *Krama Desa Adat* Penglipuran terdiri dari warga tetap / penuh yang tetap jumlahnya yaitu 76 KK disebut sebagai *Pangayah* atau *Krama Pangarep* (*pang-arep* = mereka yang ada di depan) dan selebihnya adalah warga tidak tetap (jumlahnya bisa berubah-ubah) yang disebut dengan *Pangayah / Krama Roban* (*rob-an* = menjadi tanggungan orang lain). Setiap terjadi pernikahan maka keluarga yang

baru terbentuk tersebut, langsung tercatat menjadi *Pangayah Roban*. Apabila suatu saat orang tua atau saudara dekatnya yang berstatus *Pangayah Pangarep* gugur hak dan kewajibannya dalam *Desa Adat* sesuai dengan ketentuan dalam *awig-awig*, maka keluarga baru tersebut dapat ditunjuk menjadi pengganti, yang disebut dengan "*panyeledihi*". Apa bila kemungkinan kesempatan untuk menjadi *panyeledihi* tidak memungkinkan, secara tidak langsung yang bersangkutan harus berupaya untuk mencari penghidupan di luar desanya (seperti menyiratkan konsep keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan).

Krama Pengarep yang berjumlah 76 KK (tetap) tersebut, masing-masing telah memiliki nomor urut, dari 1 (satu) sampai dengan 76 (tujuh puluh enam) sesuai dengan urutan waktu dilangsungkan perkawinannya, dimana nomor urut 1 disebut sebagai *ulu* / paling senior, dengan status paling tinggi. Pada saat *pasangkepan purnama* (rapat rutin bulan purnama) di *Bale Agung*, *Krama Pengarep* duduk berjejer, sepasang-sepasang, berhadap-hadapan, mulai dari nomor satu dan dua paling di hulu (utara), diikuti oleh dua nomor berikutnya, dan seterusnya sampai pada nomor 75 dan 76 paling di hilir (selatan). Bila salah seorang dari urutan tersebut tidak hadir karena gugur hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam *awig-awig* (disebut *ngelad makrama* = lepas) maka: nomor urut berikutnya berhak mengambil alih nomor urutnya dengan bergeser ke atas satu tingkat, dan demikian pula seterusnya nomor-nomor di bawahnya bergeser ke atas satu tingkat. Kemudian bagi yang *ngelad makrama* (gugur) wajib menunjuk pengganti (*panyeledihi*) yakni salah seorang anak laki-laki atau kerabat dekat laki-laki. (biasanya anak tertua laki-laki). Melalui upacara ritual tertentu di *Bale Agung* yang ditunjuk sebagai

penyeledihi diwisuda sebagai *Krama Pangarep* baru (disebut *ngawit makrama* = mulai bermasyarakat) dan mendapat nomor urut terakhir yaitu 76. Proses *ngawit makrama* dan *ngelad makrama* ini berjalan terus, yang dikoreksi pada setiap *pasangkepan* yang diadakan setiap bulan purnama, bertempat di *Bale Agung* di halaman tengah *Pura Penataran*.

Gugur hak dan kewajibannya sebagai *Krama Pangarep* diatur dalam *awig-awig* (*Palet 2 : Paos 14 : 3* atau Bab 2 : pasal 14 .3) yakni apabila: anak bungsunya telah menikah atau salah seorang cucunya telah menikah atau ketentuan lain sesuai dengan kesepakatan dalam rapat (*pararem sajeroning pasangkepan*).

Mereka yang telah berada pada nomor urut 1 sampai dengan 12 disebut sebagai *Kanca Roras*, sedangangkan dari nomor 13 sampai dengan 76 disebut *Krama Palitan* (*pa-alit-an* = kelompok yang lebih muda). Adapun rincian sebutan sesuai *Awig-awig Desa Adat Penglipuran* (*Palet 2 : Paos 14 : 2*) sebagai berikut:

1. Jro Bayan Mucuk / Duwuran
2. Jro Bayan Nyoman
3. Jro Bahu Duwuran
4. Jro Bahu Nyoman
5. Jro Singgukan Duwuran
6. Jro Singgukan Nyoman
7. Jro Cacar Duwuran
8. Jro Cacar Nyoman
9. Jro Balung Duwuran
10. Jro Balung Nyoman
11. Jro Pati Duwuran
12. Jro Pati Nyoman.

(Catatan: *Jro* = panggilan kehormatan; *bayan* berasal dari kata *wayah-an* = tertua; *mucuk* = pucuk = puncak; *duwur-an* = lebih di atas; *nyoman*) berasal) dari kata *nom-an* = lebih muda)

Kanca Roras ini berfungsi sebagai wakil dari seluruh warga / *krama* dan berwenang untuk: membuat peraturan adat, memberi keputusan atas sengketa, memimpin dan mengesahkan segala penyelenggaraan kegiatan adat dan agama

Dengan sistem *ulu-apad* ini setiap *krama* berpeluang menjadi pemimpin dengan cara meniti karir dari bawah dengan kepastian hukum, kepastian hak dan kewajiban pada setiap tingkatannya.

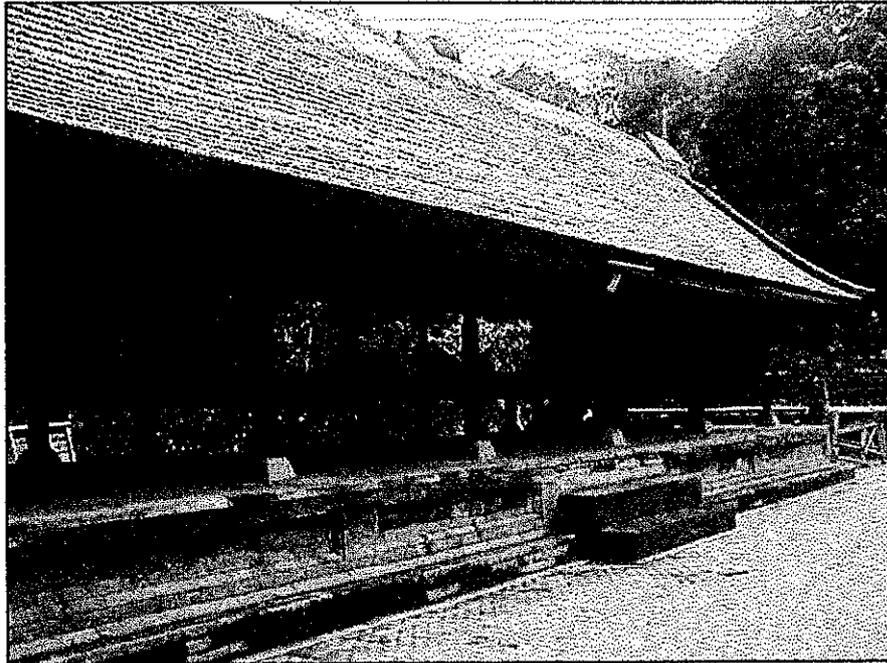


Foto: Raka 2002

Ilustrasi IV.14. *Bale Agung* tempat *sangkep* (rapat) dan *matiti-krama* (meniti karir adat)

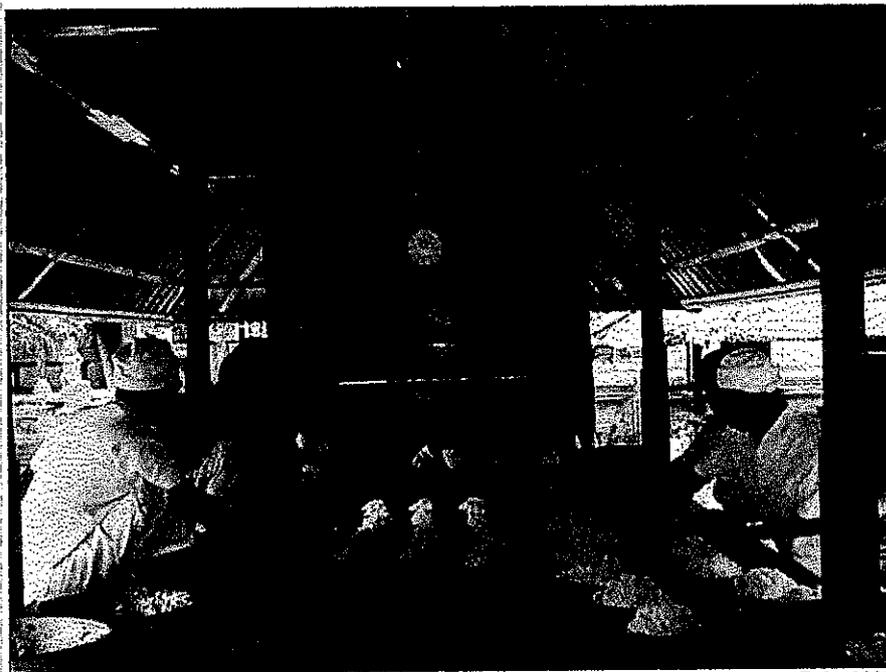
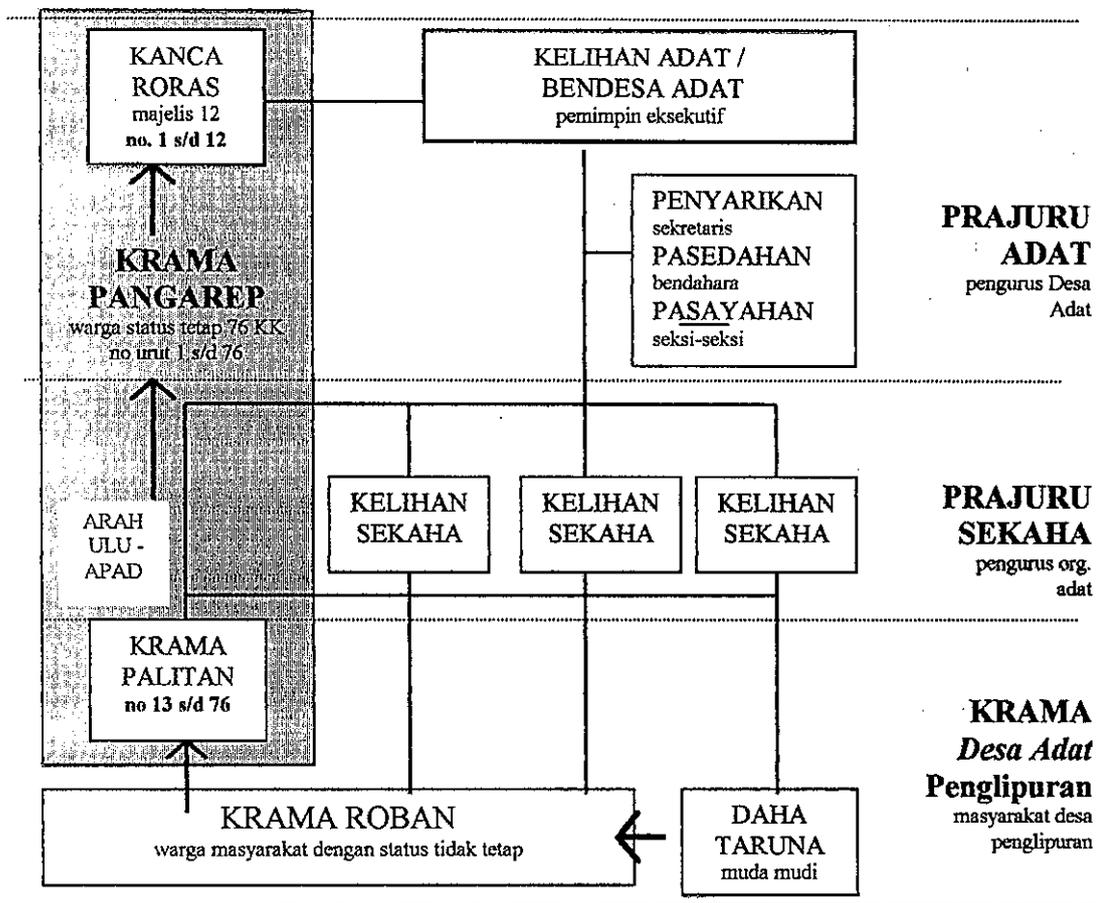


Foto: Raka 2002

Ilustrasi IV.15. *Jro Bayan Mucuk* (pakaian putih kanan) dan *Jro Bayan Nyoman* (pakaian putih kiri) sedang mempersiapkan perembahyangan purnama



(sumber: dirangkum berdasarkan informasi dari informan kunci dan hasil observasi lapangan-pen.)

Ilustrasi IV.16. Model Pemerintahan *Desa Adat* Penglipuran

b. Kelihan Adat

Kelihan Adat (berasal dari kata *kelih-an* = lebih tua), merupakan pejabat eksekutif yang pengangkatannya dilakukan melalui pemilihan dalam suatu rapat umum (*kajudi ring paruman desa*) oleh karenanya sering pula disebut *Bendesa* (dijadikan oleh desa). *Kelihan Adat* dalam melakukan tugasnya hanya apabila telah mendapat mandat dari *Kanca Roras*. Dalam pelaksanaan tugasnya *Kelihan Adat* bertanggungjawab kepada seluruh warga melalui *Kanca Roras*. Untuk kelancaran tugas-tugasnya *Kelihan Adat* dibantu oleh seorang atau lebih *Pangliman* (wakil), *Penyarikan* (juru tulis atau sekretaris),

Pasedahan (Bendahara), dan *Pesayahan* (seksi-seksi). Semua staf pembantu ini ditunjuk oleh *Kelihan Desa* atas persetujuan *Kanca Roras*

c. **Daha-Taruna**

Disamping *Kanca Roras* dan *Kelihan Adat*, terdapat beberapa keorganisasian adat di bawah *Desa Adat* yang disebut *sekahaseperti*: *Sekaha Gong* (organisasi gambelan), *Skaha Baris* (kelompok tarian sakral), *Sekaha Manyi* (kelompok pemanen), *Sekaha Nandur* (kelompok menanam padi) dan *seka-seka* yang lain. Salah satunya yang penting dan sangat menentukan dalam proses regenerasi pemerintahan adat adalah organisasi muda-mudi yang disebut dengan *Sekaha Daha-Taruna* (*daha* = pemudi atau gadis dan *taruna* = pemuda). *Sekaha Daha-Taruna* ini walaupun bersifat independen (berhak mengatur rumah tangganya sendiri) namun tetap tunduk kepada *awig-awig* dan *drestha*, serta bertanggung-jawab kepada *Prajuru Desa Adat Penglipuran*. *Sekaha Daha-Taruna* ini selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan adat dan agama. Bahkan ada kegiatan adat dan agama yang hanya boleh dilakukan oleh para *daha-teruna* seperti : membuat dan menyelenggarakan upacara kematian dan membuat atau melakukan pemujaan pada Pura tertentu. *Sekaha Daha-Taruna* dipimpin oleh seorang *Kelihan* yang dibantu oleh beberapa orang staf yang dibentuk melalui suatu pemilihan secara terbuka.

Yang menarik pula dalam kepengurusan *Sekaha Daha-Taruna* ini ialah adanya seksi lingkungan hidup yang diistilahkan dengan *pesayahan pengangsiran* yang bertanggungjawab dalam mengawasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk kelestarian lingkungan hidup.

5. Sistem nilai budaya

Seluruh penduduk *Desa Adat* Penglipuran beragama Hindu dan berpegang teguh pada tradisi yang mereka warisi secara turun-tumurun. Sesuai dengan ajaran kebenaran Hindu, sebagaimana sering disebut oleh informan kunci dalam setiap wawancara, menyatakan hal-hal yang mengandung nilai-nilai budaya yang antara lain dapat disarikan sebagai berikut.

- Kehidupan manusia di dunia bersifat sementara, tidak kekal dan penuh dengan penderitaan sehingga harus dijalani apa adanya sambil terus berusaha untuk memperbaiki kehidupan dengan melaksanakan *Tri Kaya Parisudha* (tiga kegiatan yang bersih dan benar) yaitu *Manacika* (berpikir), *Wacika* (berbicara / berkomunikasi) dan *Kayika* (berbuat). Ditegaskan bahwa setiap gerak pikiran perkataan dan perbuatan adalah doa yang sesungguhnya. Dengan jalan selalu mengarahkan dan menjaga agar pikiran, perkataan dan perbuatan tetap bersih dan suci diharapkan seseorang akan dapat mencapai tujuan hidup manusia yakni *Jagdhitam* (kebahagiaan dan kesejahteraan duniawi) dan *Moksartham* (kebahagiaan abadi surgawi yang terlepas dari ikatan tumimbal lahir / reinkarnasi).
- Tidak hanya manusia, alam dengan segala isinyapun dipandang sebagai suatu yang bersifat sangat sementara, tidak kekal bahkan hanya sebuah *maya* (bayangan atau tipuan) sehingga alam semesta ini diistilahkan sebagai *mayapada* (alam bayangan). Dicontohkan dengan sangat sederhana oleh *Jro Bayan Nyoman* bahwa: "Mengapa makanan yang enak biasanya menyebabkan sakit tetapi makanan yang rasanya pahit atau asam justru menjadi obat yang menyehatkan"? Selanjutnya juga dikatakan bahwa' adalah sebuah kesalahan bila manusia terlalu menggantungkan hidupnya dengan harta dunia sehingga harus menguras isi alam. Alam dengan segala makhluk yang menghuninya diciptakanNya dengan hak hidup yang sama. Seyogyanya manusia hanya mengambil sesuatu yang diperlukan dari alam secukupnya.
- Alam (Bhuwana Agung) dan diri manusia (Bhuwana Alit) adalah analog. Keyakinan ini didasari oleh ajaran dalam Hindu bahwa Alam dan manusia berasal dari satu sumber yakni Dia Yang Maha Pencipta. Alam dan manusia terbentuk dari unsur-unsur yang sama yang disebut dengan Panca Maha Bhuta yaitu: apah (zat cair), pertiwi (zat padat), bayu (gas), teja (energi) dan akasa (ruang atau media). Dari keyakinan ini kemudian muncul pemahaman tentang Tattwamasi (aku adalah engkau) yang tidak saja berlaku diantara manusia tetapi terhadap segala isi alam. Apapun perlakuan manusia terhadap alam maka alampun akan memperlakukan manusia dengan cara yang sama.

- Hubungan manusia dengan alam diibaratkan bagai hubungan janin dengan ibunya yang lazim diistilahkan dengan "*manik ing cacupu*" (janin dalam rahim). Kalau saja manusia mau menyadari kodratnya sesungguhnya alam telah menyediakan kebutuhannya secukupnya

Adanya pemahaman ajaran agama Hindu dan kesetiaan pada tradisi seperti terungkap di atas akhirnya menjadi suatu sistem religi. Sesuai dengan pendirian Kuncaraningrat (2000: 145) sistem religi bercirikan komponen-komponen: adanya emosi keagamaan yang menjadikannya religius; adanya sistem keyakinan kepada Tuhan dan alam gaib; adanya sistem ritus sebagai upaya menata hubungan yang harmonis; dan adanya kelompok sosial sebagai pendukung. Dari sistem religi inilah kemudian yang melahirkan sistem nilai budaya masyarakat dan selanjutnya membentuk sikap mental individunya. Kembali mengikut pandangan Kuntjaraningrat (2000: 6) sistem nilai budaya adalah konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran masyarakat tentang sesuatu yang dianggap paling bernilai, dan sikap mental adalah keadaan dalam jiwa dan diri individu untuk berreaksi terhadap lingkungan (baik lingkungan sosial maupun lingkungan alamiahnya). Sistem nilai budaya masyarakat *Desa Adat Penglipuran* adalah kearifan untuk selalu berpandangan bahwa: keharmonisan hubungan dengan Sang Pencipta, dengan sesama dalam masyarakat dan dengan alam sekitar adalah sesuatu yang *tenget* sebagaimana diejawantahkan dalam penerapan konsepsi *Tri Hita Karana* dan *Tri Mandala*. Sedangkan sikap mental individunya juga merupakan kearifan untuk memberi penghargaan terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alamiah sebagai suatu yang *tenget*; suatu yang harus dijaga dan dihormati dan dikomunikasikan melalui simbol-simbol.

4.4. Pembangunan *Desa Adat* Penglipuran.

Dalam satu dasa warsa terakhir terdapat dua model pembangunan yang terjadi di *Desa Adat* Penglipuran yaitu pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat secara swakarsa dan swadana dan pembangunan yang digiatkan oleh pihak di luar *Desa Adat* Penglipuran, dalam hal ini oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah atas persetujuan pemerintah (selanjutnya disebut pembangunan oleh pemerintah). Ke dua model pembangunan ini harus dilihat secara terpisah karena menunjukkan pijakan yang berbeda dalam perencanaan maupun dalam implementasinya.

4.4.1. Perencanaan Pembangunan

1. Perencanaan Pembangunan oleh masyarakat

Perencanaan pembangunan oleh masyarakat terutama yang menyangkut kepentingan bersama dalam *Desa Adat*, umumnya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Mulai dari pengenalan masalah, perumusan tujuan, penilaian situasi, pemilihan alternatif, kajian dampak sampai dengan pengambilan keputusan akhir selalu lewat musyawarah dan mufakat dalam *paruman desa* (rapat desa). Dalam *paruman desa* ini semua aspirasi digali dan semua pendapat (*pasuara*) wajib dipertimbangkan. Keputusan rapat (*pararem*) diambil setelah diuji dan diyakini kebenarannya melalui *lokika-ilikita-ngunadika* (logika, pembuktian dan persesuaian dengan pengalaman) berdasarkan ketentuan dalam *awig-awig* dan *drestha*. Sehingga pembangunan yang direncanakan adalah tanggungjawab dan milik bersama. Hal ini nampak jelas, baik dalam rencana pembangunan fisik (pembangunan dan perbaikan tempat ibadah atau Pura, pembangunan saluran irigasi, pengadaan air bersih) maupun pembangunan non fisik (pengaturan

kunjungan wisatawan, penyusunan *awig-awig*, penetapan bentuk dan prosedur ritus adat dan keagamaan).

Perlu ditambahkan bahwa dalam pandangan masyarakat *Desa Adat* Penglipuran hal-hal seperti: melaksanakan *paruman* atau *pasangkepan*, *pasuara*, *pararem* adalah sesuatu yang patut di-*tenget*-kan. *Parum* atau *sangkep* (rapat) dilaksanakan di *Bale Agung* yang bertempat di *Jaba Tengah* (halaman tengah) *Pura Penataran*. Dalam mengikuti kegiatan *parum* atau *sangkep* harus berpakaian adat yang rapi (minimal memakai destar dan *selempot* yakni selendang yang diikatkan dipinggang). Sebelum *paruman* dimulai dilakukan ritus tertentu dan disertai dengan sembahyang bersama. Dalam mengeluarkan pendapat (*pasuara*) juga harus mengikuti ketentuan seperti diatur dalam *awig-awig*. Misalnya disebutkan "*tan wenang masuara gora patikacuh*" yang artinya tidak boleh berkata-kata kasar dan tak menentu. Pelanggarnya akan dikenai sanksi berupa upacara *prayascita* yakni upacara pembersihan baik tempat maupun *krama* yang hadir. Demikian pula *pararem* atau keputusan rapat adalah sesuatu yang harus dipatuhi, dihormati dan dijaga kebenaran pelaksanaannya.

Dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan sendiri, kegiatan musyawarah dan mufakat selalu ada walaupun pada batas skala keluarga dekat dan tetangga. Terutama dalam pembangunan tempat tinggal / rumah, biasanya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan upacara tertentu serta harus sepengetahuan *Prajuru Adat*. Namun dari hasil observasi ternyata pula belakangan ini telah banyak bangunan – bangunan baru yang dibuat oleh sebagian masyarakat yang meninggalkan kaedah-kaedah tradisional, seperti dalam hal penggunaan ukuran dan material bangunan. Banyak bangunan yang

dibuat dengan menggunakan atap seng atau genting dan menggunakan bataco sebagai dinding. Sesuai informasi yang diperoleh bangunan-bangunan ini mulai muncul sejak 10 tahun terakhir akibat meningkatnya perekonomian masyarakat sebagai hasil pembangunan bidang pertanian, transportasi, pariwisata dan sektor lainnya

2. Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah

Kegiatan pembangunan oleh pemerintah di *Desa Adat* Penglipuran secara menonjol mulai dilaksanakan sejak pertengahan tahun 1990-an dengan pembuatan Rencana Tata Ruang Desa Penglipuran yang dikerjakan oleh Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta selaku konsultan. Perencanaan tersebut mulai dikerjakan tahun 1992 dan disahkan tahun 1993 bersamaan dengan penancangan Desa Penglipuran sebagai Desa Wisata Terpadu. Secara garis besar rencana tata ruang tersebut, sesuai dengan data yang diperoleh di Kantor Kelurahan Kubu, memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Lingkup perencanaan.

Desa Penglipuran diarahkan untuk dijadikan Desa Wisata Terpadu. Untuk itu perencanaan tata ruang dan bangunannya meliputi:

- Rencana Tata Ruang Makro yang meliputi keseluruhan areal desa beserta lingkungannya.
- Rencana Tata ruang Meso yang meliputi keseluruhan desa dengan penekanan pada elemen-elemen terpentingnya.
- Rencana Tata Ruang Mikro meliputi areal strategis dengan fasilitas wisata yang bersifat strategis.

b. Produk Perencanaan

▪ Rencana Tata Guna Lahan dan Tata Guna Bangunan

Tata Guna Lahan dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi penggunaan lahan dengan tujuan: untuk menjaga, melestarikan dan memperkuat citra kawasan; dan untuk mengoptimalisasikan fungsi-fungsi kawasan.

Adapun Tata Guna Lahan Desa Pengelipuran disusun berdasarkan sistem zonasi dan penggunaan untuk: hunian, kegiatan keagamaan, fasilitas umum, pertanian dan perkebunan, dan areal alami. Secara keseluruhan mengikuti pola pembagian sebagai berikut:

- Lingkungan Alami meliputi: yang tidak dibudidayakan (alami asli seperti: hutan, sungai dan jurang), dan yang dibudidayakan (sawah, ladang atau kebun).
- Lingkungan Buatan meliputi penggunaan untuk publik (keagamaan, umum non-pariwisata dan umum pariwisata) dan penggunaan privat (hunian komersial dan hunian non-komersial)

▪ Sistem Jaringan

Sistem Jaringan yang direncanakan meliputi: jaringan listrik, jaringan air bersih dan jaringan air kotor / hujan. Sistem Jaringan direncanakan dengan maksud agar tercapai penggunaan kawasan secara optimal namun tidak mengganggu penampakan/penampilan lingkungan sebagai Desa Wisata.

▪ Sistem Sirkulasi

Sistem Sirkulasi yang direncanakan meliputi sirkulasi: kendaraan, pejalan kaki dan sistem perparkiran. Dalam perencanaannya mempertimbangkan agar sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan bersifat

tepat guna / tidak berlebihan , menghindarkan terjadinya *cross* pejalan kaki dan kendaraan, tempat parkir yang efektif dan efisien tanpa merusak citra kawasan.

- **Konservasi**

Rencana Tata Ruang yang dibuat tidak semata mengarah pada perkembangan, melainkan juga memberi batas seberapa jauh perkembangan tersebut perlu dan layak dilakukan. Untuk itu ditetapkan beberapa patokan preservasi dan konservasi terkait dengan: Lingkungan terbangun untuk menjaga pola desa tradisional dan kesinambungan historis serta kultural; Lingkungan alami untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan serta untuk menjaga variasi lingkungan dan penampakan visual.

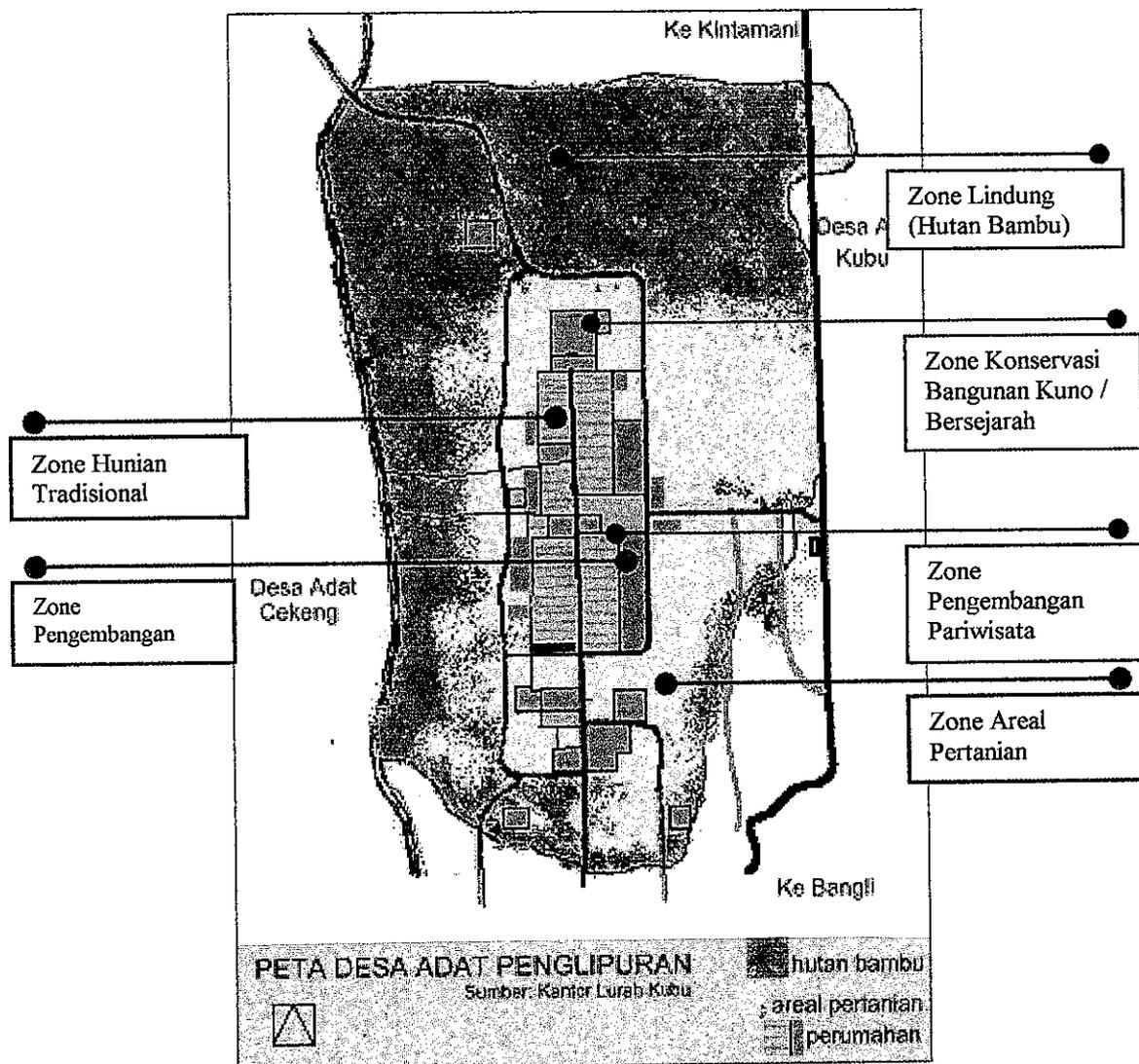
Preservasi dan konservasi ditujukan terhadap: Pola desa (pola pekarangan, facade, jalur publik / jalan dan lingkungan); Tata guna lahan (seperti: sawah, ladang dan bangunan); Obyek terpilih (meliputi: bangunan dan situs purbakala dan peninggalan sejarah).

- **Arahan Implementasi Teknis.**

Rencana Tata Ruang Desa Penglipuran dilengkapi pula dengan arahan implementasi teknis untuk keperluan pelaksanaannya. Arahan implementasi teknis ini meliputi : Arahan Peruntukan Lahan; Arahan Arsitektural dan Arahan Perijinan dan Kelembagaan.

Dengan mencermati Rencana Tata Ruang ini, hal yang perlu dicatat adalah: telah ada upaya sungguh-sungguh dari pihak perencana (FT Universitas Gajah Mada) untuk mengadopsi nilai-nilai budaya yang ada di *Desa Adat* Penglipuran.

Hanya saja dalam langkah selanjutnya partisipasi dan potensi masyarakat tidak nampak dilibatkan. Misalnya tidak terlihat adanya materi perencanaan tersebut yang dikukuhkan dalam *awig-awig*, atau sebaliknya dalam perencanaan tersebut tidak sepenuhnya mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat seperti tercantum dalam *awig-awig*.



Ilustrasi IV.17. Rencana Pemitakatan dalam Rencana Tata Ruang Desa Wisata Penglipuran

4.4.2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan

1. Pelaksanaan dan pengelolaan hasil pembangunan oleh masyarakat

a. Umum

Sebagaimana halnya kegiatan perencanaan pembangunan, dalam pelaksanaan dan pengoperasian / pengelolaan hasil pembangunan yang menyangkut kepentingan *Desa Adat* tidak ada yang menunjukkan dampak negatif terhadap lingkungan (sosial maupun alamiah). Nampak adanya rasa memiliki yang kuat, yang ditunjukkan dengan adanya upaya menjaga, memelihara dan merawat semua fasilitas desa yang ada sehingga nampak bersih dan berfungsi dengan baik

b. Individu

Pelaksanaan pembangunan yang berkait dengan kepentingan individu, khususnya dalam pembangunan tempat tinggal nampak ada perubahan yang mencolok. Bangunan perumahan tradisional (rumah lama) yang kemudian disebut sebagai rumah inti, memang telah diatur dalam *awig-awig* untuk tidak boleh dirubah. Namun karena penambahan jumlah anggota keluarga atau penambahan jumlah KK dalam satu pekarangan, terjadi pembangunan rumah-rumah baru yang belum diatur dalam *awig-awig*. Sehingga tumbuh rumah-rumah baru dengan menggunakan material modern asal pabrik. Bangunan-bangunan baru ini walaupun telah memenuhi kaedah kesehatan, tetapi tidak lagi mengikuti kaedah tradisional sehingga setidaknya secara visual nampak kontras dengan lingkungannya. Terdapat pula pembangunan perumahan yang dilakukan di luar *karang kerti*.

2. Pembangunan oleh pemerintah

Dari hasil wawancara hampir seluruhnya menyatakan tidak tahu ketika ditanya tentang Rencana Tata Ruang yang telah pernah di buat. Bahkan *Desa Adat* juga tidak memiliki hasil perencanaan tersebut secara lengkap. Ini berarti hasil perencanaan tersebut hanya menjadi pedoman dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Pembangunan *Home Stay* (Rumah Tinggal yang disewakan kepada wisatawan), Gedung Serba Guna (rencananya untuk tempat atraksi pariwisata) Kios Souvenir, Jalan Lingkar Desa, Jalan Setapak, Pusat Pengolahan Bambu dan saluran drainasi memang sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Walaupun akhirnya pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat, tampak ada fasilitas tersebut yang telah rusak dan belum diperbaiki.



Foto: Raka 2002

Ilustrasi IV.18. Pusat kerajinan bambu yang kurang berfungsi

Disamping rasa memiliki yang tipis (karena tidak sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya) juga biaya yang diperlukan cukup besar. Masyarakat menganggap sumber biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas tersebut adalah dari perolehan kunjungan wisatawan. Sementara pembagian hasil

dari kepariwisataan ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat sebagai kurang adil, sehingga sempat menimbulkan keresahan (Bali Post 28/02/2002)

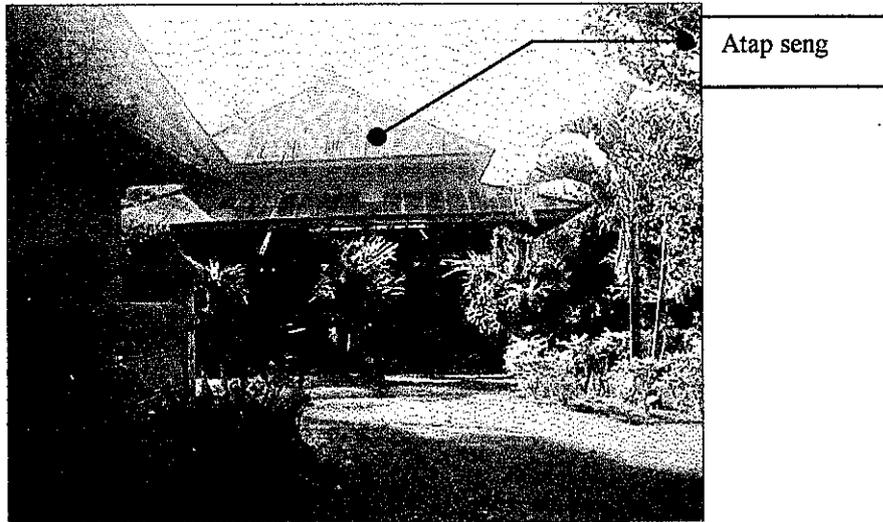


Foto: Raka 2002

Ilustrasi IV.19. Gedung Serba Guna beratap "seng", kontras dengan lingkungan

BAB V

TENGET, PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembahasan mengenai *tenget*, pembangunan dan pembangunan berkelanjutan pada bab ini akan dilakukan secara bertahap terhadap aspek-aspek yang diteliti sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pembahasan dilakukan melalui proses analisa dan diskripsi kemudian proses induksi untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Materi yang akan dibahas adalah hasil-hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan relevansi terhadap tujuan penelitian. Pembahasan akan dilakukan mengikut **kerangka analisa** (lihat: 2.4.3.) baik menyangkut tiga kerangka hubungan manusia dalam mengelola alam, pengaruh pembangunan maupun prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

5.1. *Tenget* tumbuh dan berkembang

Untuk mengetahui bagaimana *tenget* tumbuh, berkembang dalam pemahaman masyarakat diajukan pertanyaan-pertanyaan (menggunakan bahasa Bali dengan diberi ilustrasi agar mudah ditangkap) seperti: apa arti *tenget*?; apa saja yang termasuk *tenget*?; bagaimana sesuatu menjadi *tenget*?; bagaimana mengetahui sesuatu itu *tenget*?; dan apa manfaat *tenget*. Setiap pertanyaan kemudian dikembangkan sesuai dengan situasi pada saat wawancara atau diskusi. Jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut yang berindikasi ketakutan pada gejala alam, berlatar mitos atau berbau mistik digolongkan sebagai pemahan **mitis-pancosmis**; Jawaban yang menunjukkan gejala bahwa alam dan manusia terletak bersebrangan, dimana alam adalah obyek yang dapat diambil manfaatnya dan manusia sebagai

subyek penentu, dikelompokkan sebagai pemahaman **ontologis-antroposentris**; sedang kan untuk jawaban yang termasuk ke dalam pemahaman **fungsional-holistik** adalah yang menggambarkan kesetaraan alam dan manusia sebagai komponen alam yang saling berhubungan dan saling bergantung.

5.1.1. Pemahaman / pemaknaan *tengenet*.

Pada awalnya pembicaraan dengan informan kunci, ketika dilakukan wawancara berkenaan dengan pemahaman *tengenet*, hampir seluruhnya memberi jawaban yang berwarna mitis atau metafisis walaupun dalam cara yang berbeda. Seperti ungkapan-ungkapan: "*Dwaning wenten sane malinggih*" (karena 'ada' yang menempati); "*Dwaning wenten sane muwenang*" (karena ada yang empunya); atau ungkapan "*Yaning mamurug ngawinang keni sengkala*" (kalau dilanggar mengakibatkan celaka) dan pernyataan lain yang senada.

Pada pembicaraan lebih lanjut ternyata terlontar pula pemahaman yang menunjukkan tingkat ontologis-antroposentris bahkan fungsional-holistik seperti yang disampaikan oleh *Jro Bayan Nyoman*:

"Katengenetang punika dwa-ning wenten pikenoh ipun ring i manusa. Yaning tan mapikenoh sinah kasuwen-suwen ical tetget ipun"

"Di-*tengenet*-kan itu karena ada manfaatnya bagi manusia.

Kalau tidak ada manfaatnya jelas lama-lama akan hilang (nilai) *tengenet*-nya"

Pandangan ini menunjukkan adanya hubungan manusia dengan alam sebagai subyek yang memetik manfaat. Tetapi pada wawancara berikutnya, pandangan di

atas dilanjutkan dengan penjelasan yang menyiratkan pemahaman yang lebih holistik:

“Saluwiring daging jagate wantah paican Widhi ring i manusa.

Yen wenten paican Widhi sampunang numas akeh, ya cenik, ya lantang, ya sedeng ya pesaja.

Nika mawinan paican Widhine patut tengetang, mangdane langgeng pikenoh ipun”.

“Seluruh isi alam ini adalah karunia Tuhan bagi manusia.

Dengan karunia itu tidak perlu minta banyak, (tapi) kecil (sedikit), (jangka) panjang, secukupnya dan (dengan cara yang) benar.

Itulah sebabnya segala karunia Tuhan itu harus di-*tenget*-kan (dikelola dengan hati-hati), agar kemanfaatannya bisa berlangsung lama”.

Demikian pula penjelasan berulang-ulang yang disampaikan oleh *Kelihan Adat* dalam Bahasa Indonesia (beliau adalah orang yang berpendidikan, biasa mendampingi peneliti, wisatawan dan biasa memimpin warga / krama) seperti:

“Tenget itu ada dalam pikiran, sebagai batas wilayah antara yang boleh dan tidak boleh. Tenget mengandung makna filosofis atau konsepsi tentang sesuatu yang perlu dilestarikan. Tetapi penyampaiannya seperti disembunyikan dengan maksud tertentu, misalnya agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat”.

Beliau lalu memberi contoh:

“Disini hutan bambu disekitar desa oleh orang-orang tua juga di-tenget-kan. Menebang bambu hanya boleh pada hari tertentu menurut wariga (pengetahuan tentang perhitungan baik-buruknya hari – pen). Maksudnya adalah agar tanaman bambu itu tetap lestari. Keperluan bambu di desa ini banyak sekali. Pernah dahulu ada sebagian hutan bambu yang rusak karena ditebang sembarangan. Akibatnya mata-air dibawah sana mengecil pada musim kemarau. Padahal mata air itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Begitu pula banyak tanah yang tergerus atau longsor pada musim hujan”

Dengan pernyataan-pernyataan ini jelas menunjukkan adanya pemahaman yang fungsional-holistik. Akan tetapi ketika pandangan ini dikonfirmasi pada

wawancara informal dengan warga masyarakat secara acak, ternyata hanya satu orang dari delapan belas orang informan yang menunjukkan pemahaman yang senada, selebihnya lebih cenderung ke arah pemahaman mitis.

Dari kenyataan ini dapat dilihat bahwa pemahaman yang mendalam hanya dimiliki oleh tokoh yang memiliki kedudukan dan pengaruh di dalam *Desa Adat*. Tokoh tersebut, karena kedudukannya dalam adat dan pengetahuan yang dimiliki, biasanya menjadi 'tokoh panutan', seperti halnya *Jro Bayan* atau mereka yang telah duduk pada status *Kanca Roras*. Hal ini cukup beralasan karena, sebelum sampai pada status *Kanca Roras*, apalagi *Jro Bayan*, mereka telah belajar dan melakukan pemahaman secara bertahap dalam proses *ulu-apad* (perhatikan uraian tentang *Kanca Roras* dan *ulu-apad* pada 4.3.3: 4.a.). Lalu mengapa pemahaman sebagian besar masyarakat berada pada tingkat mitis? Kiranya pernyataan Kelihan Adat tentang ada sesuatu yang 'seperti disembunyikan' atau 'agar mudah dimengerti' adalah penjelasan yang dapat diterima. Pemahaman tersebut dikomunikasikan melalui mitos, legenda atau cerita metafisika, dapat dimaklumi karena bagi anak-anak, anak muda atau masyarakat pada umumnya, akan menjadi lebih menarik. Sedangkan pemahaman yang terlalu mendalam akan terasa berat, sementara setiap hari harus disibukkan dengan pencaharian mereka sebagai petani. Betapapun, dengan cara seperti itu, tujuan akhirnya telah tercapai yakni pemahaman yang fungsional holistik dapat diaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat.

5.1.2. Obyek-obyek *tenget*

Untuk menjawab pertanyaan tentang obyek apa saja yang dianggap *tenget*, jawaban yang diperoleh cukup berragam. Terdapat kelompok jawaban yang

mengarah kepada obyek kebendaan/fisik yang terkesan mengandung kekuatan magis, ada penunggunya, mengandung bahaya yang tidak diketahui seperti: kuburan, pohon besar yang ada di dekat kuburan, ulun pangkung (hulu sungai kecil), dan sudut-sudut tertentu dari hutan bambu di sekitar desa.

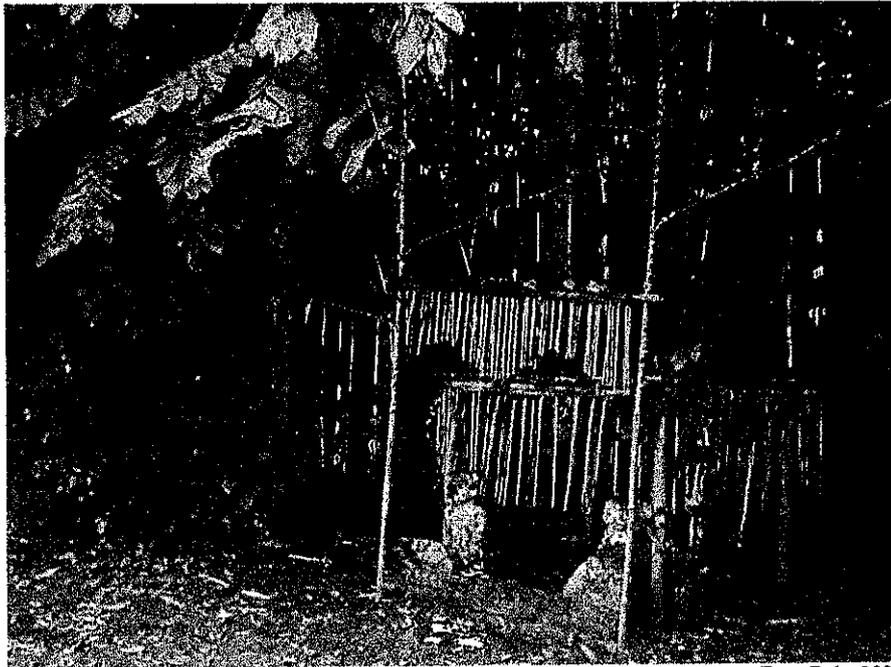


Foto: Raka 2002

Ilustrasi V.1. Salah satu obyek kebendaan yang ditunjuk sebagai *tenget*.

Dalam wawancara selanjutnya obyek *tenget* berkembang kepada wujud fisik benda yang mendatangkan kemanfaatan baik individu maupun masyarakat. seperti Suwena (warga) yang memberi contoh dengan latar metafisis:

Ring carik yadin tegal taler wenten tenget: tanah punika linggih Ibu Pertiwi, Toya punika peragayaan Bethara Wisnu, padi punika druwen Bethara Sri.

Nika mawinan tan dados anak ngulah laku di carik yadin di tegale. Yan mamurug keni pecaruan.

Di sawah atau ladang juga ada *tenget*: tanah itu 'stana' Ibu Pertiwi, air itu adalah 'jelmaan' Dewa Wisnu, padi adalah 'milik' Dewi Sri.

Itu sebabnya orang tidak boleh berprilaku tak senonoh di sawah atau di ladang. Kalau melanggar harus menyelenggarakan upacara penyucian.

Lebih lanjut, setelah dipancing dengan pertanyaan: "Apakah isi *awig-awig* boleh dirubah atau tidak ditaati oleh seseorang warga"?, akhirnya ada juga pendapat yang menyentuh obyek non fisik yang dipandang harus di-*tenget*-kan seperti yang berbentuk kegiatan misalnya: *pasangkepan* (rapat desa); *ngayah* (korban suci berupa 'kerja' secara tulus ikhlas untuk kepentingan bersama atau Pura); pelaksanaan *yadnya* (korban suci berupa harta benda); bahkan juga ada dalam wujud gagasan pemikiran seperti halnya: *isi awig-awig*, *pasuara* (aspirasi atau usulan untuk kesepakatan), *sima* atau *drestha* (ketentuan atau kebiasaan tak tertulis yang telah mempunyai kekuatan hukum).

Dari pandangan yang berragam ini setelah dikonfirmasi antara informan satu dengan yang lain ternyata tidak ada yang saling membantah. Namun demikian, untuk menggali lebih jauh hal-hal yang masih tersembunyi, penulis mencoba membuat ilustrasi untuk nantinya dibawa ke dalam diskusi baik dengan informan kunci maupun dalam dikusi kelompok terfokus. Ilustrasi tersebut disusun sesuai dengan pemikiran Kuntjaraningrat tentang wujud budaya (sebagaimana telah diuraikan dalam 2.2.), dengan mengelompokkan contoh dan penjelasan informan, serta hasil pengamatan di lapangan ke dalam salah satu wujud budaya. Ilustrasi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sawah, ladang, kebun, pekarangan, hutan, hutan bambu, mata air, sungai, *parimandala* (lingkungan fisik desa), kuburan, binatang liar, ternak dan seterusnya adalah komponen lingkungan alamiah dalam wujud benda;

2. Saudara, orang tua, kerabat, *sekaha* (organisasi kecil dibawah *Desa Adat*), *Dadia* (kelompok masyarakat dari satu garis keturunan), perkawinan, *Prajuru Desa Adat*, dan seterusnya adalah unsur-unsur lingkungan sosial.dalam wujud benda

3. Mengolah lahan, *paruman desa* (rapat desa), menebang pohon, menebang /memanen bambu, memanen hasil pertanian, makan-minum, membuat sesaji, sembahyang dan seterusnya adalah wujud aktivitas se-hari-hari yang dilakukan masyarakat.

4. *Awig-awig* (hukum adat tertulis), *pararem* (keputusan rapat), *mantram* (ayat-ayat kitab suci), *bisama* (keputusan lembaga agama), berbagai manuskrip dalam lontar, *kidung* (nyanyian suci) dan yang sejenisnya sebagai kompleks ide / gagasan,

Pertanyaan yang penulis kembangkan dalam diskusi adalah bagaimana pemahaman informan terhadap ke empat katagori tersebut dan manakah diantaranya yang disebut *tenget* atau paling *tenget*. Dari semua jawaban yang diperoleh menunjuk kepada hal-hal sebagai berikut:

Terhadap kategori satu: difahami sebagai ciptaanNya, sebagai milikNya dan sebagai karunia bagi manusia sehingga harus dimanfaatkan dengan penuh santun. Dari jawaban-jawaban dalam kategori ini tersirat adanya "etika" berupa kearifan dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam.

Terhadap kategori dua: terdapat pemahaman bahwa sesungguhnya manusia adalah satu. Dalam diri manusia terdapat: badan fisik yang bersifat sementara (*maya*); dan "*atman*" atau "roh" yang kekal yang bersumber dari "*Paramatman / Tuhan Yang Maha Esa*". Demikian pula dalam diri binatang atau tumbuhan (hal ini sesuai uraian pada 4.3.3 : 5) Karena semua manusia dan juga mahluk lainnya berasal dari Yang Satu, seyogyanya manusia menebar tenggang-rasa, kasih sayang, saling membantu, saling memberi hak hidup. Pemahaman ini dikenal luas oleh masyarakat dalam istilah *Sanskrit*: "*tat-twam-asi*" yang berarti "engkau adalah aku". Dari pemahaman ini nampak adanya "etika" yang lebih luas lagi berupa kearifan tentang kesetaraan dalam menempatkan diri secara harmonis dalam lingkungan sosial dan lingkungan alamiahnya. Pemahaman ini tampak jelas dalam

kesetaraan hubungan sosial (lihat 4.3.3: 1 dan 2) dan relatif berhasil dalam pengelolaan lingkungan fisik melalui pemitakatan sebagaimana telah disajikan dalam ilustrasi IV.4.tentang Pola Tata lingkungan Desa.

Dari kategori ke tiga: diperoleh pemahaman bahwa segala aktivitas manusia itu adalah 'hal biasa' bila dilihat sebagai sekedar aktivitas yang harus dilakukan sehari-hari. Aktivitas tersebut baru mempunyai 'makna' bila berhubungan dengan 'etika' yang tersebut pada pemahaman pertama dan ke dua. Keterhubungan tersebut secara fisik diwujudkan dengan selalu ada 'prilaku simbolis' dalam setiap kegiatan yang mempunyai arti penting bagi hidupnya. Misalnya: menanam bibit/anakan pada saat menebang sebuah pohon kayu; menanam pohon buah-buahan sambil menggendong anak; tidak berkata kasar pada hewan atau tumbuhan; tidak mengganggu orang sedang makan; bahkan ketika memungut ranting kering di hutan untuk kayu bakar juga mengucapkan 'sapaan' yang isinya untuk 'minta izin'. Prilaku simbolis yang paling menonjol adalah dalam pelaksanaan '*yadnya*' yaitu berupa kuban suci disertai persembahyangan, mulai dari tingkat yang sederhana sampai yang sangat rumit. Itu pula sebabnya hampir di setiap tempat kegiatan terdapat tempat pemujaan, dari bentuknya yang paling sederhana, berupa sebuah batu dibawah pohon untuk menaruh sesaji; *tugu* (bangunan suci dari batu padas atau batu bata) kecil di sawah atau di ladang; *tugu* di sudut rumah; *sanggah* di dalam pekarangan; sampai yang berbentuk kompleks seperti *Pura* yang terdapat di hulu, di tengah dan di hilir desa.

Terhadap kategori ke empat difahami sebagai: sumber ajaran tentang kebenaran (*tatwam* atau filsafat); tuntunan dan takaran tentang kebaikan dan kebenaran (*susila* atau etika); dan tata-cara berperilaku (*upacara* atau ritus).



Foto: Saradbali.com.

Pohon ini ditebang dan diperlakukan dengan santun untuk persiapan sebuah bangunan suci dalam rangkaian *yadnya* (upacara agama). Perhatikan, seorang ibu yang ikut serta, walaupun hanya sekedar dapat ikut memegang.

Ilustrasi V.2. Salah satu perilaku simbolis

Betapapun sumber ajaran kebenaran itu dipandang sebagai sesuatu yang suci, sakral dan 'rahasia', tetapi akan tidak bermakna tanpa dihayati dan diamalkan. Oleh karenanya, *tatwam* hanya boleh dipelajari oleh mereka yang 'patut' mempelajarinya, untuk menghindarkan kesalahan penafsiran. Untuk hal ini ada istilah "*aja-wera*" yang sepadan dengan ungkapan "jangan main-main" Bagi orang kebanyakan cukup mendengar hal-hal praktis sebatas berkenaan dengan dirinya (menyangkut *susila* atau *upacara*), dari orang yang 'patut' dipercaya.

Lalu, yang mana disebut *tenger*? Jawabannya adalah sebuah pola pemikiran yang tercetus dalam diskusi kelompok terfokus dan dibenarkan dalam konfirmasi dengan informan kunci sebagaimana argumentasi berikut:

Sawah, ladang, hutan, hutan bambu dan orang menebang bambu adalah hal biasa. Tetapi ketika orang, mengolah lahan, memetik hasil panen, menebang bambu, menebang pohon dan aktivitas lainnya, disertai dengan 'etika' hubungan manusia dengan lingkungan, maka semuanya menjadi lain, ada makna yang semula

tersembunyi memancar ke luar. Jadi dalam pemahaman ini: terdapat **konsepsi** tentang 'etika' kesetaraan hubungan manusia dengan lingkungan. Hal ini bersesuaian dengan uraian tentang analogi Bhuana Agung (alam) dengan Bhuwana Alit (manusia) seperti pada 4.3.3: 5. Dalam pandangan mereka, hutan bambu dan sawah adalah komponen lingkungan tempat manusia bergantung; dan sebaliknya, manusia adalah komponen lingkungan dimana hutan bambu atau sawah bergantung, sejauh hutan bambu dipandang sebagai lingkungan binaan. Sehingga menebang bambu, mencangkul atau memanen dan aktivitas lainnya yang disertai ritual sesederhana apapun, menjadi '**aktivitas / perilaku simbolis**' dari pelaksanaan **etika lingkungan**. Sementara komponen lingkungan seperti : batu, pohon, mata air, *tugu* atau tempat pemujaan adalah sebuah **tanda**, sebagai bagian dari dunia fisik, yang mencirikan adanya *tenget*. Akhirnya, *tenget* nya sendiri adalah **makna** yang melingkupi semua itu. *Tenget* merupakan bagian dari dunia makna, tanpa kenyataan fisik atau substansi yang terlihat. Oleh karenanya, sesuai dengan pandangan Cassirer atau Jung dalam Triguna (2000) sebagaimana diuraikan dalam 2.2.1, maka *tenget* adalah sebuah **simbol**, sebuah wujud abstrak tak teramati yang berfungsi sebagai *designator*. Dari pola pemikiran itu, maka obyek *tenget* sesungguhnya bersifat abstrak, berupa simbol tentang sesuatu yang sangat bermakna bagi kehidupan masyarakat Penglipuran yakni harmoni hubungan antara Sang Pencipta, manusia dan alam.

5.1.3. Sesuatu menjadi *tenget*.

Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sesuatu itu menjadi *tenget*, jawaban yang diberikan oleh informan kunci agak menyebar, sehingga sulit ditarik suatu makna dengan cara mencari persesuaian atau dengan memperbedakannya.

Misalnya ada yang mengatakan sesuatu itu menjadi *tenget* setelah melalui suatu rangkaian upacara atau proses ritual tertentu. Ada yang mengatakan, *tenget* terjadi sejak ada orang yang terkena bencana akibat mengabaikannya. Ada lagi yang berpendapat hanya orang tertentu yang mampu melihat dengan kekuatan bathinnya tentang sifat *tenget* dari suatu obyek dan bagaimana harus memperlakukannya. Kemudian ada lagi yang mengatakan dengan merasakannya sendiri, dengan mendengarkan bisikan hati. Lalu ada yang agak apatis dengan mengatakan bahwa, karena begitulah orang mengatakan dan dia sendiri tidak tahu kebenarannya.

Akhirnya dalam wawancara informal dengan seorang warga petani (I Made Rupa) – dengan penampilan sederhana dan bersahaja, dalam suasana santai dan damai di bawah pohon di tepi sebuah ladang – muncul jawaban dengan ungkapan sederhana yang paling berbeda yakni :

“Yaning sampun sareng sami nyungkemin nenget-ang sinah dados tenget ”

Kalau semua orang telah menyepakati maka sesuatu itu menjadi *tenget*.

Kemudian jawaban ini penulis bawa kedalam wawancara atau diskusi berikutnya. Dalam diskusi kelompok terfokus dengan DKT II (kelompok yunior, yang terselenggara mulai pukul 10.15 WITA dan berakhir hampir tengah malam) pendapat di atas lebih dikuatkan. Seorang anak muda (Kadek Dwiputra) mengatakan:

Kalau hanya karena ada “penunggunya” atau ada makhluk menyeramkan, itu tidak masuk akal. Sekarang sudah ada penerangan listrik dimana-mana. Kalau sudah terang benderang seramnya kan hilang. Saya sekarang tidak takut ke mana-mana malam hari. Lain, kalau sesuatu sudah disepakati oleh *krama desa* untuk di-*tenget*-kan, saya tidak berani melanggar. Bukan karena hukumannya yang berat, tapi malunya itu.

Pandangan di atas menyiratkan adanya kesepakatan yang terjadi melalui pemahaman atau kesadaran bersama tentang sesuatu yang sangat berarti, maka sesuatu itu akan terasa *tenget*, sebagaimana telah disinggung pada akhir uraian 2.2. Setelah dikonfirmasi kembali kepada informan kunci pada dasarnya pemikiran ini dapat diterima. Hanya saja *Jro Bayan Mucuk* memberi catatan:

*“Sajeroning nyihnyayang
tenget yadin tan tenget
punika, tan puput antuk
kacingak utawi kabawos-ang
kemanten.*

*Nanging mangda wenten
tatuwek ipun saje-roning
adnyana minakadi majalaran
antuk upakara agama nunas
ica ring Widhi”*

“Di dalam menjadikan *tenget* atau tidak *tenget* itu, tidak cukup hanya terjadi dalam proses visual /dilihat atau oral /dibicarakan saja.

Namun juga mengikutkan proses bathin misal-nya upacara ritual untuk memohon kepada Tuhan”

Ditambah lagi dengan informasi dari *Jro Bayan Nyoman*:

*“Gumanti sane kasengguh
patut punika yaning sam-pun
kepatutang sareng akeh
nanging mangda tan lempas
ring daging aga-ma”*

Memang sesungguhnya sesuatu itu menjadi benar bila telah dibenarkan bersama (orang banyak) namun tidak lepas dari ajaran agama.

Bila diamati pandangan-pandangan di atas, secara sepintas dipermukaan memang menunjukkan pandangan mitis. Dalam kehidupan sehari-hari *tenget* memang dikomunikasikan dalam latar mitis, magis, metafisis, dongeng bahkan tahyul. Tetapi dalam diskusi yang mendalam ternyata lebih jauh terungkap adanya penghargaan yang tinggi terhadap komponen lingkungan sebagai sama-sama ciptaan dan miliknya. Penghargaan tersebut dalam implementasinya memerlukan proses bathin sehingga terjadi pemahaman bersama terhadap suatu obyek sebagai sangat berarti dalam hidupnya. Sesuatu yang paling berarti ini menyangkut: emosi

spiritual, keyakinan, ritual dan kebersamaan. Ketika suasana pikiran bersama seperti itu terakumulasi menjadi “pengetahuan bersama” maka terjadilah sesuatu yang di-*tenget*-kan dan menjadi simbol. Hal ini sejalan dengan pendapat Cohen (dalam Triguna 2000) yang mengatakan:

Simbol itu pada mulanya merupakan kreasi spontan individu yang spesifik berdasarkan pengalaman subyektif-spesifik. Kemudian, mencapai suatu eksistensi obyektif pada waktu diterima oleh orang lain selama dalam interaksi sosial. Hal yang semula subyektif-individual kemudian menjadi obyektif kolektif mengembangkan realitas yang dimilikinya.

Dengan demikian untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu menjadi *tenget tenget*, pandangan I Made Rupa, walaupun paling berbeda dengan yang lain, bahwa sesuatu menjadi *tenget* bila ada kesadaran atau kesepakatan dalam pikiran bersama, nampak telah disertai dengan alasan yang kuat.

5.1.4. Cara mengetahui *tenget*

Untuk mengetahui bahwa sesuatu itu *tenget*, semua informasi yang didapat menunjukkan makna yang serupa yaitu bahwa mereka mendengarnya dari orang tua atau dari orang lain dan akhirnya menjadi pengetahuan bersama. Semua informan tahu kalau bertindak tidak senonoh di tempat yang disakralkan itu tidak boleh; hutan bambu kalau ditebang sembarangan akan rusak; isi *awig-awig* kalau sering diubah atau dilanggar *Desa Adat* akan kacau; menebang pohon tanpa menanam kembali anakannya akan mengakibatkan celaka; beristri lebih dari satu maka rumah-tangga akan goyah dan memalukan; dan seterusnya.

Ketika ditanyakan apakah mereka tidak perlu bukti? Ternyata jawabannya juga hampir senada yaitu:

“Indik tenget, dados percaya tan percaya. Sami tergantung kesadaran.

Malihne yan mamurug sane sengkala idewek pedidi”

“Tentang *tenget* boleh percaya atau tidak. Semua tergantung kesadaran.

Lagi pula kalau melanggar yang celaka adalah diri sendiri”.

Jadi walaupun mereka percaya begitu saja, tanpa keinginan untuk adanya pembuktian, tetapi kepercayaan itu tidak membuta, melainkan dilandasi oleh kesadaran bersama tentang betapa pentingnya sesuatu itu di-*tenget*-kan, karena menyangkut kelangsungan kehidupan manusia dan segala ciptaanNya..

Pandangan ini dalam diskusi kelompok terfokus DKT II agak dikoreksi. Kelompok muda ini tidak semata ‘mendengar dan percaya’ tapi mulai mencari pijakan dalam pikiran logis mereka. Seperti dicontohkan oleh Kelihan Daha Teruna (ketua muda mudi: I Wayan Yudiana):

Misalnya awig-awig, kalau bukan warga masyarakat yang *menget*-kan siapa lagi. Kalau *awig-awig* tidak di-*tenget*-kan jelas desa akan kacau. Begitu pula sawah atau ladang kalau bukan yang memiliki yang *menget*-kan dengan cara menjaga dan memliharanya, jelas tidak akan memberi hasil.

Mungkin pandangan seperti itu, tidak mewakili seluruh muda-mudi, tetapi setidaknya mengganibarkan bahwa, walaupun di kalangan muda telah ada upaya berfikir kritis, namun sesungguhnya pemahaman mereka justru masih pada tingkat ontologis – antroposentris (kemanfaatan bagi diri manusia saja), belum sampai kepada pemahaman fungsional-holistik (kebertautan hubungan saling bergantung).

5.1.5. Manfaat *tenget*

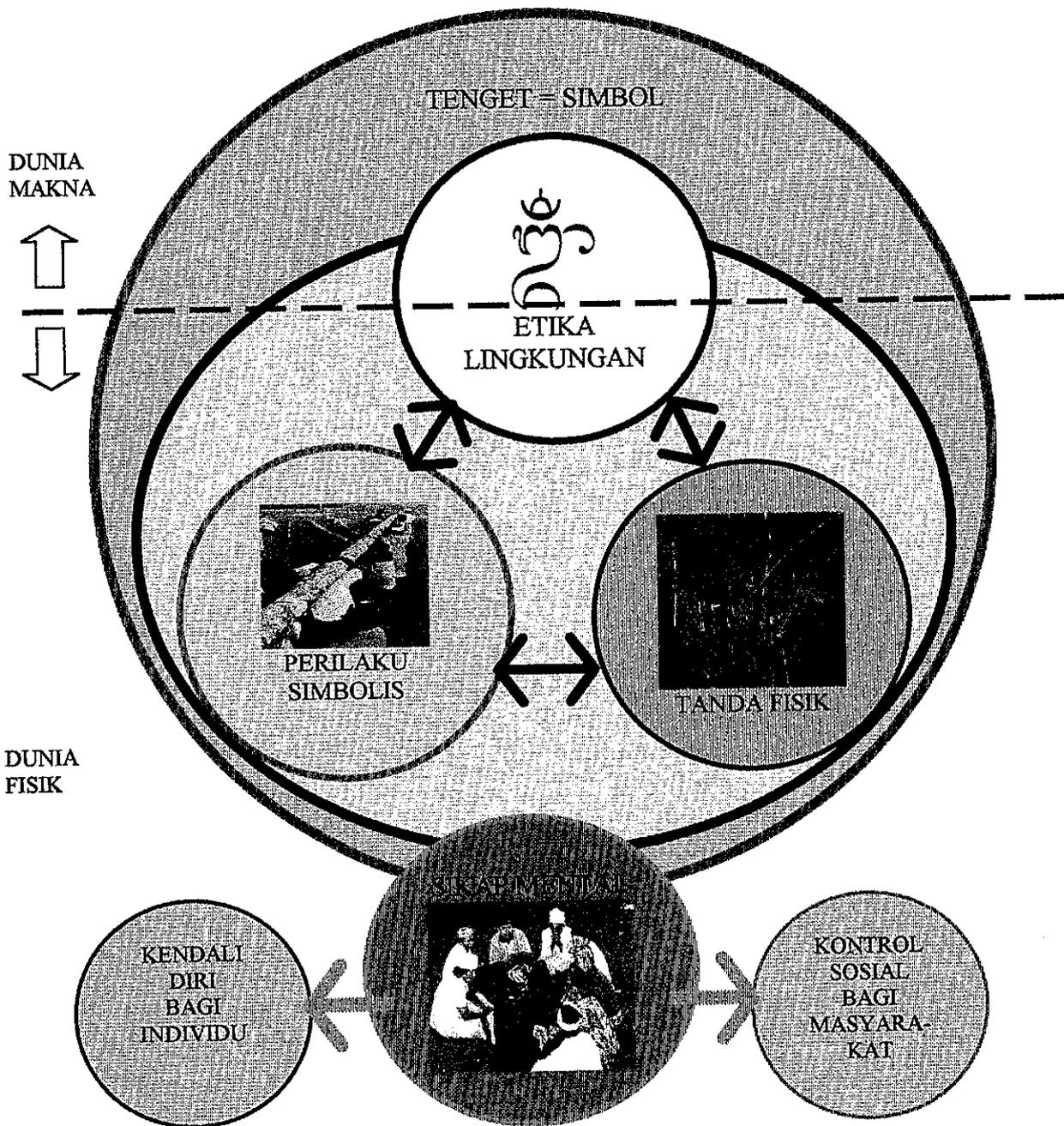
Seluruh informan kunci demikian pula dalam ke dua kelompok diskusi terfokus setuju, bahwa *tenget* dalam arti luas sangat bermanfaat dalam semua aspek kehidupan, terutama menyangkut pelestarian lingkungan baik yang berkenaan dengan kehidupan lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah. Seperti ditegaskan oleh *Jro Kelihan Adat*:

“Melalui *tenger*lah konsepsi filosofis dikomunikasikan. *Tenget* menjembatani antara yang gaib dan yang nyata sehingga mudah difahami dan dilaksanakan. Karena di-*tenget*-kan awig-awig disini masih tetap bertahan sampai sekarang. Karena *tenget*-lah lingkungan disini masih bisa dipelihara kelestariannya sampai sekarang”.

Dengan demikian dari hasil seluruh diskusi, menunjuk bahwa *tenget* tumbuh dari kedalaman pemahaman yang bersifat fungsional - holistik tentang etika kesetaraan hubungan manusia dengan lingkungan (alam beserta isinya) sebagai sesama ciptaannya. Hanya saja pemahaman itu dikomunikasikan dalam simbolisasi melalui cara-cara yang bersifat mitis atau ontologis. Hal ini dapat kita maklumi karena kemampuan penalaran yang bergradasi dalam masyarakat. Yang terpenting bagi mereka adalah bagai mana konsepsi-konsepsi yang ada dalam pemahaman tersebut sampai kepada masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari seluruh bahasan ini terlihat bahwa *tenget* tumbuh dan berakar dari sistem religi masyarakat setempat, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi sistem nilai budaya (suatu yang sangat berarti dalam pikiran masyarakat) dan akhirnya diekspresikan dalam sikap mental (cara berreaksi terhadap lingkungan sosial atau fisik). Sikap mental tersebut akhirnya bertransformasi ke dalam moral bersama berupa simbol yang berfungsi sebagai alat kendali individu dan alat kontrol sosial

dalam memperlakukan lingkungan. Selengkapnya pemahaman *tenget* tersebut adalah berupa skemata dalam ilustrasi berikut:



Ilustrasi V.3. Skemata pemahaman *tenget*

Dengan demikian, *tenget* sebagai simbol dalam wujudnya yang abstrak dan berada dalam kesadaran pikiran berupa kumpulan pengalaman-pengalaman

akhirnya juga merupakan pengetahuan atau kearifan bersama. Sebagaimana Suryasumantri (2001: 105) mengatakan:

... sebuah pengetahuan, apapun jenisnya, memiliki ciri-ciri: ontologi (tentang apa), epistemologi (bagaimana) dan aksiologi (untuk apa).

Tenget ternyata juga memiliki ke tiga ciri tersebut. *Tenget* bagi masyarakat Penglipuran, merupakan kumpulan pengalaman atau jawaban permasalahan kehidupan sehari-hari tentang: 'apa' sesungguhnya manusia dan lingkungannya; 'bagaimana' pengalaman-pengalaman itu disusun untuk memperlakukan alam; dan untuk apa hal itu dilakukan. Dalam hal ini secara aksiologi *tenget* itu dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Penciptanya; dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya; dan dengan alam sekitar sebagai lingkungan fisiknya.

5.2. Pergeseran pemahaman tentang *tenget*

Dalam mengidentifikasi pergeseran pemahaman *tenget* dilakukan dengan membandingkan informasi yang didapat dari informan kunci (individu) dengan informasi dari wawancara informal (masyarakat). Disamping itu juga dilakukan perbandingan antara hasil diskusi kelompok terfokus DKT I dan DKT II. Ternyata pula dari hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus tidak dapat sepenuhnya melukiskan pergeseran dimaksud sehingga harus pula dibandingkan dengan hasil observasi lapangan.

Dalam seluruh informasi yang didapat, faktor penambahan penduduk dan pembangunan sering muncul sebagai penyebab perubahan pemahaman. Pembangunan dimaksud adalah menyangkut pembangunan fisik (ekonomi, pertanian dan perhubungan) dan non fisik (pendidikan) Tetapi manakah yang lebih

kuat berpengaruh apakah pembangunan yang dilakukan oleh pihak luar (pemerintah) atautkah pembangunan oleh masyarakat (umum ataupun individu). Demikian pula, apakah pergeseran tersebut berkaitan dengan sistem seleksi dan adaptasi dalam kegiatan pembangunan? Untuk memperoleh jawabannya ternyata memerlukan diskusi yang cukup panjang sebagaimana rangkumannya disajikan berikut ini.

5.2.1. Perubahan pemahaman *tenget*

Semua informan kunci sepakat mengatakan adanya pergeseran pemahaman *tenget*. Seperti yang dinyatakan oleh *Jro Bayan Nyoman*:

*“Mangkin ida danene
akehan ‘campah’.*

Akeh taler sane maboya.

*Tan ngiwangang dwaning
akeh sampun sane wikan-
wikan.*

*Nanging wikane akehan
ring tengah-tengah, beten
puyung ring duwur
puyung”*

“Sekarang orang-orang
kebanyakan ‘hambar’ (dalam
memaknai *tenget*),

Banyak pula yang kurang
percaya.

Tidak menyalahkan karena
banyak yang sudah pintar-pintar
(berpendidikan).

Hanya saja belajarnya
kebanyakan (hanya) ditengah -
tengah sedangkan dibawah
kosong dan diatas kosong”

Ungkapan ‘*campah*’ sepadan dengan ‘hambar’. Belajar ditengah-tengah, di atas kosong dan dibawah kosong, adalah untuk mengatakan tingkat pendidikan yang tanggung. Betapapun pernyataan ini cukup membingungkan, lalu penulis minta agar diberi contoh-contoh. Beliau melanjutkan:

*“Mangkin anak akehan
“bisnis”, napi sane katon
gelis ngasilang, becik
apremangkinan, nika sane*

“Sekarang orang kebanyakan
‘bisnis’, apa yang nampak
cepat menghasilkan, terasa
baik untuk saat sekarang itu

kaanggen.

*Ane dumun-dumun akeh
sane sampun kerobah, sane
benjang-benjang akeh sane
durung kapikayun"*

yang dipakai.

Yang dulu-dulu banyak yang
diubah dan yang akan datang
banyak yang belum dipikir-
kan"

Maksud kata "bisnis" yang dipakai, menurut makna yang penulis tangkap adalah untuk melukiskan keadaan yang serba praktis dan ingin serba cepat, sesuai dengan ungkapan yang sama yang sering dipakai oleh informan kunci yang lain. Dari pernyataan diatas tersirat bahwa tingkat pengetahuan akibat "berhasilnya" pembangunan bidang pendidikan telah berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang *tenget*. Namun keberhasilan pendidikan itu sepertinya disayangkan karena hanya memberikan pengetahuan yang tanggung, membuat orang ingin serba praktis sehingga ada pengetahuan yang telah ada sejak dahulu diubah, sementara kemungkinan-kemungkinan masa depannya belum terpikirkan. Jelas pernyataan ini sangat subyektif, tetapi mungkin mengandung kebenaran.

Pernyataan di atas kemudian lebih dijelaskan oleh pandangan dari *Jro Kelihan Adat* dengan mengatakan:

*Sane dumun lingsir-
lingsire wantah akehan
"gugon tuwon".*

*Yen alit-alite mangkin
akehan nagih bukti.*

*Nanging yan sampun
alon-alon wehin pangrasa
malah ipun sumingkin tebal
kaperca-yaanne*

Orang-orang tua dulu
kebanyakan yang percaya
begitu saja.

Generasi muda sekaarang
kebanyakan minta bukti.

Tetapi kalau sudah
dijelaskan pelan-pelan, diberi
pengerti-an, malah mereka
lebih tebal lagi
kepercayaannya

'*Gugon tuwon*' (*gugon* dari *gugu-an* = lebih percaya, *tuwon* dari *tuhu-an* = lebih benar) adalah ungkapan yang lazim dalam Bahasa Bali untuk menyatakan keadaan seseorang yang percaya begitu saja tentang kebenaran yang diterima dari orang yang 'patut dipercaya' tanpa memerlukan pembuktian. Orang yang patut dipercaya dalam hal ini adalah 'tokoh panutan' atau menurut Cohen dalam *triguna* (200!) diistilahkan dengan '*sgnifican others*'. Ketika penulis menanyakan apakah ada cara yang begitu efektif untuk menyampaikan penjelasan agar bisa diterima oleh generasi muda?, *Jro Kelihan Adat* melanjutkan dengan penjelasan yang agak panjang:

"Kadi mungguh ring agama wenten sane kaucap Tri Pramana inggih punika: pratiyaksa, anumana lan agama pramana.

Pra-tiyaksa mejalaran antuk ngajak ipun sareng nureksa kalih mratiaksa kewentenan, minakadi yan linyok ring perarem nga-winang biota.

Anumana mejalaran antuk ngeru-masa tanda-tanda mina-kadi yan alas bambune rusak toyane ngalitag.

Malih indik Agama Pramana kadi sane mungguh ring kecaping Aji Agama"

"Sebagaimana tersebut dalam ajaran agama ada yang disebut *Tri Pramana* yaitu: *pratiyaksa, anumana dan agama pramana.*

Pratiyaksa berarti dengan cara mengajak melihat langsung kenyataan-kenyataan (hidup sehari-hari), misalnya bila ingkar terhadap kesepa-katan akan mengakibatkan masalah / keributan;

Anuma-na adalah dengan jalan merasakan gejala-gejala misalnya bila hutan bambu rusak mata air mengecil;

Lagi tentang Agama Pramana adalah (dengaan mengajak mempelajari) seperti yang tertulis dalam Kitab Suci Agama"

Bagaimana dengan isi *awig-awig* atau *drestha* atau kebiasaan yang dahulu diyakini *tenget* kemudian dilakukan perubahan-perubahan? Penulis mengejar dengan pertanyaan ini untuk tahu lebih jauh. Jawabannya adalah:

*“Nguwah uwuhin punika
boya nenten dados nanging
wenten tata-titinipun.*

*Pakantenan pamargi dados
magentos, nanging tetuwek
mangda tetep anut ring desa,
kala, patra”*

“Menambah mengurangi itu bukan tidak boleh tetapi harus ada ketentuan yang diikuti (mengikuti prosedur).

Pelaksanaan (luarnya) mungkin saja berubah, tetapi inti kebenarannya supaya tetap dan disesuaikan dengan ajaran desa, kala dan patra”

Dijelaskan juga selanjutnya, yang dimaksud dengan ‘desa’ adalah ‘tempat’ suatu kegiatan akan berlangsung, ‘kala’ adalah ‘waktu’ kegiatan akan berlangsung dan ‘patra’ adalah ‘keadaan’ pada tempat dan waktu itu.

Melalui diskusi di atas penulis kemudian ingin mendapat contoh tentang sesuatu yang dahulu dianggap *tenget* kini tidak lagi atau sebaliknya. Contoh-contoh tersebut penulis dapatkan dalam wawancara dengan *Jro Bayan Salain* (seorang yang sangat sepuh). Beliau menceritakan bahwa dulu di sepanjang jalan yang membelah desa ada pohon kelapa yang ditanam oleh para leluhur orang Penglipuran. Konon bibitnya adalah hasil dari pampasan perang yang kemudian ditanam sebagai tanda kemenangan. Oleh karenanya dianggap *tenget* dan tidak boleh ditebang. Tetapi karena telah terlalu tinggi dan pernah terjadi, salah satu rumah penduduk tertimpa pohon kelapa, maka pohon kelapa itu lalu ditebang. Bahkan sekarang diseluruh pekarangan rumah ditabukan menanam tanaman tahunan. Contoh lain yang diberikan adalah: dahulu ada *drestha*: sebagai tanda perkawinan, mempelai harus menyerahkan dua ekor sapi hitam ke *Desa Adat* untuk pesta bersama, tapi kini cukup dengan dua ekor ayam hitam untuk upacara bersaksi

di Pura; Contoh lain lagi, untuk penguburan mayat dahulu harus menunggu hari tertentu (di luar hari larangan), tapi sekarang boleh setiap hari.

Pak Lurah kemudian memberi ilustrasi yang agak berbeda tapi masih dalam nuansa makna yang serupa. Beliau mengatakan:

Perubahan itu jelas ada, bahkan harus, karena itu tandanya masyarakatnya dinamis. Apalagi bagi Penglipuran yang dahulu masyarakatnya agraris kini sebagian berpindah ke sektor jasa. Pendapatannya meningkat, pergaulannya meluas, akibat teknologi informasi. Mereka juga ingin menikmati kemudahan hidup dengan fasilitas modern. Ini tidak bisa kita salahkan.

Menurut Pak Lurah perubahan-perubahan yang nyata di lapangan terutama dalam hal perumahan.

Akibat penambahan jumlah penduduk bermunculan bangunan rumah yang tidak lagi mengikuti kaedah tradisional. Syukurlah rumah inti mereka pertahankan, karena sangat diminati oleh wisatawan. Tapi fungsi rumah inti juga agak berubah. Kalau dulu hanya untuk tempat tinggal sekarang juga dipakai untuk menjual 'souvenir' atau 'soft-drink'.

Menurut beliau juga perubahan tersebut tak terhindarkan dan belum sangat mengawatirkan karena:

Sistem regenerasi di *Desa Adat* Penglipuran sangat baik. Anak-anak muda sejak dini telah dilibatkan dalam kegiatan adat. Malah ada kegiatan adat yang hanya boleh dilakukan oleh para muda-mudi. Disinilah peran para tokoh adat untuk memberi penjelasan, pengarahan dan pengertian sehingga para generasi muda ini memiliki kesiapan mental dan moral tentang: baik-buruk, yang mana boleh dan yang mana tidak boleh, pada masa mendatang.

Dari hasil wawancara di atas, ditambah dengan hasil pengamatan lapangan, terutama berkaitan dengan kegiatan pembangunan seperti diuraikan dalam 4.4., memang nampak ada pergeseran-pergeseran seperti disebutkan dalam wawancara. Namun pergeseran pemahaman tersebut tidak seluruhnya berarti negatif, ada pula

yang positif. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Sehingga: 'meningkatnya' pengetahuan, meningkatnya pendapatan dan meluasnya atau meningkatnya intensitas pergaulan akhirnya mendorong sistem seleksi berproses lebih cepat, tanpa dibarengi dengan proses adaptasi melalui pemahaman yang diperlukan. Perkembangan ini tentu saja disertai dengan pergeseran nilai-nilai (lihat proses pergeseran nilai akibat pembangunan pada 2.5.3.) sebagaimana diawatirkan oleh Suparta yang kutipan pendapatnya disajikan pada 2.2.

Ada hal penting yang patut dicatat selama mencari informasi tentang pergeseran pemahaman *tenget* ini, yaitu penekanan dari *Jro Bayan Mucuk* ketika ditanya apakah ada kekhawatiran dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di desanya seperti: kegiatan pariwisata, pembangunan perumahan di luar *karang kerti* dan yang lainnya. Dengan mantap beliau menjawab:

*"Boyake punika sane
kawastanin pembangunan?"*

*Anak ngewangun sinah
mangda ngakehang, mang-da
ngagengang.*

*Nanging mangda manut sulur'
Sane kawon mangda dados
becik, sane sampun becik
mangda malih mecikang.*

*Yan tan kenten yadiastu
ngagengang, suwe-suwe dados
penyakit, mekadi 'kankere'*

"Bukankah itu yang disebut pembangunan?"

Orang membangun itu jelas agar bertambah banyak, bertambah besar.

Tetapi supaya meng-ikuti sistem. Yang kurang baik supaya menjadi baik, yang sudah baik supaya menjadi lebih baik.

Kalau tidak demikian walaupun semakin besar, lama-lama akan jadi penyakit, seperti kanker"

Pernyataan ini cukup mengejutkan karena mengingatkan akan tulisannya Bryant dalam *Managing Development in the Third World* (1987: 3) bahwa ciri sel kanker adalah tumbuh tanpa membangun. Dengan kata lain pertumbuhan / perubahan yang tidak mengikuti sistem atau di luar struktur adalah 'kanker'. Bila dilihat sesungguhnya *Desa Adat Penglipuran* adalah sebuah struktur permukiman yang mantap. Artinya dengan luas areal 115 Ha. dengan 76 *karang kerti* serta dengan 76 KK *Krama Pengarep*, dengan penghidupan sebagai petani, dapat dipandang sebagai sebuah sistem lingkungan permukiman yang telah memperhitungkan persyaratan daya dukung, daya tampung maupun daya lenting lingkungan (perhatikan ilustrasi IV.4 dan IV.17). Kalau saja pendekatan daya dukung lingkungan oleh para ahli benar, seperti dirumuskan dalam Webster's World Encyclopdia (2000), bahwa 1 kilometer persegi (1.000.000 M²) mampu mendukung penduduk sebanyak 300 orang atau 3300 M²/orang, maka perbandingan luas lahan (115 Ha) dengan jumlah penduduk (dilihat dari jumlah *Krama Pangarep* sebanyak 76 KK) di *Desa Adat Penglipuran* adalah cukup ideal yaitu sekitar 3285 M²/orang (dengan asumsi 1 KK terdiri dari empat atau lima orang).

Pertumbuhan perumahan di luar *karang kerti* dan pembuatan fasilitas pariwisata (seperti penginapan) adalah sebuah 'kanker'. Artinya lebih lanjut, kalau memang pariwisata mampu meningkatkan pendapatan penduduk, masih perlu suatu perhitungan tentang berapa buah rumah atau berapa KK lagi dapat bermukim di dalam areal *Desa Adat Penglipuran* agar tetap pada batas keseimbangan daya dukung, daya tampung dan daya lenting lingkungan.

5.2.2. Waktu dan ciri perubahan

Terhadap pertanyaan: kapan pergeseran pemahaman *tenget* itu mulai terjadi? Para informan kunci ataupun dalam kelompok diskusi terfokus tidak memberi jawaban yang menunjuk kepada suatu waktu yang pasti. Hal ini terjadi karena menyangkut pemahaman *tenget* yang demikian abstrak. Tapi pada dasarnya seperti telah dibahas dalam uraian sebelumnya (5.2.1.) perubahan *tenget* tersebut dikaitkan dengan suatu masa atau peristiwa dengan gejala atau ciri tertentu. Misalnya sejak Proyek Listrik Masuk Desa, sejak anak-anak muda telah mengenyam pendidikan di kota, sejak kepariwisataan berkembang atau sejak tingkat ekonomi masyarakat mulai membaik akibat pembangunan sektor pertanian atau sektor lainnya.

Pada dasarnya jawaban-jawaban tersebut menunjuk pada pengeruh kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

5.2.3. Akibatnya bagi lingkungan

Dari pertanyaan tentang akibat perubahan *tenget* terhadap lingkungan, oleh informan diberikan banyak contoh-contoh. Dari contoh-contoh tersebut dapat digolongkan atas dua kategori. Yang pertama contoh-contoh yang menunjuk kepada obyek-obyek teramati misalnya: Dahulu tidak boleh membangun tempat tinggal di areal pertanian kecuali "*kubu*" (bangunan sementara untuk berteduh atau beristirahat) namun sekarang telah banyak dilakukan karena desakan kebutuhan lahan akibat pertambahan jumlah penduduk; demikian pula, terdapat hutan bambu yang telah berubah menjadi pekarangan rumah atau kebun; pembangunan rumah baru di luar kaedah rumah tradisional sehingga merubah penampakan visual lingkungan permukiman menjadi kontras dengan alam.

Sementara contoh-contoh lain menunjuk kepada obyek yang tak teramati yakni perubahan pemahaman *tenget*, yang justru berakibat positif terhadap lingkungan. Pemahaman tak teramati tapi tercermin pada gejala-gejala sebagai akibatnya. Contoh-contoh yang diberikan, yang merupakan akibat perubahan pemahaman *tenget* misalnya: hutan bambu yang tersisa sekarang terselamatkan; kasus penebangan pohon kelapa sepanjang jalan; adanya larangan menanam tanaman tahunan di dalam pekarangan; larangan menjual tanah kepada orang dari luar Penglipuran; dan contoh lainnya (lihat kembali uraian pada 4.3,2: 2 dan 3).

Jadi perubahan yang pertama, yang teramati, adalah perubahan, 'prilaku simbolik' dan 'tanda-tanda' tanpa disertai perubahan 'konsepsi', sebagai akibat ter-distorsi-nya proses pemahaman tentang *tenget* dan berakibat negatif terhadap lingkungan (dalam hal ini berlaku sistem seleksi). Perubahan ke dua mencerminkan proses pemahaman berjalan terus bahkan membaik, walaupun sangat terbatas pada hal-hal menyangkut kepentingan kolektif, tetapi justru bernilai positif bila dikaitkan dengan pelestarian fungsi lingkungan.

Konsep pemikiran ini ketika dikonfirmasi kepada informan kunci demikian pula dalam kelompok diskusi ternyata bisa diterima. Namun dalam konfirmasi melalui wawancara informal kebanyakan menyatakan tidak tahu. Ini menunjukkan masyarakat umum tidak merasa perlu berfikir sejauh itu. Sementara peran tokoh panutan (tetua adat) dalam menyebar informasi, terdesak oleh arus informasi dari luar terutama melalui media elektronik.

5.2.4. Bila *tenget* diabaikan

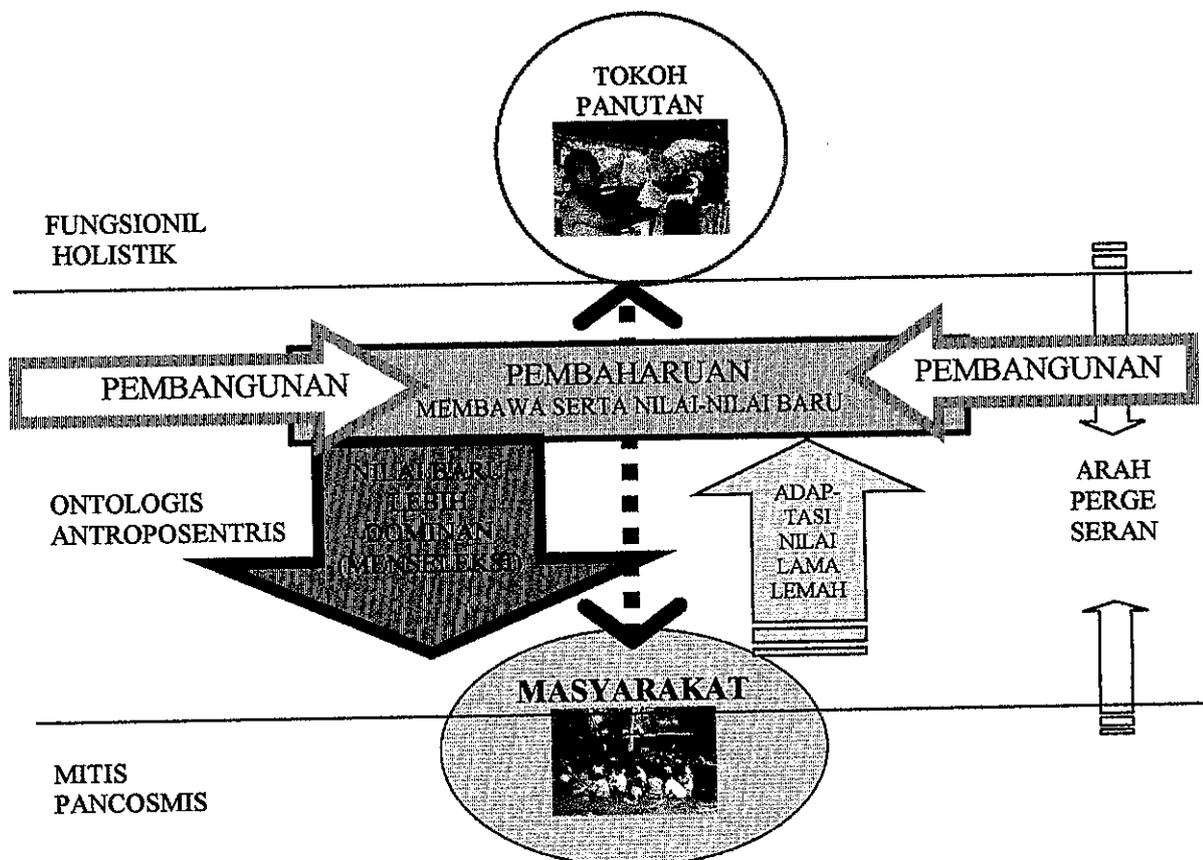
Untuk pertanyaan: Apa yang terjadi seandainya *tenget* diabaikan saja? Semua informan menyatakan tidak setuju atau tidak mungkin. Bahkan dalam diskusi

kelompok terfokus DKT II (junior) seorang pemuda (I Nyoman Garjita) dengan bersemangat mengatakan:

Itu tidak akan terjadi karena akan berarti hancurnya *Desa Adat*. Lagi pula siapa berani karena akan berakibat buruk pada diri sendiri.

Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa *tenget* merupakan nilai yang sangat berarti bagi masyarakat sehingga mereka tidak bisa membayangkan tatanan bermasyarakat tanpa ada yang *di-tenget-kan*..

Dari seluruh pembahasan tentang perubahan nilai *tenget* terlihat bahwa perubahan tersebut sangat berhubungan dengan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, terutama pembangunan yang dilakukan bukan oleh masyarakat sendiri. Secara skematis hasil dari bahasan ini disajikan dalam ilustrasi berikut:



Ilustrasi V.4. Skema pergeseran pemahaman *tenget*

5.3. Revitalisasi *Tenget* dalam Pembangunan Berkelanjutan

Untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan *tenget* dapat direvitalisasi dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui perencanaan lingkungan, diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang: hubungan *tenget* dengan pembangunan, *tenget* dengan pelestarian lingkungan, dan cara mensinergikan *tenget* dengan pembangunan. Kemudian juga dipertegas dengan informasi tentang perlu tidaknya *tenget* dipertahankan atau cara menghidupkan kembali nilai *tenget* dalam kehidupan masa depan. Seluruh wawancara kemudian selalu diarahkan atau dikaitkan dengan prinsi-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasilnya adalah sebagaimana diskusi berikut:

5.3.1. Hubungan *tenget* dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

1. Pemenuhan kebutuhan dasar.

a. Kebutuhan materi.

Dari hasil observasi lapangan, menurut pengamatan penulis berkenaan dengan tingkat ekonomi masyarakat, tidak nampak adanya perbedaan kaya miskin yang mencolok. Hal ini dapat diketahui dari kondisi rumah tangga pada masing-masing *karang kerti*. yang menunjukkan keadaan hampir merata. Kondisi bangunan tempat tinggal; peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dimiliki; kualitas dan cara berpakaian; bahkan juga makanan yang disuguhkan (yang sempat pula penulis cicipi pada beberapa keluarga) menunjukkan tingkat yang setara.

Namun penulis terganggu oleh dua hal yaitu: Pertama tentang ketentuan dalam *awig-awig* bahwa jumlah *karang kerti* tetap yakni sebanyak 76 buah (lihat 4.3.2: 2 dan 3) , jumlah penghuni berstatus *Krama Pangarep* juga tetap

sebanyak 76 KK, sementara jumlah Krama Pangerob justru semakin banyak (lihat bahasan pada 4.3.3: 1 tentang kependudukan) Demikian pula dengan luas areal pertanian, jelas tidak akan bertambah; Ke dua adalah tentang adanya gejala pertambahan penduduk seperti pernah disinggung oleh Pak Lurah. Dari kedua hal ini jelas pada suatu saat nanti akan terjadi ketimpangan antara jumlah penduduk dengan kemampuan menyediakan kebutuhan dasar. Apakah pariwisata mampu menjawab tantangan itu, sementara pariwisata mempunyai sifat fluktuatif dan sangat tergantung kepada keadaan keamanan dan keuangan regional maupun global?.

Secara khusus masalah ini penulis diskusikan dengan Pak Lurah dan *Jro Bayan Mucuk* dimana ke duanya memberi pandangan yang senada bahwa: Memang benar jumlah *karang kerti* tetap 76 buah. Jumlah *Krama Pangarep* pun tetap 76 KK. Apabila status *Krama Pangarep* gugur di *Desa Adat* menurut ketentuan *awig-awig*, *karang kerti* hanya boleh dihibahkan kepada *penyeledihi* (pengganti) yang biasanya anak tertua atau menurut persetujuan *Prajuru Adat*. *Karang kerti* ini tidak termasuk harta warisan karena milik *Desa Adat* Penglipuran. Bila *Krama Pangarep* yang gugur haknya mempunyai anak laki-laki lebih dari satu, maka selain yang ditunjuk selaku *panyeledihi* nantinya akan berstatus sebagai *Krama Pangerob*, yang artinya warga dibawah perlindungan *Krama Pangarep*. Dalam hal ini sesungguhnya ada tujuan tersembunyi, yaitu agar mereka yang berstatus *Krama Pangerob* berupaya mencari penghidupan di luar *Desa Adat* Penglipuran. Tentu saja dibantu oleh keluarga yang lain. Buktinya, telah banyak dari warga *Desa Adat* Penglipuran yang memiliki tanah di luar desanya.

Walaupun penulis dapat memahami bahwa itulah cara *Desa Adat* Penglipuran untuk mempertahankan daya tampung dan daya dukung lingkungan, sehingga pemenuhan kebutuhan materi dapat teratasi, namun masih ada rasa tidak puas yang lain. Apakah dengan cara itu tidak berarti telah terjadi ketidakadilan atau diskriminasi antara *Krama Pangarep* dengan *Krama Pangerob*. Pemikiran ini segera dibantah oleh *Jro Bayan Mucuk* dengan menjelaskan bahwa.

"Yening Krama Pangarep, yadiastu swadikaranipun ring Desa Adat jangkep, nanging swadarmanipun taler akeh abot.

Yan Krama Roban diastun tan maduwe swadikara ring Desa Adat, swadarmanipun taler akedikan.

Sujatine pateh manten, bilih-bilih yan makrama ngarep tan mrasidayang ngarereh karya doh, dwaning kaiket antuk adat".

"Kalau *Krama Pangarep*, walaupun hak-haknya di *Desa Adat* dijamin sepenuhnya, tapi kewajiban-kewajibannya juga banyak dan berat.

Kalau *Krama Roban* walaupun tidak punya hak dan perlindungan sepenuhnya di *Desa Adat*, tapi kewajiban-kewajibannya juga ringan.

Sebetulnya sama saja, malah kalau berstatus *Krama Pangarep* tidak mungkin untuk mencari pekerjaan jauh (ke luar desa dalam waktu lama), karena diikat oleh (kewajiban adat".

Dengan demikian nampak bahwa pemenuhan kebutuhan materi sistem "tanah ayahan desa" yakni tanah sebagai potensi strategis bagi masyarakat petani di *Desa Adat* Penglipuran, sebagian besar dikuasai oleh *Desa Adat*, kemudian dibagi secara adil menjadi karang kerti (pekarangan) dan cecatu (lahan garapan). Bagi mereka yang berstatus *Krama Pangerob* diupayakan mencari penghidupan (lahan pertanian) di luar *Desa Adat* Penglipuran. Seperti

telah diuraikan dalam 4.3.1. *Desa Adat* Penglipuran sesungguhnya merupakan pecahan dari *Desa Adat* Bayung Gede di Kecamatan Kintamani.

b. Kebutuhan non materi.

Sesungguhnya dalam diskusi di atas juga sudah tersirat tentang pemenuhan kebutuhan non materi, sebagaimana juga telah banyak disinggung dalam bahasan sebelumnya (4.3.3:4) bahwa *Desa Adat* Penglipuran sebagai sebuah lembaga menjamin sepenuhnya: rasa aman, rasa nyaman, kerukunan, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dalam batas *awig-awig* dan *drestha*

Tetapi apakah kemudian justru *awig-awig* dan *drestha* ini tidak terlalu mengikat, membatasi, serba tidak boleh dan terlalu memberatkan warga masyarakat?

Pemikiran ini dibantah oleh *Jro Kelihan Adat* dengan mengatakan:

Awig-awig itu batas wilayah antara boleh dan tak boleh yang lahir dari aspirasi warga masyarakat melalui proses *pasuara*, *pasangkepan* dan *pararem* (mengemukakan pendapat, musyawarah dan kebijakan - pen.). Lalu dibiasakan hingga mentradisi. Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan tidak akan terasa berat. Dengan *awig-awig* juga segalanya menjadi jelas. Kalau sudah jelas 'kan gampang. Seperti saya, yang kebetulan dipilih untuk dituakan, walaupun masih muda dan tidak tahu banyak, dengan berbekal *awig-awig*, sebagai *Kelihan Adat* sesungguhnya cuma menjalankan aspirasi warga. Kalaupun misalnya terjadi keberhasilan atau kekeliruan, itu menjadi milik bersama. Dengan demikian warga tenang sayapun tenang.

Pandangan di atas kiranya cukup memberi gambaran bagaimana kebutuhan non materi itu ditata dan diseimbangkan. Disinilah peran dari nilai budaya sebagai bentuk kearifan yang dimiliki bersama, dapat diterjemahkan dalam sikap mental yang penuh tenggang-rasa dan saling menghargai dalam

lingkungan (sosial maupun alam). Kebebasan untuk berpendapat, hak-hak dalam bermusyawarah dan ikut serta dalam mengambil kebijakan dijamin dalam *Awig-awig Desa Adat* melalui proses: *pasuara, pasangkepan, paraem, prajuru* dan *ulua-pad* (lihat uraian tentang ini pada 4.3.3: 3 dan 4)

2. Pemeliharaan Lingkungan.

a. Konservasi Lingkungan.

Dalam *awig-awig Desa Adat* Penglipuran terdapat istilah *palemahan, parimandala* atau *wawengkon* yang artinya bersesuaian dengan lingkungan fisik atau lingkungan alamiah. Demikian pula terdapat istilah *pawongan, parikrama* atau *simakrama* yang artinya sesuatu yang berkenaan dengan lingkungan sosial. Kalau konservasi berarti perlindungan lingkungan (Hadi, 2001: 45) maka baik lingkungan alamiah maupun lingkungan sosial telah mendapat perlindungan melalui *awig-awig* ataupun *drestha* yang di-*tenget*-kan. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang analogi alam dan manusia dan konsep *Tri Hita Karana* sebagaimana telah diuraikan dalam 4.3.3: 5. Ketika disinggung dalam wawancara, semua informan memberi pandangan yang sama. *Palemahan* (lingkungan fisik), *pawongan* (lingkungan sosial) dan *parahiangan* (lingkungan rohani) adalah tiga unsur dari *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kesempurnaan dan kebahagiaan) yang harus dijaga agar tetap harmonis satu dengan yang lainnya.

b. Mengurangi konsumsi.

Tentang mengurangi konsumsi juga telah disinggung sebelumnya terutama pandangan *Jro Bayan Mucuk* dan *Jro Bayan Nyoman* bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan dimana manusia adalah sebagian darinya; bahwa

semua makhluk hidup mempunyai hak hidup yang sama; bahwa hidup ini bersifat sementara dan maya. Oleh karena itulah milik Tuhan itu harus *tenget*-kan dengan cara dihargai, dipelihara dan diambil secukupnya. Dalam wawancara banyak disinggung tentang pemahaman bahwa manusia sebagai janin dalam kandungan alam semesta (*manik ing cacupu*), sehingga sesungguhnya tidak perlu mengambil lebih dari yang diperlukan (lihat 4.3.3:5).. Hanya saja untuk ukuran 'cukup' harus dilandasi dengan pertimbangan, dan manusia memiliki pertimbangan yang baik bila memiliki moral yang baik. Demikiaan penjelasan Jro Bayan Makalihan (keduanya)

3. Keadilan Sosial.

a. Keadilan masa sekarang.

Keadilan masa sekarang berkaitan dengan pemerataan pemanfaatan sumber daya yang ada. Sebagian besar areal *Desa Adat* Penglipuran adalah milik *Desa Adat* yang disebut sebagai Tanah Ayahan Desa (AYDS) yang dibagi-bagi sedemikian, menjadi pekarangan, lahan pertanian, hutan produksi (bambu) hutan lindung, areal yang disakralkan untuk tempat ibadah dan areal untuk fasilitas umum. Kemudian dimanfaatkan secara merata, dimana setiap KK *Krama Pangarep* menempati *karang kerti* dan menggarap lahan pertanian yang rata-rata sama luasnya. Hal ini sangat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 dari U U D 1945. Bahkan kalau pasal ini menurut Hadi (2001) baru hanya menyiratkan penggunaan sumber daya untuk kesejahteraan, tapi belum mencerminkan pembelaan terhadap lingkungan, maka di *Desa Adat* Penglipuran pembelaan dan penghargaan terhadap lingkungan demikian kuat.

Dalam setiap komponen lingkungan ada sesuatu *tenget*, seperti dapat diamati dalam ketentuan *awig-awig* ataupun kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Tetapi bagaimana rasa keadilan itu bagi *Krama Ngerob* yang dengan status menumpang? Hal ini dijelaskan oleh *Jro Bayan Mucuk* bahwa, semasih *Krama Ngerob* ini tinggal di *karang kerti* keluarganya, dia masih tetap mendapat bagian lahan pertanian dari keluarga asalnya, walaupun dengan status bagi hasil. Mereka juga diperbolehkan mendirikan bangunan tempat tinggal pada pekarangan di bagian belakang. Itulah sebabnya *karang kerti* didesa ini dibuat memanjang ke belakang.

Kalau yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam seperti di atas, dan telah disinggung dalam bahasan sebelumnya memang sudah mencerminkan keadilan. Bagaimana dengan sumber daya lain, misalnya dalam pemerataan manfaat pariwisata?.

Jro Kelihan Adat menjelaskan bahwa, memang kepariwisataan sepenuhnya di kelola oleh *Desa Adat Penglipuran* dan diserahkan pelaksanaannya kepada muda-mudi (*Deha Taruna*). Melalui *pesangkepan desa* disepakati bahwa, perlu adanya penggiliran kunjungan terhadap rumah yang menjadi obyek kunjungan. Penggiliran dilakukan dengan mengatur kunjungan hanya pada 5 rumah setiap hari. Penggilirannya diatur dan diawasi oleh muda-mudi. Muda-mudipun mengatur penugasan anggotanya secara bergilir. Dengan demikian akan terjadi pemerataan. Disamping itu bagi pemilik rumah yang akan mendapat kunjungan bisa lebih siap, misalnya dengan membuat kue-kue tradisional atau barang kerajinan untuk dijual. Tanpa diatur demikian akan terjadi kesulitan. Sebab rata-rata pada siang hari rumah penduduk tidak

berpenguji, karena ditinggal ke sawah atau tegalan sejak pagi sampai menjelang malam.

Jadi, penulis berpendapat bahwa setiap permasalahan baru yang menyangkut pemerataan dan keadilan selalu dapat mereka pecahkan dengan baik melalui musyawarah. Namun demikian, penulis masih ingin tahu lebih jauh, mengingat 'ketidak-adilan' adalah sumber konflik didalam setiap organisasi, dan 'musyawarah' itu gampang dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Akhirnya dalam diskusi kelompok hal itu terjawab dengan ungkapan yang disampaikan oleh seorang peserta (Made Jingga):

<p><i>"Kramane driki sami kantun ngapti kera- hajengan majalaran antuk paras-paros, salunglung- sabayantaka</i></p>	<p>Warga disini semua (sadar) mendamba kesejahteraan dan kebahagiaan yang bisa di- capai melalui <i>paras-paros</i> dan <i>salunglung-sabayantaka</i>.</p>
---	--

Ungkapan ini agak sulit diterjemahkan, setelah ditanyakan kepada para informan kunci, artinya adalah seperti di atas, dengan penjelasan: *Paras-paros* berasal dari kata *pah-ro* = bagi dua yang kemudian menjadi kata majemuk berulang berubah bunyi *paras-paros* = bagi rata atau pemerataan. *Salunglung* berasal dari kata *sa-luhung-luhung* = semuanya baik. *Sabayantaka* dari *sabayantaka*, *baya* = bahaya dan *antaka* = mati. Jadi *salunglung-sabayantaka* kira-kira sepadan dengan sehidup semati atau baik buruk ditanggung bersama)

b. Keadilan masa depan.

Barangkali masalah keadilan untuk masa sekarang telah dapat diselesaikan melalui ketentuan *awig-awig* atau melalui musyawarah dengan prinsip *paras-paros salunglung sabayantaka* seperti di atas. Bagaimana dengan keadilan antara

generasi sekarang dengan generasi yang akan datang? Hal ini bukan belum dipikirkan oleh para leluhur orang Penglipuran. Buktinya di dalam *awig-awig* dan *drestha* ada ketentuan: larangan memperjual belikan lahan kepada orang di luar warga Penglipuran, terlebih lagi bagi tanah yang berstatus AYDS; sistem pewarisan; pembatasan jumlah penduduk melalui jumlah *Krama Pangarep*. Ini semua mengandung prinsip keadilan masa depan melalui pemeliharaan keseimbangan daya tampung dan daya dukung lingkungan dan pembatasan jumlah penduduk

Disamping itu, adanya pemahaman yang merata dalam masyarakat, bahwa lingkungan (alam sekitar) adalah ciptaan dan milik Tuhan, manusia hanya boleh meminjam untuk sementara dan seperlunya. Hal ini akan sangat menjamin eksistensi lingkungan untuk diwariskan seutuhnya kepada generasi mendatang.

4. Kesempatan menentukan nasib sendiri.

a. Masyarakat mandiri.

Masyarakat mandiri (*self reliant community*) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dalam lingkungan sendiri bukan hal baru bagi masyarakat *Desa Adat* Penglipuran. Mereka telah memiliki mekanisme yang mantap melalui *pasuara* dan *pasangkepan* atau *paruman* desa. Pada saat penelitian, sempat pula teramati adanya kekuatan dan keberanian untuk memutuskan permasalahan yang berkenaan dengan pihak luar (wisatawan atau pemerintah) dengan membuat larangan atau bernegosiasi. Wisatawan dilarang memasuki areal yang di-

tenget-kan kecuali dengan tata cara tertentu. *Desa Adat* Penglipuran saat penelitian dilakukan sedang dalam tahap negosiasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangli mengenai pembagian hasil retribusi pariwisata. Hal lain terungkap dari petikan wawancara dengan beberapa orang warga yang sama-sama mengatakan:

"... yen kentenang ten ya kadi kebun binatang, wenten toris rawuh titiang driki dados tontonan.

Punapa-punapi benjangan taler desane sane pinih riin keni".

"..... kalau begitu nantinya seperti kebun binatang. Ada wisatawan datang kami jadi tontonan.

Kalau ada apa-apa toh juga masyarakat disini yang akan terkena"

Adalagi ungkapan lain:

"Titiang deriki tan ja nunas pang akeh, kewanten genep antuka biaya pemeliharaan lan tunasa ring alit-alite, cukup sampun".

"Kami tidak minta banyak, hanya agar ada untuk biaya pemeliharaan dan sekedar imbalan untuk muda-mudi yang mengelola, cukuplah".

Pernyataan-pernyataan di atas yang nampaknya sederhana, namun mengandung hal yang mendasar yakni kepolosan, kewajaran dan keberanian. Berdasarkan kenyataan itu pula, menurut *Kelihan Adat* akhirnya disusun usulan kepada Pemerintah Kabupaten untuk merubah Surat Keputusan Bupati Nomor: 556.05/171/2001, tentang pengelolaan obyek wisata.

Ini membuktikan bahwa masyarakat Penglipuran melalui kelembagaan *Desa Adat*nya yang kuat telah menuju menjadi masyarakat mandiri (lihat pula uraian pada 4.4.2: 2).

b. Partisipatori demokratis.

Partisipatori demokratis dimaknai sebagai keterbukaan dan transparansi. Seperti telah pula dibahas sebelumnya (3.a dan b), tentang keadilan sosial ternyata masyarakat *Desa Adat* Penglipuran sangat demokratis, dimana keterbukaan dan transparansi sangat dijunjung tinggi. Tidak ada persoalan yang menyangkut kepentingan desa yang tidak diketahui oleh warga. Semua permasalahan dibahas dalam *pesangkepan* yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan purnama. Melalui sistem *ulu-apad*, masalah pergantian kepemimpinan juga menjadi sangat jelas dan transparan (perhatikan uraian tentang sistem pemerintahan adat pada 4.3.3:4). Setiap orang yang telah masuk sebagai *Krama Pangarep* akan berkesempatan menjadi pemimpin, hanya menunggu waktu. Mereka memulainya dari bawah sehingga berkesempatan untuk menempa diri dengan mencontoh mereka yang lebih 'senior' yang ada di atasnya. Yang lebih senior-pun tidak 'arogan', karena mereka pernah mengalami setiap tahap di bawahnya. Misalnya tentang *Kanca Roras*,: ketika tiba gilirannya menduduki status ini, mereka telah siap secara mental dan pengetahuan tentang berbagai ketentuan adat; ketika menjalankan tugas *Kanca Roras*: mereka sebut sebagai *ngayah* yang artinya menjalankan kewajiban melalui pengabdian, mereka tidak pernah merasa sebagai pemimpin, tetapi bila ditanya, dengan rendah hati mereka akan menyebutnya sebagai 'kebetulan saja saya berkesempatan untuk *ngayah* menjadi orang yang dituakan'; bila tiba waktunya untuk mundur sesuai ketentuan *awig-awig*, mereka dengan lapang dada menyerahkan statusnya kepada orang yang berada pada nomor urut berikutnya.

Demikian pula tentang regenerasi, masalah ini telah mempunyai mekanisme yang mantap. Setiap anak yang telah akil-balig direkrut menjadi *Sekaha Daha Teruna* (anggota organisasi muda-mudi). *Daha Teruna* ini sejak dini telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan adat seperti menyelenggarakan upacara kematian, upacara di Pura tertentu, kebersihan desa, dan mereka juga mengadakan *sangkepan* (rapat) setiap bulan purnama sore hari. Melalui kegiatan-kegiatan adat yang diikuti mereka belajar, sehingga pada saatnya dewasa dan menikah mereka telah siap mental dan moral untuk terjun sebagai *krama*./ anggota masyarakat

Perlu ditambahkan bahwa setiap perubahan status: sejak lahir, anak-anak, akil-balig, remaja dan dewasa dalam muda-mudi, menikah, masuk sebagai *Krama Pangarep* atau *Krama Ngerob*, menduduki status sebagai *Kanca Roras*, mengundurkan diri bahkan sampai meninggal ada momen-momen yang dianggap *tenget*. Setiap tahapan itu dilewati tidak hanya melalui proses visual atau oral tapi melalui proses bathin yakni perenungan dalam upacara persembahyangan yang disebut *yadnya*. *Yadnya* yang paling sederhana adalah “*mapajat*” yaitu bersaksi kepada Tuhan dengan disaksikan oleh keluarga, warga yang lain dan *Prajuru Adat*.

Dengan demikian masalah kepemimpinan dan regenerasi, yang biasanya pelik dalam keorganisasian, bagi masyarakat Penglipuran sudah tidak menjadi masalah lagi.

Selanjutnya berkenaan dengan hak mengeluarkan pendapat (*pasuara*) dan pengambilan keputusan (*pararem*) telah pula diatur dalam *awig-awig*. Tentang *pasuara* dan *pararem* ini juga terdapat prinsip-prinsip yang lazim dengan istilah: *sagilik-saguluk-sasarpanaya* atau *briuk sepanggul*. *Sagilik-*

saguluk-sasarpanaya menurut *Jro Bayan Nyoman* diartikan: *gilik* = bulat memanjang, *guluk* = menyatu, *sarpa* = ular, *naya* = daya. Jadi usulan atau suatu keputusan itu harus mengandung unsur kebulatan pemikiran, untuk jangka panjang, tidak kaku tapi lentur bagai tubuh ular. Sedangkan *briuk sepunggul* diartikan: *briuk* = kata untuk melukiskan sesuatu benda dalam jumlah banyak jatuh bersamaan, *punggul* adalah alat pemukul gambelan. Jadi usulan atau pendapat atau keputusan yang diambil dalam rapat itu di-analogikan bagaikan jatuhnya alat pemukul gambelan. Boleh saja bentuknya berbeda, jatuhnya tidak persis bersamaan, bilah yang dipukulpun berbeda, sehingga bunyi yang dihasilkan juga berbeda, namun bila didengar secara keseluruhan timbul sebuah harmoni yang menjadi sebuah lagu.

Jadi dari pembahasan ini nampak bahwa, ternyata terdapat suatu hubungan antara prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dengan nilai-nilai budaya yang mengandung etika lingkungan sebagaimana disimbolkan dalam *tenget*. Dengan perkataan lain, dalam *tenget* sebagai sebagai salah satu wujud kearifan lokal mengenai lingkungan, telah terbangun kearifan yang mengandung nilai-nilai keberlanjutan, walaupun dalam pendekatan dan istilah yang berbeda. Aspek-aspek kearifan dimaksud, sejauh yang dapat terungkap dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

ASPEK KEARIFAN LOKAL DALAM <i>TENGET</i>	PENJELASAN
Analogi alam dan manusia	<i>Bhuwana Agung</i> (alam) identik dengan <i>Bhuwana Alit</i> (diri manusia) dan keduanya memiliki keterhubungan bagai manik ing cacupu (manusia bagai janin dalam rahim alam)

<i>Konsep Tri Hita Karana</i>	Konsep holistik tentang tiga (<i>tri</i>) penyebab (<i>karana</i>) kesempurnaan (<i>hita</i>). Lingkungan dikategorikan menjadi lingkungan fisik alamiah atau binaan (<i>palemahan</i>), lingkungan sosial (<i>pawongan</i>) dan lingkungan rohaniah (<i>parhyangan</i>). Implementasinya dalam <i>Desa Adat</i> berupa pemitakatan (zonasi) areal desa mengikuti aturan <i>Tri Mandala</i> (<i>utama</i> ~ areal yang dilindungi, <i>madya</i> ~ areal lingkungan binaan dan <i>nista</i> ~ areal yang dikonservasi)
<i>Padewasan</i>	Ketentuan baik buruknya hari untuk melakukan suatu kegiatan sebagai mana ditentukan dalam 'Wariga' (pengetahuan tentang perhitungan dan siklus waktu).
<i>Tanah Ayahan Desa Adat</i>	Sumber-daya yang berpotensi strategis (dalam hal ini sebagai desa agraris adalah lahan) dikuasai oleh desa dan pemanfaatannya secara adil melalui pembagian <i>karang kerti</i> (pekarangan rumah) dan <i>cecatu</i> (tanah garapan)
<i>Pasuara-Sangkep- Pararem- Awig-Awig dan Drestha</i>	Mekanisme penggalan aspirasi, musyawarah, pengambilan keputusan dan kepastian hukum serta penghargaan terhadap nilai-nilai historis dan kultural.
<i>Parajuru Adat dan ulu-apad</i>	<i>Prajuru</i> = model kepemimpinan bersama atau jamak (bukan pemimpin tunggal) dan sistem regenerasi dan pergantian kepemimpinan yang adil, transparan, demokratis dan berkelanjutan
<i>Krama Pangarep dan Pangerob</i>	Kejelasan status penghuni berkaitan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan
<i>Yadnya dan Ngayah</i>	Pengetahuan tentang pembiasaan kebersediaan berkorban. Harta benda termasuk diri manusia adalah miliknya. Kerja adalah kewajiban dalam rangka memperbaiki kehidupan dan melayaniNya.
<i>Penyeledihi dan Waris</i>	Regenerasi dan pewarisan disiapkan sejak dini dengan mengkaitkan dengan <i>swadikara</i> (hak) dan <i>swadharma</i> (kewajiban).

5.3.2. Menghidupkan dan mempertahankan *tenget* dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan

Dalam wawancara dengan masing-masing informan kunci jelas tersirat bahwa *tenget* mempunyai arti penting dalam kehidupan individu atau kelompok. Demikian pula yang terungkap dalam diskusi kelompok. Lalu bagaimana *tenget* dapat tetap hidup, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan? Lurah Kubu memberikan pandangannya sebagai berikut:

Pertama, harus dilakukan kajian secara terus-menerus sehingga didapat pemahaman yang benar. Kedua, nilai-nilai yang mempunyai arti penting bagi prikehidupan sosial budaya dan lingkungan kemudian dituangkan dalam awig-awig. Lalu ketiga, disosialisasikan serta diterapkan sehingga kemudian menjadi kebiasaan atau tradisi.

Kalau pandangan Pak Lurah ini benar, pertanyaan berikutnya adalah; siapakah yang harus melakukan pengkajian?; Siapakah yang bertugas merumuskan dalam *awig-awig*?; Siapakah yang harus melakukan sosialisasi serta mengawasi kebenaran penerapannya?.

Pak Lurah dengan mantap memberi keyakinannya dengan mengatakan sebagai berikut:

Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Pengalaman mengatakan begitu. Itu harus dilakukan sendiri oleh masyarakat. *Desa Adat Penglipuran* telah memiliki mekanisme itu. Misalnya: *pesangkepan*, *pararem*, *pasuara*, *ngayah*, *ulu-apad*, kaderisasi dalam *daha-taruna* dan seterusnya, banyak sekali. Tinggal dijaga kelangsungannya.

Nah, menjaga kelangsungannya berarti terkait dengan keberlanjutan. Ketika ditanya siapa yang harus menjaga kelangsungannya, Pak Lurah kembali menekankan:

Ya masyarakat itu sendiri, kita tidak perlu mencampuri, jangan-jangan justru mengganggu. Yang penting kita mengingatkan dan mendorong saja.

Dari dialog di atas, walaupun sarat dengan nuansa birokratis, tapi menyiratkan kebenaran berdasarkan pengalaman seorang pejabat yang dekat dengan dinamika masyarakat.

Pandangan ini kelihatan memiliki kesesuaian dengan pendapat Gandhi sebagaimana disitir oleh Bryant (lihat, 2.2.1.) tentang pembangunan yang diartikan sebagai ‘ mengangkat potensi manusia. Lalu, apakah pandangan seperti itu senada dengan pandangan para tokoh adat? *Jro Kelihan Adat*, ketika diajak membicarakan tentang bagaimana agar *tenget* dapat bertahan mengemukakan pandangan:

*Tenget wantah jalaran
mawosang indik ala ayu utawi
wenang tan wenang.*

*Jagate sami druwen Widhi,
imanusa dados nganggen
nanging manut susila.*

*Yen dumun baose akehan
kaniskalan, yan mangkin
mangda taler manut ring
sekalane*

“*Tenget* itu adalah cara kita untuk menyatakan batas baik buruk atau boleh dan tidak boleh..

Seisi alam semuanya kepunyaan Tuhan, manusia boleh me-ngolahnya tetapi dengan etika

Kalau dulu disam-paikan melalui ceritra-ceritra gaib tetapi sekarang harus disertai dengan penjelasan”.

Lalu pandangan di atas disertai dengan banyak contoh dari yang sederhana sampai yang agak rumit. Misalnya dahulu tidak boleh duduk diambang pintu, karena kalau ada mahluk gaib yang lewat bisa sakit. Tetapi kini harus dijelaskan kalau duduk di ambang pintu tidak sopan karena menghalangi orang yang berlalu-lalang. Kalau dahulu “*mecaru*” disebut sebagai ritual untuk

mengusir roh jahat, Kini harus dijelaskan bahwa “car” berarti seimbang, sehingga mecaru adalah memohon kepada Tuhan agar hubungan manusia dengan lingkungan tetap harmonis.

Dari penjelasan-penjelasan di atas setidaknya dapat ditarik tiga pokok pemikiran yaitu:

- *tenget* masih relevan untuk difahami dan diaktualisasi sebagai simbol untuk mengkomunikasikan etika lingkungan sebagai sesuatu yang sangat berarti (nilai budaya) bagi masyarakat Penglipuran.
- *tenget* dapat dipertahankan dengan pemahaman bersifat menyeluruh (fungsional-holistik), menyangkut: konsepsi yang dikandung; perilaku simbolis dan tanda fisiknya.
- *tenget* dapat direvitalisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan men-sinergi-kannya sebagaimana senarai dalam ilustrasi V.6.

5.3.3. Sinergi dalam Perencanaan Lingkungan

Perencanaan lingkungan memerlukan kemampuan dan multidisiplin untuk mengembangkan setiap potensi dan peluang yang ada dalam suatu lingkungan. Yang dimaksud dengan potensi tidak saja kandungan sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, termasuk berbagai kearifan dalam sistem nilai budayanya. Akan halnya perencanaan lingkungan di *Desa Adat Penglipuran*, sebagaimana diuraikan pada: 4.4.1 dan 4.4.2 membuktikan bahwa:

- Perencanaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak luar (pemerintah), walaupun telah berupaya untuk mengadopsi nilai budaya setempat secara maksimal, namun tidak sepenuhnya dapat berhasil, karena ketika ditetapkan menjadi sebuah kebijakan, kemudian diimplementasikan, tidak meletakkan

NO	PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	HUBUNGAN SINERGIS	ASPEK KEARIFAN LOKAL DALAM TENGET	PENJELASAN
01	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan materi. b. Pemenuhan kebutuhan non materi 		<ul style="list-style-type: none"> ● Analogi alam dan manusia 	<p>Konsep <i>Bhuhana Agung ~ Bhuhana Alit dan Manik Ing Cacupii</i>. Konsep ini mengajarkan bahwa apapun perlakuan manusia terhadap lingkungan (alam) sesungguhnya merupakan perlakuan terhadap dirinya sendiri.</p> <p>Kategori lingkungan: <i>palemahan</i> (fisk), <i>pawongan</i> (sosial) dan <i>parhyangan</i> (rohani) merupakan sumber inspirasi etika dalam perlindungan lingkungan melalui pendekatan harmoni hubungan: alam – manusia – Tuhan</p>
02	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan lingkungan b. Mengurangi konsumsi 		<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Konsepsi Tri Hita Karana</i> ● <i>Padewasan</i> 	<p>Perhitungan baik buruknya hari menurut ketentuan dalam 'Warga', dapat menghindarkan pemanfaatan sumberdaya berlebih dan semena-mena.</p> <p>Potensi strategis dikuasai oleh <i>Desa Adat</i> dan pemanfaatannya melalui pembagian <i>karang kerii</i> (tempat tinggal) dan <i>cecatu</i> (tanah garapan), dapat menghindarkan ketimpangan sosial ekonomi</p>
03	<ul style="list-style-type: none"> a. Keadilan masa sekarang b. Keadilan masa depan 		<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Tanah Ayahan Desa</i> ● <i>Pasuar-Sangkep-Pararem- Awig-Awig dan Drestha</i> ● <i>Parajuru Adat dan ulu-apid</i> 	<p>Aspek ini menunjukkan peran dominan karena: mekanisme penggalan aspirasi, musyawarah, pengambilan keputusan dan kepastian hukum merupakan kunci keberhasilan perencanaan lingkungan berbasis masyarakat (lihat: ADS menurut Soemarwoto, 2001 pada 2.2.1)</p> <p><i>Prajuru</i> = kepemimpinan bersama (jamak) yang adil, transparan, demokratis dan berkelanjutan dan sistem regenerasi <i>ulu-apid</i> memberi kepastian bahwa setiap orang mendapat kesempatan, hak dan kewajiban yang sama.</p>
04	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat mandiri b. Partisipatori demokratis 		<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Krama Pangarep dan Pangerob</i> ● <i>Yachya dan Ngayah</i> ● <i>Penyeledihi dan Waris</i> 	<p>Kejelasan dan pembatasan status penghuni berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya dapat sebagai pendekatan keseimbangan daya tampung dan daya dukung lingkungan</p> <p>Kebersediaan berkorban 'harta benda' dan 'kerja' menghindarkan keserakahan dalam pemanfaatan dan pemilikan sumberdaya alam</p> <p>Sistem pewarisan tidak semata berarti pengakuan kesamaan hak (<i>swadikara</i>) tapi dikaitkan dengan penyerahan kewajiban (<i>swadharna</i>) kepada lingkungan <i>parhyangan</i> (rohani), <i>pawongan</i> (sosial) dan <i>palemahan</i> (fisk).</p>

Ilustrasi V.6. Korelasi sinergi aspek kearifan lingkungan dalam *tenget* dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

menjadi sebuah kebijakan, kemudian diimplementasikan, tidak meletakkan masyarakat setempat sebagai pelaku. Padahal menurut pandangan Murtopo dan Mitchel (1996) tentang kearifan lokal (lihat 1.1) bahwa semestinya masyarakat Penglipuranlah yang didorong sebagai pelaku utama, karena mereka telah mengenal dan memiliki interpretasi sendiri tentang fakta ekologi yang ada dalam lingkungannya, termasuk pemaknaan *tenget* dalam sistem nilai budaya mereka.

- Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat ternyata menunjukkan keberhasilan dan keberlanjutan. Hal ini terjadi karena bila dilihat dari 7 (tujuh) langkah Perencanaan Lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Hadi (2001) yang meliputi : identifikasi masalah; formulasi tujuan; penilaian fakta/situasi; alternatif kebijakan; pemilihan alternatif; kajian dampak; dan implementasinya, telah dilaksanakan dengan baik melalui mekanisme yang dimiliki oleh *Desa Adat* Penglipuran, yaitu; *pasuara*, *pasangkepan* dan *pararem* (penggalian aspirasi, musyawarah dan pengambilan keputusan) dengan berpedoman pada *awig-awig* dan *drestha*.

Dengan melihat kenyataan di atas, dan dengan mengingat pandangan Pak Lurah, selaku aparat terbawah yang mengenal betul dinamika masyarakatnya (lihat 5.3.2), maka upaya men-sinergi-kan antara prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dengan aspek kearifan lokal yang terkandung dalam *tenget* melalui perencanaan lingkungan dapat dilakukan dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai **pelaku utamanya**. Sedangkan pihak luar (pemerintah) dapat berperan sebagai fasilitator dan regulator. Dengan cara ini pula, *tenget* (beserta berbagai aspek kearifan lingkungan yang terkandung di dalamnya) dengan sendirinya akan terakomodasi dalam perencanaan lingkungan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Tenget memiliki arti sangat penting dalam pikiran masyarakat Penglipuran karena dipakai sebagai pengantara menuju kepada pemahaman tentang etika dalam menata hubungannya dengan Sang Pencipta, antar manusia dalam masyarakat, dan dengan lingkungan/alam di sekitarnya. *Tenget* berada dalam kesadaran pikiran berupa konsepsi yang dikomunikasikan dalam 'perilaku simbolis' dan 'tanda-tanda' fisik, sehingga *tenget* adalah simbol. 'Konsepsi' yang dimaksud adalah etika hubungan manusia dengan lingkungan dan Penciptanya dalam bentuk nilai-nilai religi, nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (sosial), sistem pengetahuan dalam mengelola alam. Pelaksanaan meng-komunikasi-kon konsepsi tersebut tampak sebagai 'perilaku simbolik', yaitu kegiatan berpola yang bermakna, seperti misalnya: pelaksanaan berbagai ritus, *pasangkepan*, *ngayah*, panen, menebang bambu/pohon. Media komunikasinya adalah wujud fisik benda budaya atau benda alam yang bermakna 'tanda' dalam pengertian 'semiotik', seperti: sebuah batu, sebatang pohon, *tugu* pemujaan, selendang yang terikat dipinggang atau komponen lingkungan fisik dan sosial lainnya. Ketika 'konsepsi', 'perilaku simbolik' dan 'tanda' berinteraksi, terjadilah *tenget* dalam pikiran individu dan masyarakat pendukungnya, berupa 'skemata' tentang pengetahuan atau pengalaman bersama. Oleh karenanya *tenget* tidak mempunyai substansi fisik, *tenget* berada pada dunia makna manusia, tak teramati, tetapi ada. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa antara *tenget*, pembangunan dan pembangunan berkelanjutan terdapat hubungan, dimana hubungan tersebut terbangun dari tahapan pemahaman sebagai berikut:

1. *Tenget* tumbuh dan berkembang dalam pemahaman masyarakat.

- *Tenget* adalah simbol yang: tumbuh dari sistem religi masyarakat pendukungnya; berkembang sebagai salah satu nilai dalam sistem nilai budaya (tentang sesuatu yang sangat berarti dalam pikiran masyarakat); diekspresikan sebagai sikap mental (cara berreaksi terhadap lingkungan).
- *Tenget* muncul dalam kesadaran pikiran atau pengetahuan bersama, berupa skemata hubungan antara: **konsepsi** tentang etika lingkungan, **perilaku simbolis** dan **tanda-tanda fisik**
- *Tenget* berfungsi sebagai **pengantara** bagi individu atau masyarakat *Desa Adat* Penglipuran dalam memahami dan mengkomunikasikan **etika lingkungan** (rasa 'kepatutan' – yang bersumber dari sistem religi mereka – dalam meletakkan dan menjaga harmoni hubungan dirinya, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anggota masyarakat dan sebagai salah satu komponen lingkungan /alam).
- *Tenget* membentuk sikap moral, yang berperan sebagai **pengendali** perilaku individu dan **sistem kontrol** (sosial-budaya, religi dan ekonomi) bagi masyarakat dalam memelihara harmoni kesetaraan hubungan fungsional-holistik antara manusia dengan lingkungannya.
- Bagi masyarakat *Desa Adat* Penglipuran, tingkat pemahaman fungsional-holistik terhadap *tenget*, terdapat pada **tokoh-tokoh panutan** masyarakat, sedangkan pemahaman masyarakat pada umumnya bergradasi antara tingkat mitis-pancosmis dan ontologis-antroposentris. Namun demikian, dalam penerapannya tetap menunjukkan tingkatan fungsional-holistik, karena adanya sistem komunikasi antara tokoh panutan dengan masyarakat melalui mekanisme berbagai kegiatan adat dan tradisi.

2. **Bergesernya pemahaman tentang *tenget* dalam kaitannya dengan pembangunan.**

- *Tenget* dapat – bahkan selalu – mengalami penyesuaian. Dalam kasus di *Desa Adat Penglipuran* pemahaman masyarakat terhadap *tenget* mulai memudar akibat pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan yang bersifat antroposentris, baik fisik (meningkatnya pendapatan, tersedianya sarana prasarana). maupun pembangunan non-fisik (pendidikan, informasi)
- Perubahan tersebut terjadi akibat sistem seleksi nilai-nilai baru yang dibawa oleh pembangunan yang ontologis–antroposentris lebih dominan dibanding sistem adaptasi nilai-nilai fungsional-holistik yang ada dalam masyarakat.

3. **Revitalisasi *tenget* dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan**

- *Tenget* dapat direvitalisasi dengan jalan tetap meletakkannya sebagai simbol dalam sistem nilai budaya, tapi disertai dengan pemahaman secara fungsional-holistik. Secara fungsional berarti adanya: pengakuan tentang keberkaitan imanensi manusia dan lingkungan sebagai sesama ciptaan yang serba sementara dalam kemaha-kuasaan Tuhan yang transendental kekal. Secara holistik berarti: harmoni sebagai tujuan utama, hanya akan tercapai dengan difahaminya etika lingkungan yakni pengakuan tentang kesetaraan dalam hubungan dialektik antara manusia dengan lingkungan (baik sosial maupun alamiah) dalam inter-aksi (saling pengaruh), inter-relasi (saling hubungan) dan inter-dependensi (saling bergantung).
- *Tenget* dengan pemahaman di atas mengandung aspek-aspek kearifan lingkungan yang dapat di-sinergi-kan dengan penerapan prinsip-prinsip

Pembangunan Berkelanjutan dalam setiap proses perencanaan lingkungan. Upaya untuk mensinergikannya dapat dilakukan seperti dianjurkan dalam rekomendasi berikut.

6.2. Rekomendasi.

Guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, setiap upaya perencanaan lingkungan hendaknya diartikan sebagai upaya men-sinergi-kan teori-teori perencanaan dengan kearifan lingkungan dalam sistem nilai budaya setempat. Hal-hal yang dianjurkan, berkenaan dengan: *tenget* dalam hubungannya dengan pembangunan dalam rangka menuju Pembangunan Berkelanjutan di *Desa Adat* Penglipuran adalah:

1. Memantapkan dan memelihara pemahaman masyarakat terhadap *tenget*.

Agar masyarakat dalam kesehariannya menerapkan pengelolaan lingkungan secara fungsional-holistik maka kualitas komunikasi antara tokoh panutan dengan masyarakat, khususnya generasi muda lebih ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan, tidak saja dengan melibatkan mereka dalam kegiatan adat (seperti yang telah dilakukan selama ini), tetapi juga dengan memberi informasi yang membantu membentuk pemahaman sejalan dengan perubahan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya.

2. Menghindarkan pergeseran atau memudarnya pemahaman *tenget* akibat kegiatan pembangunan.

Telah terbukti bahwa pembangunan yang dilakukan tanpa sepenuhnya melibatkan masyarakat di *Desa Adat* Penglipuran, seperti halnya pembangunan fasilitas wisata, kurang memberi hasil seperti diharapkan. Bahkan terdapat pula pemanfaatan areal yang semula di-*tenget*-kan, sehingga melanggar rasa kesakralan

masyarakat. Untuk itu setiap kegiatan perencanaan lingkungan hendaknya diartikan sebagai upaya mendorong masyarakat Penglipuran sebagai **pelaku utama** dengan memanfaatkan mekanisme yang telah dimiliki dalam *Desa Adat*. Perlu diingat bahwa *tenget* sebagai simbol telah hidup dalam pikiran masyarakat pendukungnya. Dengan meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan lingkungan, dengan sendirinya aspek-aspek kearifan lingkungan yang terkandung dalam *tenget* akan ter-internalisasi-kan.

3. Upaya-upaya revitalisasi.

Merevitalisasi *tenget* berarti men-sinergi-kannya dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Upaya pen-sinergi-an ini dapat dilakukan dengan meng-internal-kan aspek-aspek kearifan lingkungan, sebagaimana difahami oleh masyarakat setempat, sebagai ‘jiwa’ dari setiap prinsip pembangunan berkelanjutan (*lihat ilustrasi V.2*).

Secara operasional, dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui kegiatan perencanaan lingkungan bagi *Desa Adat* Penglipuran, maka upaya-upaya yang dianjurkan adalah:

- Prinsip pemenuhan kebutuhan materi dapat dikaitkan dengan sistem *tanah ayahan desa*. Setiap potensi desa yang strategis (lahan, aset pariwisata, hutan bambu) dikuasai oleh *Desa Adat* dan dimanfaatkan bersama sesuai rasa keadilan masyarakatnya, disertai dengan pemahaman tentang analogi alam dan manusia dengan pengertian bahwa: setiap perlakuan terhadap lingkungan sesungguhnya perlakuan terhadap diri sendiri; dan kalau dikelola dengan baik sesungguhnya alam telah menyediakan segala kebutuhan manusia (*ingat manik ing cacupu*)
- Pemenuhan kebutuhan non materi dikaitkan dengan aspek: *pasuara* (kebebasan berpendapat), *pasangkepan* (hak untuk ikut dalam musyawarah), *pararem* (hak untuk ikut memutuskan), *awig-awig* dan *drestha* (kepastian hukum). disertai dengan penerapan konsep *Tri Hita Karana* (harmoni hubungan antara manusia dengan Penciptanya, antar manusia dalam masyarakat dan manusia dengan lingkungan alamnya).

- Perlindungan lingkungan dapat disinergikan dengan sistem *Krama Pangarep* dan *Krama Pangerob* yaitu pembatasan dan kejelasan status penghuni dengan memperhitungkan luas lahan budi-daya sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disertai dengan pemahaman tentang analogi alam dengan manusia dan
- Mengurangi konsumsi dapat disesuaikan dengan sistem *padewasan* sebagai upaya pembatasan dan tatacara mengelola lingkungan, disertai dengan pemahaman analogi alam dan manusia dengan pengertian: bukan seberapa banyak yang dapat diambil, tetapi berapa sepatutnya yang boleh diambil dari alam.
- Keadilan masa sekarang dihubungkan dengan sistem *tanah ayahan desa* sebagai unsur pemerataan dengan batas keadilan seperti tertuang dalam *awig-awig*. Tentu harus dimengerti pula bahwa, rasa keadilan dalam format hukum atau undang-undang yang berlaku tidak akan persis sama dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat setempat.
- Keadilan masa depan dapat bersinergi dengan aspek *penyeledihi* dan *waris* yang bermakna pewarisan komponen lingkungan tidak saja harus seutuhnya tetapi juga lengkap dengan hak dan kewajiban untuk memeliharanya yang melekat di dalamnya.
- Masyarakat mandiri bersesuaian dengan aspek: *pasuara* (kebebasan berpendapat), *sangkep* (hak untuk ikut dalam musyawarah), *pararem* (hak untuk ikut menetapkan kebijakan), *awig-awig* dan *drestha* yakni jaminan kepastian hukum. Dapat dilengkapi pula dengan prinsip *yadnya* dan *ngayah* sebagai landasan ke-bersedia-an untuk toleran dan berkorban.
- Partisipatori demokratis terutama dapat bersinergi dengan aspek *Prajuru Adat* dan *ulu-apad*. Pemimpin dipahami sebagai 'orang suruhan' (juru) untuk melaksanakan kebijakan hasil keputusan bersama. Pemimpin dipilih dan melaksanakan tugasnya melalui mekanisme yang transparan, demokratis dan berkelanjutan (lihat kembali 4.4.3: 4).

Sinergi antara aspek kearifan lingkungan dalam *tenget* dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan seperti di atas kemudian dijadikan pedoman dalam setiap tahap perencanaan lingkungan (sesuai dengan tujuh langkah perencanaan) dan pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat Pengelipuran sebagai pelaku utamanya.

UPT-PUSTAK-UNDIP

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus (1998), *Awig-awig Adat; Desa Adat Penglipuran, Desa Adat Penglipuran*, Bangli.
- (2001), *Data Dasar Profil Desa Kubu, Kec. Bangli*, Kantor Lurah Kubu, Bangli.
- Artadi, I Ketut (1993), *Manusia Bali*, PT Bali Post, Denpasar.
- Azra, Azyumardi, dkk. (2000), *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi*, IAIN Jakarta Press, Jakarta.
- Brown, Lester R (1999), *Masa Depan Bumi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Bryant, Coralie and Louise G White (1982), *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang* (alih bahasa oleh Rusyanto L Simatupang), LP3ES, Jakarta.
- Budihardjo, Eko, et al. (1993), *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung .
- Budihardjo, Eko, ed. (1997), *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*, Djambatan, Jakarta .
- Budihardjo, Eko, et al. (1999), *Kota Berkelanjutan*, Alumni, Bandung .
- Conyers, Diana and Peter Hills (1984), *An Introduction to Development Planning in the Third World*, John Willey & Sons, Singapore.
- Creswell, John W (1994), *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, Sage Publication, London.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa (2001), *Desa Adat; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar .
- Dove, Michael R (1985) *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta.
- Geertz, Clifford (1992), *Kebudayaan dan Agama*, Kanisius, Yogyakarta .
- Goris, Roelof (1926), *Secten op Bali*, alih bahasa oleh P S Kusumo Sutojo (1986) berjudul: Sekte-sekte di Bali, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Hadi, Sudharto P (2001), *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadi, Sudharto P (1997), *Aspek Sosial AMDAL, Sejarah, Teori dan Metode*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta .
- Hadi, Sudharto P (2000), *Manusia dan Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hartiningsih, Maria (2002), KTT Bumi 1992: *Teatre Dunia di Negeri yang Sedang Bangkrut / Kemacetan Perundingan dan Festival Kemunafikan / Pre Com IV WSSD: Madu di Tangan Kanan Empedu di Tangan Kiri*, Kompas, Senin 27 Mei 2002.
- Hartiningsih, Maria (2002), *Pertarungan Nasib di Atas Kertas / Domba di Hadapan Taring Srigala*, Kompas, Senin 3 Juni 2002.

- Ife, Jim (1998), *Community Development*, creating community alternatives – vision, analysis and practice, Longman, Melbourne, Australia.
- Indarti, Erlyn (2001), *Kumpulan Materi Kuliah Metodologi Penelitian Lingkungan*, Perogram Studi Magister Ilmu Lingkungan Universtas Diponegoro, Semarang.
- IHRF (Ina Hoi Riwa Foundation) (2002), *Kisaran Island Community Development*, download internet : <http://www.geocities.com/yotowawa/language.htm>.
- Irwan, Zoel'aini Djamal (1996), *Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem, Komunitas dan Lingkungan*, Bumi Aksara, jakarta.
- Jendra, I W (1999), *Weda (universal, fleksibel dan ilmiah)*, Krisna Raya, Denpasar.
- Koentjaraningrat (2000), *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Makarim, Nabel (2000), *Tiga Belas Tahun Pembangunan Berkelanjutan*, Kompas Minggu, 4 Juni 2000, download internet : <http://avicenia.tripod.com/.htm>.
- Moleong, Dr. Lexy J (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Murtopo, Sugeng dan Bruce Mitchel (1995), *Bali; Balancing Environment Economy and Culture*, Department of Geography University of Waterloo, Ontario, Canada.
- Peursen, C A van (1976), *Strategi Kebudayaan*, Kanisius, Jogjakarta.
- Poespowardojo, Soerjanto (1989), *Strategi Kebudayaan, suatu pendekatan filosofis*, PT Gramedia, Jakarta.
- Sadia, I Ketut Lanang Pasek (2002), *Desa Adat Penglipuran - Bangli*, Kantor Lurah Kubu, Bangli.
- Soemarwoto, Otto (2001), *Atur Diri Sendiri; Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Stell, James (1996), *The Translation of Tradition ; a comparative dialectic*, TDSR volume VII number 11, August 1999. .
- Supartha, Wayan –ed. (1999), *Bali dan Masa Depan*, PT Bali Post, Denpasar.
- Suriasumantri, Jujun S (2001), *Filsafat Ilmu; sebuah pengantar populer*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta.
- Triguna, IBG Yudha (2000), *Teori Tentang Simbol*, Widya Dharma Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.
- WCED (World Commission on Environment and Development) (1988), *Our Common Future* (alih bahasa oleh Bambang Sumantri, Hari Depan Kita Bersama), PT Gramedia, Jakarta.